

EDISI 67 / 2021

# EDUKASI

## K E U A N G A N

---

**KALEIDOSKOP 2021**

*Giatkan peran di tengah keterbatasan*



---

# Susunan Redaksi

---

**PENANGGUNG JAWAB**

Sekretaris BPPK

**PEMIMPIN REDAKSI**

Sugeng Satoto

**REDAKTUR**

Tri Budi Murwanto  
Amir Abdulhaji  
Rachmatunnisya  
Hestin Parmawati  
R. Eha Salhah  
Iki Rizal Apriandi  
Rinni Rodiah Munajatisari  
Sri Wahyuni  
Fajar Prasetyo Yuwono  
Andita Trias Nur Azizah  
Hartono  
Muhammad Hikmah  
Mochamad Zakariya  
Mukhtaromin  
Rochi Agustina  
Primandita Fitriandi  
Kristian Agung Prasetyo

**EDITOR**

Abdul Aziz Maghfur  
Ardes Martua Y. Sitanggang  
Arimbi Putri  
Ridwan Sidik Kurniawan

**DESAIN GRAFIS & FOTOGRAFER**

Victorianus M. I. Bimo Adi  
Luqman Hakim

Redaksi menerima artikel untuk dimuat dalam majalah ini. Artikel ditulis dalam huruf Arial 11 spasi 1,5, maksimal 2.500 kata.

Artikel dapat dikirimkan ke [edukasikeuangan@kemenkeu.go.id](mailto:edukasikeuangan@kemenkeu.go.id).

Isi majalah ini tidak mencerminkan kebijakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

**ALAMAT REDAKSI**

Jl. Purnawarman No. 99 Kebayoran Baru,  
Jakarta Selatan 12110  
Telp: +62 21 7394666, 7204131  
Fax: +62 21 7261775  
<http://www.bppk.kemenkeu.go.id>

## DAFTAR ISI

SALAM REDAKSI	3
LINTAS PERISTIWA	4
LIPUTAN UTAMA	6
LIPUTAN KHUSUS	15
PROFIL	22
SERAMBI ILMU	27
TAHUKAH KAMU	38
KOMUNITAS	42
CERITA ALUMNI	46
TIPS & TRIK	49
MATA AIR	53
KESEHATAN	55
<i>POINT OF INTEREST</i>	58
RESENSI	60
GALERI	62
KANG EDU	64



**KEMENKEU**  
CORPU TALK



## **UU HKPD : Menuju Penguatan Desentralisasi Fiskal untuk Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat**



**OPENING SPEECH**  
**ANDIN HADIYANTO**  
KEPALA BADAN PENDIDIKAN  
DAN PELATIHAN KEUANGAN



**KEYNOTE SPEECH**  
**ASTERA PRIMANTO BHAKTI**  
DIREKTUR JENDERAL  
PERIMBANGAN KEUANGAN



**NARASUMBER**  
**MACHFUD SIDIK**  
DIREKTUR JENDERAL  
PERIMBANGAN KEUANGAN  
PUSAT DAN DAERAH (2001-2004)



**NARASUMBER**  
**PUTUT HARI SATYAKA**  
DIREKTUR DANA TRANSFER KHUSUS



**MODERATOR**  
**NUR HENDRASTUTI**  
WIDYAISWARA AHLI MADYA  
PUSDIKLAT KNPk



**HOST**  
**IVAN RIZKI ARVIANDI**  
KEMENKEU CORPU TV

Scan  
Here



**Rabu, 22 Desember 2021**  
**08.30 s.d. 11.30 WIB**  
**Youtube BPPK Kemenkeu RI**

Narahubung  
081280780360  
081545830203

Registrasi:  
[bit.ly/REGISKCTUUIHKPD](https://bit.ly/REGISKCTUUIHKPD)  
Terbuka untuk ASN dan Umum  
Peserta yang memenuhi syarat akan mendapatkan sertifikat



---

## SALAM REDAKSI

---

*Tahun 2021 layaknya menjadi momentum untuk kontemplasi sekaligus tahun pembuktian bagi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) dalam memberikan kontribusi terbaik di Kementerian Keuangan terkait penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi di bidang keuangan negara. Penguatan konsep pembelajaran terintegrasi menjadi salah satu upaya agar seluruh punggawa keuangan negara tetap dapat mendapatkan kesempatan dan kemudahan dalam mengembangkan diri masing-masing.*

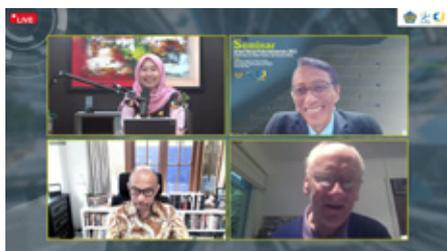
*Mengawali edisi kaleidoskop ini, ragam peran BPPK untuk Kementerian Keuangan sepanjang 2021 akan disajikan dengan lengkap dalam rubrik Liputan Utama. Tanggung jawab besar juga diemban oleh BPPK yang memiliki peran sentral dalam pengembangan SDM serta menjadi motor penggerak untuk implementasi learning organization di Kementerian Keuangan. Selain itu, kontribusi BPPK di dalam Hari Oeang RI ke 75 juga layak untuk disorot. Di tahun 2021, BPPK menjadi koordinator pelaksanaan rangkaian kegiatan Hari Oeang ke 75 dengan Kick Off yang diselenggarakan di Sekretariat BPPK. Rangkaian festival budaya belajar juga diracik dengan apik dan akan diulas dalam rubrik Liputan Utama.*

*Jika Anda ingin tahu lebih banyak mengenai Presidensi Indonesia pada G20 serta implikasinya bagi Indonesia, simaklah jawabannya pada rubrik Serambi Ilmu. Wawasan dan ketrampilan menyikapi akselerasi digital dalam pelaksanaan tugas fungsi sehari-hari di BPPK juga dapat Anda peroleh dengan membaca rubrik Tips and Trick.*

*Rubrik Lintas Peristiwa tentu saja akan menyuguhi Anda semua dengan rangkaian kegiatan-kegiatan utama di BPPK yang dilaksanakan tidak hanya oleh Pusdiklat, PKN STAN, melainkan juga oleh Balai Diklat di lingkungan BPPK. Melalui rubrik Mata Air, tulisan sarat makna mendalam akan membawa Anda untuk dapat lebih memaknai setiap detik waktu yang ada dalam hidup kita dan meyakini bahwa lompatan besar acapkali diawali dengan lompatan-lompatan kecil.*

*Meski akhir tahun ini pandemi belum berhenti, yuk kita perkaya khasanah wawasan dan keilmuan kita dengan Majalah Edukasi Keuangan. Selamat menikmati sajian kami!*

# November- Desember



## SEMINAR JURNAL ILMIAH PERBENDAHARAAN 2021

BPPK bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan Seminar Jurnal Ilmiah Perbendaharaan 2021 (Conference on Public Finance and Treasury 2021), mengusung tema “Pandemi Covid-19: Antara Dampak dan Peluang Meretas Jalan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan Negara yang Lebih Baik”. Tema ini selaras dengan kondisi Pandemi Covid-19 yang sudah hampir 2 tahun melanda dunia. Selain itu, seminar kali ini diharapkan dapat memberikan insight serta cara berpikir dan inovasi baru bagi para pemangku kepentingan dalam menyusun dan mengimplementasikan berbagai kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan perbendaharaan negara.



## BINCANG SORE KEPALA BPPK DENGAN PARA PESERTA LOMBA MENGAJAR APBN 2021

Kepala BPPK Andin Hadiyanto, berkesempatan untuk berbincang secara langsung dengan para peserta Lomba Mengajar APBN 2021 yang dilaksanakan di Sekretariat BPPK. Dalam kegiatan tersebut, Kepala BPPK beserta Kepala Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan menyampaikan informasi kepada para peserta mengenai Kemenkeu Learning Center sebagai *knowledge repository* di lingkungan Kemenkeu. Tak ketinggalan, para peserta lomba yang berjumlah 10 orang itu juga berkesempatan mengelilingi beragam fasilitas di BPPK, termasuk Studio BPPK.



## HAKORDIA BPPK 2021: MERAWAT INTEGRITAS DI KALA PANDEMI

Dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2021, BPPK menyelenggarakan webinar yang bertajuk “Merawat Integritas Di Kala Pandemi”. Acara tersebut menghadirkan Wakil Ketua KPK sebagai narasumber. Peringatan Hakordia BPPK ini turut menayangkan pembacaan puisi dan berbagai film pendek bertema antikorupsi yang diproduksi oleh sejumlah unit di lingkungan Kementerian Keuangan.



#### **KEPALA BPPK IKUTI KEMENKEU MENGAJAR 6 DI SMAN 3 SEMARANG**

Kepala BPPK Andin Hadiyanto kembali turut berpartisipasi dalam kegiatan Kemenkeu Mengajar. Pada Kemenkeu Mengajar 6 tahun ini, Kepala BPPK berkesempatan mengajar di SMAN 3 Semarang. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPPK berbagi cerita mengenai peran keuangan negara dalam memulihkan ekonomi nasional kala pandemi, sisi-sisi lain Indonesia dan keberagaman negeri yang mungkin belum disadari, serta hal menarik lainnya. Para siswa SMAN 3 Semarang tampak antusias mengikuti kegiatan ini.

#### **BPPK UKIR PRESTASI DI TOP DIGITAL AWARDS 2021**

Di penghujung tahun 2021, BPPK berhasil meraih prestasi berharga berupa Top Digital Implementation 2021 #Level Stars 4 dalam ajang Top Digital Awards 2021. Selain itu, BPPK juga memperoleh penghargaan sebagai Top Leader on Digital Implementation 2021 melalui Kepala BPPK, Andin Hadiyanto. Ajang ini merupakan event penghargaan di bidang Teknologi Digital (IT & TELCO) di Indonesia kepada perusahaan dan instansi pemerintahan yang diselenggarakan oleh majalah ItWorks yang bekerjasama dengan beberapa asosiasi dan perusahaan konsultan TI TELCO/ Digital.



A promotional poster for the 'KLF Special' event. At the top left is the 'Kemenkeu Learning Festival' logo. The central image shows two men: Andin Hadiyanto on the left and Nufansa Wira Sakti on the right. The text 'SPESIAL' is in a yellow box above the 'KeR' logo. Below the logo, it says 'Learning Organization Knowledge Room' and 'Rekam Pengetahuanmu!'. The names of the two men are in white circles. Below the names, it says 'Selengkapnya: lynk.id/klf'. At the bottom, it states 'Senin, 30 Agustus 2021 13.00 WIB s.d selesai' and includes icons for Zoom and YouTube. The background has a colorful geometric pattern and the word 'loker' written vertically on the right side.

ABDUL 'AZIZ MAGHFUR

# Peran BPPK untuk Kementerian Keuangan Sepanjang 2021

*Tahun 2021 menjadi tahun yang tidak mudah bagi sektor pemerintahan. Pandemi Covid-19 yang masih terus melanda, mendorong banyak pihak termasuk BPPK untuk dapat beradaptasi dengan cepat, dan memastikan semua layanan kepada stakeholders tetap berjalan. Presiden Joko Widodo melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi meminta kepada para ASN, meski di tengah segala keterbatasan, untuk tetap berkomitmen, memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh stakeholders.*

## KOMITMEN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM KEMENKEU

Pandemi Covid-19 yang masih berlanjut sejak awal 2020 lalu, menjadi titik balik akselerasi pembelajaran berbasis digital di BPPK. Hal itu ditandai dengan gerak cepat konversi pelatihan klasikal menjadi pelatihan berbasis digital.

BPPK telah mengonversi sebagian besar pelatihan tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh atau PJJ, dan *e-learning*, dengan mengedepankan pemanfaatan teknologi informasi. Pembelajaran Jarak Jauh ini diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Kepala BPPK Nomor PER-6/PP/2021 tentang Pedoman Pelatihan Jarak Jauh di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Sampai dengan Triwulan III 2021, telah tercatat lebih dari 750 pembelajaran digital ( yang terdiri dari *e-learning* dan pelatihan jarak jauh) yang diselenggarakan oleh seluruh pusdiklat dan balai diklat. Sampai dengan Triwulan III 2021 pula, program *e-learning* maupun *microlearning* diikuti oleh sebanyak 195.473 peserta dan dapat diakses pada portal Kemenkeu *Learning Center*. Disamping itu, juga terdapat 263 *open access course*, yang dapat diikuti secara terbuka oleh seluruh pegawai Kementerian Keuangan.

BPPK juga telah melaksanakan pelatihan tatap muka klasikal dengan tetap berpedoman pada penerapan protokol kesehatan ketat sesuai SE-4/PP/2021 tentang Pedoman Pembelajaran Klasikal Dalam Tatanan Tatanan Normal Baru di Lingkungan BPPK. Beberapa pelatihan tersebut diantaranya adalah Pelatihan Teknis Pembentukan Pawang Anjing Pelacak Narkotika, Pelatihan Teknis Instruktur Anjing Pelacak, dan Pelatihan Teknis Pengawakan *Speedboat* Patroli Bea dan Cukai.

## IS RBTK KEMENKEU

Sebagai upaya dalam mendukung IS RBTK Kementerian Keuangan, BPPK telah melaksanakan modern *e-learning*

sebagai alat utama dalam pengembangan SDM Kementerian Keuangan.

Implementasi full *e-learning*, Digitalisasi materi pembelajaran, Integrasi LKMS Kemenkeu, dan *Change Management* Implementasi dan Budaya *e-learning* merupakan upaya-upaya yang dilakukan dalam mendukung IS RBTK tersebut.

Selain itu, BPPK juga mendukung pelaksanaan *Data Analytics* di Lingkungan Kementerian Keuangan melalui *Data analytics to improve learning process* dan *Data Analytics Pengembangan Kompetensi SDM Melalui Pembelajaran*.

## TIGA ARAH KEBIJAKAN PEMBELAJARAN

Pada Tahun 2021 BPPK juga memperkenalkan tiga arah kebijakan pembelajaran di BPPK yakni Pembelajaran Joint Program, Pembelajaran Terintegrasi dan Kolaborasi, serta Levelling Pembelajaran. Pendekatan ini ditujukan untuk memastikan bahwa kegiatan pembelajaran mampu mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan, serta memenuhi kebutuhan pengembangan SDM dalam pencapaian lima program Kementerian Keuangan.

## LEARNING ORGANIZATION

Sebagai unit pengelola pengembangan Kompetensi SDM di Kementerian Keuangan, BPPK tahun ini juga mencanangkan Kementerian Keuangan sebagai *Learning Organization*, dengan BPPK sebagai motor penggeraknya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam berbagai kesempatan selalu mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan diharapkan menjadi institusi yang selalu belajar. Hal itu dipertegas dengan lahirnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 /PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yang mengulas perwujudan keterkaitan dan kesesuaian antara pendidikan, pembelajaran, dan penerapan nilai-nilai

dengan target kinerja sebagai dasar pencanangan *learning organization* di Kementerian Keuangan.

Menindaklanjuti hal tersebut, BPPK telah berhasil menyusun pedoman teknis pelaksanaan *Learning Organization* yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 283 Tahun 2021 tentang Implementasi Organisasi Pembelajaran (*Learning Organization*) di Lingkungan Kementerian Keuangan. Keputusan ini nantinya akan diimplementasikan oleh seluruh unit eselon 1 di Kementerian Keuangan dan setiap tahun diukur dengan parameter yang telah ditetapkan. Hal tersebut memperkuat posisi dan peran BPPK sebagai leader dalam pengembangan kompetensi SDM Kementerian Keuangan.

## KOORDINATOR HORI-75

Di tahun 2021 ini BPPK berperan aktif dalam mendukung berbagai kegiatan dan kebijakan Kementerian Keuangan. BPPK dipercaya sebagai koordinator seluruh rangkaian peringatan hari oelang atau HORI ke 75 dengan berbagai inovasi bentuk kegiatan yang menyesuaikan dengan kondisi pandemi, seperti webinar, kegiatan seni budaya, bakti sosial, dan olahraga.

Tahun ini merupakan peringatan ke-75 sejak Oelang Republik Indonesia diterbitkan pertama kalinya pada tahun 1946 lalu. Mengambil tema “Pulihkan Ekonomi, Wujudkan Kemenkeu Satu yang Terpercaya, Menuju Indonesia Unggul dan Tangguh”, peringatan HORI ke-75 mengingatkan kita bahwa situasi serba sulit saat ini memerlukan kepedulian dan kerjasama dari berbagai pihak.

Pada kesempatan kali ini, rangkaian kegiatan peringatan hari oelang atau HORI ke 75 resmi dimulai dengan kick off HORI yang dilangsungkan di kompleks sekretariat BPPK, Jalan Purnawarman No 99 Kebayoran Baru, Jakarta dan diselenggarakan secara *hybrid*.



*Menteri Keuangan dan Kepala BPPK dalam forum LCM 2021*

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, didampingi oleh seluruh jajaran pejabat eselon satu.

#### **DUKUNG PROGRAM PEN**

Di masa pandemi Covid-19, BPPK juga turut aktif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi masyarakat seputar kebijakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. BPPK meluncurkan program webinar interaktif dengan tajuk Kemenkeu Corpu Talk.

Kemenkeu Corpu Talk adalah program yang mengusung format webinar interaktif dan menghadirkan narasumber prominen. Kemenkeu Corpu Talk berhasil menarik perhatian ribuan audiens dari berbagai kalangan yang ingin mengetahui seputar kebijakan Program PEN via media Zoom dan kanal Youtube BPPK Kemenkeu RI. Hingga menjelang akhir 2021, Kemenkeu Corpu Talk telah diselenggarakan sebanyak 41 episode, dan menjadi salah satu platform rujukan bagi sosialisasi kebijakan PEN di Kementerian Keuangan.

#### **VAKSINASI & DUKUNG PENANGANAN COVID-19**

Dalam upaya penanganan pandemi Covid-19 di kementerian keuangan, BPPK juga berkontribusi dalam upaya vaksinasi bagi para pegawai di lingkungan BPPK beserta keluarganya, serta menyediakan gedung-gedung asramanya sebagai tempat isolasi mandiri pegawai lintas unit eselon satu kementerian keuangan yang terpapar virus Covid-19, diantaranya adalah asrama pusdiklat Bea dan Cukai dan asrama PHRD Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial, serta gedung-gedung asrama di Balai Diklat Keuangan.

#### **AGENDA SETTING KEMENKEU**

BPPK juga terlibat dalam mengamplifikasi agenda setting Kementerian Keuangan melalui dukungan publikasi sesuai dengan pesan kunci agenda setting yang telah disusun melalui strategi komunikasi Kemenkeu.

Seluruh pengelola kanal media sosial unit-unit di BPPK, baik pusat maupun di daerah, turut berperan aktif, dan secara

rutin membuat konten publikasi terkait agenda setting kementerian keuangan. Tercatat hingga awal Desember 2021, telah diproduksi ratusan konten video publikasi yang disebarluaskan melalui berbagai platform media sosial.

#### **DUKUNGAN IT & SDM**

Di tahun 2021 ini peran dan kontribusi BPPK dalam setiap kegiatan Kementerian keuangan semakin terasa. Mengusung semangat sinergi dan kolaborasi, BPPK selalu memberikan dukungan infrastruktur teknologi informasi dan SDM yang berkompeten, diantaranya terlibat dalam kegiatan penyiaran event virtual baik level pusat maupun di daerah seperti Ministry of Finance Festival atau Mofest, Berbagai kegiatan webinar, kegiatan konferensi pers, hingga dukungan SDM untuk kegiatan berskala internasional seperti Presidensi G20 Indonesia yang akan dihelat mulai desember 2021 hingga sepanjang 2022 kedepan.

ABDUL AZIZ MAGHFUR

# Komitmen Pengembangan SDM & BPPK sebagai *Leading Learning Organization*

BPPK sebagai unit eselon 1 di Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab terhadap pengembangan kompetensi sumber daya manusia di Kementerian Keuangan, sepanjang tahun 2021 selalu berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi SDM. Sebagai wujud komitmen dan keseriusan, BPPK rutin menyelenggarakan *Learning Council Meeting* atau LCM setiap tahunnya.

**LCM** adalah forum tertinggi di bidang pembelajaran Kementerian Keuangan Corporate University dan pembinaan SDM di Kemenkeu. Dalam Pertemuan ini membahas tiga agenda, yakni laporan tindak lanjut LCM 2020, presentasi arah kebijakan pengelolaan dan pembinaan SDM oleh Sekretaris Jenderal Kemenkeu, dan diskusi dan arahan Menteri Keuangan.

LCM tahun 2021 ini membahas tentang laporan capaian dan isu implementasi kegiatan pengembangan kompetensi, SDM, serta manajemen pengetahuan (*knowledge management*). Pertemuan ini dilakukan secara daring dan dihadiri Menteri Keuangan, Staf Ahli Menteri Keuangan, pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, serta sejumlah pejabat di lingkungan BPPK.

## ANALISIS KEBUTUHAN PEMBELAJARAN

Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) Tahun 2021 dimulai dengan kegiatan *Learning Council Meeting* pada 14 April 2021 sebagai forum tertinggi pengelolaan Kemenkeu Corp untuk menetapkan arah pengembangan dan pengelolaan SDM melalui pembelajaran dan kebijakan prioritas manajemen pengetahuan serta kebijakan strategis pengelolaan PKN

STAN, dilanjutkan dengan Harmonisasi Internal Hasil AKP pada 15 September.

Selanjutnya, pada 28-29 September 2021 dilakukan *Learning Engagement Forum* (LEF) yang merupakan kegiatan koordinatif level Eselon III yang dihadiri perwakilan dari Biro SDM, perwakilan pengelola SDM seluruh Unit Eselon I dan LNSW, dan perwakilan dari Pusdiklat serta PKN STAN.

Tahap terakhir adalah Harmonisasi Eksternal hasil AKP yang diselenggarakan pada 23 November 2021 yang dipimpin oleh Kepala Badan dan dihadiri oleh Kepala Biro SDM, Kepala Biro Umum, Seluruh Sekretaris Unit Eselon I, Seluruh Kepala Pusdiklat dan Bagian Pengembangan SDM di Unit Eselon I serta LNSW. Dalam kegiatan ini, dilakukan koordinasi dan konsolidasi data hasil AKP dengan pihak-pihak eksternal BPPK (unit Pengguna).

Dari Data AKP 2022, direncanakan akan dilaksanakan 638 program pembelajaran, 1.317 kelas, dan 76.826 peserta dengan rencana jamlator sebesar 5.189.970 jamlator.

Pada tahun 2022, pelaksanaan pembelajaran masih didominasi pembelajaran digital berupa PJJ dan *e-learning* dengan rata-rata persentase

di atas 90% pada masing-masing UE I/ LNSW. BPPK masih menyelenggarakan sebagian kegiatan pembelajaran klasikal. Kegiatan ini khususnya ditujukan untuk pembentukan karakter pegawai baru maupun kegiatan pembelajaran yang bersifat teknis dan tidak dapat dilakukan digitalisasi.

## DIGITAL LEARNING

BPPK telah mengonversi sebagian besar pelatihan tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh atau PJJ, dan *e-learning*, dengan mengedepankan pemanfaatan teknologi informasi. Pembelajaran Jarak Jauh ini diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Kepala BPPK Nomor PER-6/PP/2021 tentang Pedoman Pelatihan Jarak Jauh di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Sampai dengan Desember 2021, telah tercatat lebih dari 750 pembelajaran digital ( yang terdiri dari *e-learning* dan pelatihan jarak jauh) yang diselenggarakan oleh seluruh pusdiklat dan balai diklat. Sampai dengan Triwulan III 2021 pula, program *e-learning* maupun *microlearning* diikuti oleh sebanyak 195.473 peserta dan dapat diakses pada portal Kemenkeu *Learning Center*. Disamping itu, juga terdapat 263 open access course, yang

dapat diikuti secara terbuka oleh seluruh pegawai kementerian keuangan.

Selain itu, BPPK juga telah melaksanakan pelatihan tatap muka klasikal dengan tetap berpedoman pada penerapan protokol kesehatan ketat sesuai SE-4/PP/2021 tentang Pedoman Pembelajaran Klasikal Dalam Tatanan Tatanan Normal Baru di Lingkungan BPPK. Beberapa pelatihan tersebut diantaranya adalah Pelatihan Teknis Pembentukan Pawang Anjing Pelacak Narkotika, Pelatihan Teknis Instruktur Anjing Pelacak, dan Pelatihan Teknis Pengawakan Speedboat Patroli Bea dan Cukai.

#### LEARNING ORGANIZATION

Kementerian Keuangan adalah institusi pemerintah yang memiliki posisi strategis dalam pengelolaan kebijakan fiskal dan sebagai pengelola keuangan negara. Sejalan dengan posisi tersebut, Kementerian Keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam upaya memulihkan dan menjaga stabilitas ekonomi nasional yang diakibatkan disrupsi dan juga pandemi. Kementerian Keuangan dituntut untuk menjadi organisasi yang agile dan adaptif terhadap perubahan-perubahan. Untuk merespon tuntutan tersebut, Kementerian Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024. Dalam PMK tersebut, Kementerian Keuangan merumuskan visi untuk tahun 2020-2024 yaitu “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan”.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, terdapat satu misi penting yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, yaitu mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi. Misi tersebut ditetapkan dengan kesadaran akan pentingnya pengelolaan modal manusia di dalam mencapai visi

Kementerian Keuangan tersebut. Untuk menghasilkan SDM yang adaptif sesuai dengan kemajuan teknologi, strategi yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan adalah dengan membangun budaya belajar dan *knowledge management* (KM) melalui implementasi *learning organization* (LO). Implementasi LO ini sekaligus untuk mendukung pencapaian cita-cita nilai Kementerian Keuangan yang ke-5 yaitu “kesempurnaan” yang bermakna senantiasa melakukan upaya perbaikan yang berkelanjutan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik. Terkait dengan hal ini diyakini bahwa tidak ada upaya perbaikan berkelanjutan yang akan berhasil dilakukan tanpa adanya komitmen belajar.

Implementasi *Learning organization* di lingkungan Kementerian Keuangan merupakan tanggung jawab bersama dari seluruh individu, tim dan unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai pembelajar. Agar dapat diperoleh pemahaman yang sama di dalam implementasinya, pada tahun 2020 Kementerian Keuangan melalui BPPK menerbitkan Buku Saku Implementasi *Learning organization* yang berisi penjelasan indikator pengukuran. Pada tahun 2021 ini, panduan tersebut disempurnakan dengan penyusunan Pedoman Implementasi *Learning organization* yang berisi panduan penerapan *learning organization* yang disusun secara rinci lengkap dengan strategi implementasi dan rencana pengukurannya. Pedoman dan diharapkan dapat menjadi panduan bagi seluruh individu, tim dan unit organisasi dalam upaya membangun budaya belajar dan mewujudkan *learning organization* di lingkungan Kementerian Keuangan.

Implementasi *learning organization* di Kementerian Keuangan mengacu pada sebuah pendekatan sistem yang terdiri dari 10 komponen penggerak yang ada dalam *Enterprise Learning System* yang telah dimodifikasi, menyesuaikan dengan karakteristik operasional Kementerian Keuangan. Kesepuluh komponen tersebut meliputi *strategic fit and management*

*commitment, learning function organization, learning spaces, learning solutions, leader participation in learning process, learners, knowledge sharing culture, learning value chain, learners’ performance, dan feedback.*

#### PROSES 10 KOMPONEN LO

Dinamika proses 10 komponen *learning organization* diawali dengan aktivasi komponen *strategic fit and management commitment*. Komponen ini merujuk pada strategi dan komitmen pimpinan terhadap upaya membangun budaya belajar sebagai elemen penting terwujudnya *learning organization*. Pucuk pimpinan Kementerian Keuangan diharapkan dapat menjadi inisiator budaya belajar dengan cara merumuskan kebijakan terkait visi, budaya, strategi, dan struktur yang mendukung proses belajar di Kemenkeu.

Komponen kedua adalah *learning function organization* yang memastikan bahwa organisasi menjalankan fungsinya dengan baik dalam kaitannya dengan aktivitas belajar di dalam organisasi. Komponen ini merupakan tindak lanjut dari komponen *strategic fit and management commitment* dimana setiap strategi dan komitmen pimpinan ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh organisasi, baik itu terkait pelaksanaan visi, implementasi strategi, pembangunan budaya belajar, dan penguatan struktur pendukung pembelajaran.

Dengan dukungan organisasi yang memadai, seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan harus membangun sikap mental, motivasi dan kebiasaan belajar baru sebagai *learners* atau pemelajar, baik di tingkat individu, tim maupun organisasi. Kebiasaan belajar baru tersebut dibangun oleh pemelajar dengan secara aktif melakukan pembelajaran, baik yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur, untuk meningkatkan kinerja.

*Knowledge management implementation* memfasilitasi pembelajaran, mendorong penciptaan pengetahuan (*knowledge creation*), mendukung penyebaran



Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memimpin kegiatan Learning Council Meetings 2022



Peserta Kegiatan LCM dari seluruh unit eselon I di Kementerian Keuangan

pengetahuan, dan memperkuat retensi aset intelektual. Proses *knowledge management* terdiri dari identifikasi, dokumentasi, pengorganisasian, penyebaran, penerapan dan pemantauan pengetahuan. Dalam penerapannya, *knowledge management* didukung dengan pengembangan *Knowledge Management System* (KMS) yang menjadi repository aset intelektual di lingkungan Kementerian Keuangan yang kita kenal sebagai Kemenkeu *Learning Center* (KLC).

Berbeda dengan komponen *knowledge management implementation* yang berfokus pada penciptaan dan diseminasi pengetahuan, komponen *learning value chain* berfokus pada proses pengelolaan pembelajaran. Komponen ini mencakup proses analisis, desain, implementasi, dan evaluasi yang dilakukan organisasi untuk melaksanakan pembelajaran yang aplikatif, relevan, mudah diakses, dan berdampak tinggi sesuai kebutuhan organisasi.

Diantara rangkaian proses di *learning value chain*, organisasi perlu menentukan model pembelajaran seperti apa yang paling tepat untuk mencapai target yang sudah disepakati. Model pembelajaran dapat berupa belajar sendiri, belajar terstruktur, belajar dari orang lain, dan/atau belajar sambil bekerja. Penentuan

model pembelajaran ini diatur dalam komponen *learning solution*. Dengan model pembelajaran yang tepat, tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan lebih efektif dan efisien.

Setelah menentukan model yang tepat untuk setiap desain pembelajaran, organisasi perlu memfasilitasi pembelajaran itu melalui komponen *learning spaces* yang meliputi penyediaan ruangan, peralatan, jaringan internet dan intranet, akses sumber belajar, kesempatan belajar, dan dukungan teknis. Kombinasi antara *learning value chain*, model pembelajaran, dan penyediaan fasilitas sangat penting dalam menunjang proses pembelajaran yang dilakukan *learners*.

Setelah tahap pembelajaran selesai, maka *learners* perlu mengimplementasikan hasil pembelajarannya agar bermanfaat bagi diri sendiri, tim kerjanya, maupun organisasi. Hal ini sejalan dengan prinsip *learning organization* yang tidak sebatas pada perolehan dan penyimpanan pengetahuan, namun juga mengimplementasikan dan pemanfaatan pengetahuan. Hasilnya digunakan untuk perbaikan berkelanjutan, peningkatan kinerja, dan bahkan penciptaan inovasi. Implementasi dan pemanfaatan hasil belajar ini adalah fokus dari komponen *Learners Performance*. Tujuan akhirnya

adalah untuk memastikan budaya belajar dan proses pengelolaan pengetahuan berjalan dengan optimal, agar organisasi mampu beradaptasi terhadap perubahan sehingga menjadi organisasi yang lebih baik.

Dalam keseluruhan rangkaian proses pembelajaran, dukungan pimpinan sangat penting untuk menjaga keterkaitan antara kegiatan belajar dengan tujuan strategis Kemenkeu. Tidak hanya itu, peran pimpinan yang dijabarkan di dalam komponen *leader participation in learning process* juga mencakup peran pimpinan sebagai teladan; pengajar; *coach*, mentor, dan/atau *counselor*; dan pemimpin yang berpikiran maju.

Terakhir, setelah semua komponen telah diimplementasikan, organisasi perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh untuk mendapatkan gambaran yang jelas atas kualitas implementasi *learning organization* dalam suatu periode. Evaluasi ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis umpan balik atau *feedback* dari semua unsur yang berpartisipasi dalam proses belajar, baik dari internal maupun eksternal organisasi. Hasil evaluasi ini menjadi informasi berharga yang dapat dipergunakan sebagai tolak ukur untuk memastikan penerapan *learning organization* yang lebih terarah, sistematis, dan berkelanjutan.



ABDUL AZIZ MAGHFUR

# Festival “Belajar” & BPPK sebagai Koordinator HORI 75

*Platform pembelajaran KLC 2 yang dikembangkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, tidak lepas dari tujuan untuk melakukan pelatihan terhadap peserta dengan jumlah besar, dengan sistem bisa diakses dengan mudah, di mana saja dan kapan saja. Kemudahan tersebut, tidak hanya untuk pegawai Kementerian Keuangan, tetapi juga untuk pegawai di Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah, serta masyarakat umum. Sehingga, harapannya KLC 2 bisa menjadi platform pembelajaran yang massive, online dan open. Platform yang memenuhi karakteristik tersebut lazim dikenal dengan istilah massive online open course (MOOC).*

## MASSIVE ONLINE OPEN COURSE DUNIA

*Massive online open course (MOOC) atau pembelajaran secara daring dan massal awalnya diperkenalkan oleh Dave Cormier pada tahun 2008. Saat itu David Cormier dari University of Prince Edward Island mengikuti kursus *Connectivism and Connective Knowledge (CCK08)*. Kursus ini disebut MOOC pertama di dunia yang diikuti oleh George Siemens dari Universitas Athabasca dan Stephen Downes dari *National Research Council*. Kursus tersebut awalnya hanya diikuti oleh 25 mahasiswa dari Universitas Manitoba yang sebelumnya sudah membayar untuk mengikuti *course* tersebut. Kemudian kursus tersebut ditawarkan secara gratis sebagai kursus daring terbuka yang diikuti lebih dari 2300 siswa dari masyarakat. Kursus tersebut pertama kali ditawarkan pada bulan September sampai November 2008 dan silabus kursus diterjemahkan kedalam enam bahasa, antara lain Spanyol, Portugis, Italia Hungaria, Cina dan Jerman.*

Pada musim gugur tahun 2011, Universitas Stanford mulai menawarkan tiga kursus gratis secara daring. Kemudian Professor Universitas Stanford, Peter Norvig dan Sebastien Thrun menawarkan kursus *Introduction to Artificial Intelligence* yang pertama kali diikuti 160.000 peserta dari seluruh dunia dengan 20.000 peserta yang menyelesaikan kursus tersebut. Thrun kemudian mendirikan perusahaan yang dikenal dengan Udacity bulan Februari 2012 yang mengembangkan dan menawarkan kursus MOOC gratis. Pada April 2012, Professor Universitas Stanford lainnya, Andrew Ng dan Daphne Koller, mendirikan perusahaan Coursera. Coursera kemudian bekerja sama dengan universitas – universitas dalam mengembangkan dan menawarkan MOOC.

Universitas MIT mengikuti dengan mengembangkan platform MITx yang menawarkan MOOC yang kemudian berubah menjadi edX setelah bekerja sama dengan Universitas Harvard. Konsorsium edX merupakan perusahaan *non-profit* yang mengembangkan dan

menawarkan MOOC sudah bekerja sama lebih dari 60 universitas dan Lembaga terkenal di dunia. Selain itu, konsorsium menyediakan versi *open source* dari platform edX dan bisa dikembangkan oleh individu dan institusi untuk platform pembelajaran sendiri. Konsorsium ini sendiri menjadikan edX menjadi objek penelitian dengan menggunakan teknologi baru dalam menganalisis data yang diperoleh dari peserta kursus. Penelitian tersebut dianggap berhasil karena berhasil melampaui pencapaian penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh MIT.

Platform – platform lainnya juga berkembang seperti Futurelearn dari Inggris yang terbentuk dari kerjasama Universitas Terbuka dan grup SEEK di Inggris, kemudian Swayam dari India yang dibentuk tahun 2017, akan tetapi berkembang pesat dan menduduki peringkat kelima di dunia saat ini. Adapun saat ini peringkat dari setiap MOOC terkemuka di dunia tahun 2019 (kecuali Cina) dapat dilihat pada gambar.



Gambar Peringkat MOOC terkemuka di dunia tahun 2019  
 Sumber: [classcentral.com/report/mooc-stats-2019](http://classcentral.com/report/mooc-stats-2019)

Pada tahun 2020, jumlah peserta dan kursus diperkirakan akan bertambah dan meningkat pesat, hal ini disebabkan kebijakan di saat pandemi Covid-19 yang memaksa populasi dunia berdiam di rumah, dimana terjadi peningkatan drastis *traffic* dari setiap platform MOOC sejak Maret 2020. Platform MOOC yang mengalami peningkatan antara lain Coursera, peserta yang mengikuti kursus mencapai 10 juta lebih dalam kurun waktu 30 hari, peningkatan sebesar 644% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan platform edX menjadi 1.000 situs terkemuka di dunia.

Bagaimana dengan perkembangan MOOC sendiri di Indonesia?. Jika berbicara tentang MOOC, tidak lepas dari berbicara tentang *e-learning* ataupun *distance learning*. Pelopor dari *distance learning* di Indonesia tidak lain adalah Universitas Terbuka (UT). Universitas Terbuka mengembangkan MOOC sejak tahun 2014. Akan tetapi, pada tahun 2015, UT juga mengembangkan MOOC dengan menandatangani MoU dengan IndonesiaX untuk bekerja sama dalam

mengembangkan dan menawarkan MOOC di Indonesia. IndonesiaX sendiri adalah platform MOOC berbahasa Indonesia yang dikembangkan dari *open source* edX menawarkan kursus sejak 17 Agustus 2017. Saat ini IndonesiaX juga menjalin Kerjasama dengan universitas dan institusi terkemuka di Indonesia. Platform pembelajaran lainnya yang muncul terlebih dahulu tapi sebelumnya belum mengadopsi MOOC adalah Zenius. Zenius sendiri mulai beroperasi tahun 2004 dengan membuat rekaman materi pelajaran dan kemudian didistribusikan melalui CD atau media digital. Platform lain yang menarik perhatian adalah RuangGuru yang menjadi startup terkemuka di Indonesia. Platform – platform digital lainnya yang berkecimpung di MOOC antara lain CREATE Cyberschool, Dicoding, Sekolah Pintar, PDITT, dan XL E-Learning.

MOOC sendiri dipandang sebagai salah satu solusi dalam peningkatan pembelajaran di Indonesia. Wilayah Indonesia yang luas dan perkembangan infrastruktur yang belum merata

menjadi tantangan dalam pengembangan pendidikan di Indonesia. Dengan dukungan teknologi, tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur bisa dijumpai. Mudahnya akses data dengan hanya menggunakan ponsel bisa dimanfaatkan dalam upaya pembelajaran MOOC sendiri. Dimana dalam studi yang dilakukan Universitas – universitas di Asia Tenggara bekerja sama dengan Uni Eropa, salah satu kekuatan Indonesia dalam rekomendasi MOOC adalah penetrasi internet yang tinggi. Penetrasi internet untuk daerah pulau utama mencapai 40%. Hal ini jugalah yang menyebabkan pengembangan platform MOOC yang ramah dengan teknologi dan mendukung pendidikan di Indonesia.

Tidak hanya universitas di Indonesia, pemerintah juga meningkatkan pengetahuan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Khususnya dalam Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan mengadopsi konsep *Corporate University* (corpu) dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) sebagai motor utama

***Open Access sendiri terdiri dari dua bentuk yaitu E-Learning dan Microlearning. Perbedaan mendasar dari kedua e-learning tersebut dapat dilihat dari jumlah jam pelajaran, dan sertifikat bagi yang sudah menyelesaikan e-learning dan badge bagi microlearning.***

penggerak melakukan pengembangan dalam mendukung peningkatan kapasitas sumber daya utamanya. Dalam peningkatan tersebut telah dibangun platform pembelajaran digital khususnya tentang keuangan negara dengan nama Kemenkeu *Learning Center* (KLC). KLC sendiri terbagi dari pengetahuan – pengetahuan tentang Keuangan Negara dan kursus – kursus yang dikhususkan dalam peningkatan kompetensi pegawai pemerintah di bidang keuangan negara.

Kursus dan pengetahuan yang ada di KLC dapat diakses oleh khalayak umum dan bersifat *open*, dan proyeksi kedepannya, masyarakat yang ingin belajar juga bisa mengakses kursus yang ada dalam platform KLC tersebut. Saat ini, jumlah kursus yang bisa diakses oleh khalayak umum masih terbatas. Hal ini dikarenakan platform KLC saat ini masih diutamakan untuk pegawai Kementerian Keuangan dan pegawai Kementerian/Lembaga dalam melaksanakan kursus peningkatan kompetensi yang diwajibkan, misalnya sertifikasi bendahara dan akuntan publik. Kemudian, diselenggarakan juga *open access* di KLC tentang keuangan negara yang bisa diikuti oleh semua pegawai Kementerian Keuangan.

#### **OPEN ACCESS KEMENTERIAN KEUANGAN**

Proses pembelajaran di Kemenkeu Corporate University (Kemenkeu Corpu) menjalankan konsep RAIA, yaitu *Relevan, Applicable, Impactfull, dan Accessible*. Berangkat dari pembelajaran *accessible* dikembangkan moda pembelajaran digital yang mudah dan dapat diikuti oleh lebih banyak peserta, kapan saja dan dimana saja. Selain itu, pembelajaran digital BPPK juga mulai perlu mengembangkan metode *Pull Learning*, yaitu metode pembelajaran yang dipilih aktif oleh peserta, tidak

hanya metode *Push Learning* (metode penugasan melalui surat tugas). Persiapan implementasi metode *pull learning* terakselerasi di masa *pandemi* Covid-19, dimana metode ini dianggap tepat untuk menjawab kebutuhan pembelajaran pegawai Kementerian Keuangan. BPPK di masa *pandemi* tetap memberikan layanan pembelajaran di masa *working from home* (WFH) dengan metode pembelajaran *pull learning* yang direalisasikan dalam bentuk *Open Access E-Learning* di KLC yang berisi *e-learning* dan *microlearning*.

*Open Access* yang diselenggarakan oleh BPPK terbuka dan dapat diikuti oleh seluruh pegawai Kementerian Keuangan. *Open Access* merupakan bentuk pembelajaran *e-learning asynchronous* yang mengacu pada pedoman *e-learning* di Kementerian Keuangan sesuai PER-2/PP/2019 dan pedoman *microlearning* di Kementerian Keuangan di PER-8/PP/2018. Sedangkan dasar dari pemilihan *e-learning* dan *microlearning open access* antara lain:

1. Dapat diikuti oleh setiap pegawai Kementerian Keuangan kapanpun dan dimanapun;
2. Pembelajaran tidak berisi kompetensi/informasi yang sifatnya rahasia jabatan tertentu;
3. *Asynchronous* dan telah dilengkapi dengan kuis dan atau ujian untuk syarat kelulusan
4. Telah dilengkapi dengan *badge* dan atau sertifikat *digital* bagi peserta yang lulus;
5. Kompetensi yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan.

*Open Access* yang diikuti oleh pegawai Kementerian Keuangan diakui sebagai pemenuhan jamlator dari pengembangan

pegawai yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebesar 24 JP setiap tahunnya. Sehingga setiap pegawai diharapkan menjadi lebih termotivasi dikarenakan bisa memilih *e-learning* yang diminati sekaligus memenuhi IKU dari masing – masing pegawai. *E-learning* dan *microlearning* yang diikuti oleh pegawai, jika sudah selesai dan memenuhi syarat kelulusan, akan mendapatkan *badge* dalam profil pegawai di platform KLC dan sertifikat bagi *e-learning* dapat diakses di semantik BPPK yang terintegrasi dengan HRIS Kementerian Keuangan. Sehingga, sertifikat tersebut dapat diakui sebagai jam pengembangan sumber daya manusia pegawai.

*Open Access* sendiri terdiri dari dua bentuk yaitu *E-Learning* dan *Microlearning*. Perbedaan mendasar dari kedua *e-learning* tersebut dapat dilihat dari jumlah jam pelajaran, dan sertifikat bagi yang sudah menyelesaikan *e-learning* dan *badge* bagi *microlearning*. *Microlearning* sendiri dapat menjadi bagian yang terpisah/ berdiri dari program pembelajaran, akan tetapi bisa juga menjadi bagian dari satu *e-learning*. Teknis pendataan peserta dan kelulusan dari setiap peserta dilakukan oleh penyelenggara diklat setiap tanggal 20 pada bulan yang bersangkutan. *Open Access* sendiri direncanakan akan berlangsung sepanjang tahun 2020 dan tidak menutup kemungkinan untuk dilanjutkan ke tahun – tahun selanjutnya dengan penguatan Interkoneksi dengan aplikasi Dialog Kinerja Individu di Lingkungan Kementerian Keuangan dalam mendukung terpenuhinya Kemenkeu Leadership Development Program sebagaimana diatur dalam PMK 216/PMK.01/2019 tentang Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Kementerian Keuangan.

LUHUR PRIYANTOKO AJI

# Sejarah Baru Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat di Kementerian Keuangan



**T**ahun 2021 menjadi tahun tidak terlupakan bagi Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial karena berhasil menyelenggarakan Ujian Dinas (UD) Tingkat I dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) V untuk pertama kalinya secara daring dengan lokasi ujian di kantor tiap peserta ujian. Penyelenggaraan ujian secara daring ini merupakan salah satu strategi Pusdiklat

Kepemimpinan dan Manajerial agar ujian tetap terlaksana meski dalam kondisi pandemi Covid-19. Selain tetap dapat menjalankan amanah sebagai instansi yang ditunjuk untuk menyelenggarakan UD dan UPKP di Kementerian Keuangan, penyelenggaraan ujian secara daring juga mendukung upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun



FOTO : PUSDIKLAT KEPEMIMPINAN DAN MANAJERIAL

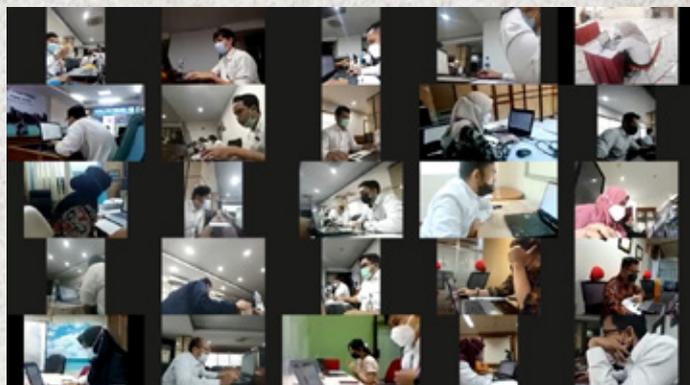
2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil menegaskan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan naik pangkat ke golongan yang lebih tinggi wajib menempuh dan lulus ujian dinas atau ujian penyesuaian kenaikan pangkat (khusus PNS yang memiliki ijazah), kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sebagai upaya untuk memfasilitasi kenaikan pangkat tersebut, Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial berdasarkan rekomendasi penyelenggaraan ujian dari Biro SDM mengadakan Ujian Dinas Tingkat I dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat V Tahun Anggaran 2021.

Dalam penyelenggaraan ujian secara daring di kantor peserta, Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial berupaya tetap menjaga standar layanan sehingga kualitas ujian tetap terjaga. Jauh sebelum penyelenggaraan ujian, Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial terlebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan penyelenggaraan ujian seperti aplikasi ujian, memastikan ketersediaan infrastruktur jaringan, dan merancang pola pengawasan terhadap peserta ujian mengingat ujian akan dilaksanakan secara jarak jauh.

Untuk aplikasi ujian, Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial mengoptimalkan aplikasi ujian KLC2 yang telah dikembangkan oleh BPPK sejak 2019. Aplikasi ujian ini disandingkan

dengan aplikasi tambahan Safe Exam Browser (SEB) sebagai fitur keamanan untuk menghindari kecurangan peserta ujian. Dengan penggunaan SEB yang sudah diatur secara khusus, peserta tidak akan dapat mengakses peramban maupun aplikasi lain selama ujian.

Untuk pola pengawasan, Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial menerapkan pengawasan berjenjang dengan melibatkan sebelas Balai Diklat Keuangan (BDK) sebagai panitia penyelenggara ujian di daerah dan kantor peserta ujian sebagai panitia lokasi yang merupakan representasi panitia penyelenggara ujian untuk mengawasi peserta ujian secara langsung. Peserta ujian diwajibkan untuk menyiapkan Zoom sebagai media pengawasan



sehingga meskipun ujian dilaksanakan secara jarak jauh, penyelenggara ujian tetap dapat memantau jalannya ujian melalui pengawasan Zoom.

Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial menyadari perubahan model ujian dari yang sebelumnya klasikal menjadi daring ini tidak dapat langsung berjalan mulus. Diperlukan penyamaan persepsi mengenai penyelenggaraan ujian, baik oleh panitia lokasi ujian di kantor peserta maupun peserta ujian itu sendiri, terutama peserta UD Tingkat I yang memiliki karakteristik usia yang beragam. Untuk mengupayakan hal tersebut, Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial menjadwalkan simulasi ujian selama dua hari agar panitia lokasi ujian di kantor peserta dan peserta ujian bisa mengetahui gambaran proses pelaksanaan ujian yang sesungguhnya.

UD Tingkat I Tahun Anggaran 2021 diselenggarakan pada tanggal 25 s.d. 29 Oktober 2021 dengan 2.851 peserta terdaftar. Jumlah ini meningkat sebesar 11% atau 281 peserta dibanding dengan penyelenggaraan sebelumnya. Peserta UD Tingkat I harus menaklukkan sepuluh mata ujian yang terdiri dari Pancasila, Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah 2020-2024, Peraturan Kepegawaian, Pengelolaan Keuangan Negara, Bahasa Indonesia, UUD 1945, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Perkantoran, dan Sejarah Indonesia.

Sebulan setelah penyelenggaraan UD Tingkat I, UPKP V Tahun Anggaran 2021 diselenggarakan, tepatnya pada 22 s.d. 23 November 2021 dan diikuti oleh 1.488 peserta. Dibanding penyelenggaraan sebelumnya, jumlah ini meningkat sebesar 17% atau 212 peserta. Terdapat tiga tes pada UPKP V, yaitu Tes Potensi, Tes Substansi Kementerian Keuangan dan Wawasan Kebangsaan, dan Psikotes. Peningkatan jumlah peserta, baik pada UD Tingkat I maupun UPKP V, menunjukkan antusiasme pegawai Kementerian Keuangan dalam hal penyeteraan pangkat/golongan.

Dengan kolaborasi dan sinergi yang baik antara Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial, Balai Diklat Keuangan, dan kantor peserta ujian, penyelenggaraan UD Tingkat I dan UPKP V secara daring dapat berjalan dengan baik dan relatif lancar.

Penyelenggaraan ujian secara daring ini tentu memiliki beberapa kelebihan serta

tidak luput dari beberapa kekurangan. Kelebihan ujian secara daring antara lain para peserta tidak perlu mengalokasikan waktu untuk datang ke lokasi ujian, menghemat biaya akomodasi dan transportasi baik dari sisi peserta maupun penyelenggara ujian, serta mempercepat proses kalkulasi nilai. Beberapa kekurangan sehubungan dengan ujian secara daring antara lain memerlukan perangkat laptop yang harus memenuhi spesifikasi tertentu dan membutuhkan jaringan internet dan listrik yang stabil.

Tidak dapat dimungkiri, pandemi Covid-19 memaksa setiap instansi untuk melakukan penyesuaian normal baru, termasuk Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial dalam mewujudkan normal baru untuk penyelenggaraan ujian. Ke depannya, Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan ujian secara daring demi meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi kualitas penyelenggaraan ujian.

# *Serambi Ilmu*

---

*Agustinus Imam Saputra*

*SINGLE IDENTITY  
NUMBER (SIN) UNTUK  
KEPENTINGAN  
PERPAJAKAN; ANTARA  
WACANA DAN REALITA*

*Muhkamat Anwar*

*RECOVER TOGETHER,  
RECOVER STRONGER  
PRESIDENSI G20  
INDONESIA DENGAN  
FOKUS AGENDA FINANCE  
TRACK*

*Frenda Nic Qomar Ernanto*

*MENDESAIN KEBIJAKAN  
CARBON TAX DALAM  
KERANGKA APBN*

*Anies Said Basalamah*

*PERLUNYA WIDYAIKWARA  
MENYIASATI PERMENPAN  
42/2021*

# ***SINGLE IDENTITY NUMBER (SIN) UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN; ANTARA WACANA DAN REALITA***

Baru-baru ini bahasan mengenai *Single Identity Number* (SIN) menjadi hangat kembali setelah Presiden kelima Indonesia, Megawati Sukarno Putri, yang sekarang menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyebut bahwa penerapan SIN pajak dinilai memiliki dampak yang luas bagi penerimaan negara hingga pada pencegahan tindak pidana korupsi. Beliau menekankan manfaat penerapan SIN ialah pengoptimalan penerimaan negara bagi pembangunan (CNN Indonesia;09/05/2021). Lebih lanjut, kebijakan merealisasikan SIN sebagai sarana pencegahan korupsi dan pemberantasan korupsi karena semua dilakukan secara transparan. SIN diperlukan untuk mengintegrasikan data yang banyak tersebar diberbagai pihak, baik sektor publik dan privat. Pada tahun 2005 terdapat data 29 dokumen identitas yang dikeluarkan oleh 24 instansi yang berbeda di Indonesia (Suharno, 2005), yang mungkin semakin bertambah di tahun 2021 ini. Dokumen tersebut antara lain akte kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah; Surat Izin Mengemudi (SIM), Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Indonesia; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP); paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi; serta dokumen-dokumen

nomor pelanggan yang dikeluarkan BUMN dan BUMD seperti TELKOM, PLN, PDAM, dan masih banyak lagi. Tidak terintegrasinya data di berbagai sektor menjadi kendala bagi pemerintah untuk melakukan analisis ekonomi dan pembangunan.

SIN dirasakan penting karena dapat digunakan untuk sumber *data matching* fenomena ekonomi makro di Indonesia. Kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) seringkali tidak sejalan secara proporsional dengan kenaikan penerimaan pajak. Data menunjukkan bahwa kenaikan persentase penerimaan pajak lebih kecil dari persentase kenaikan PDB. Data tabel perbandingan persentase kenaikan PDB dan *tax ratio* di Indonesia dapat tergambar di Tabel 1.

Selain tingkat *tax ratio* yang rendah dikisaran 10-11%, Indonesia juga menghadapi peningkatan pembayaran pajak yang tidak sesuai dengan gambaran ekonomi yang terjadi di suatu tahun dasar pengukuran. Sebagai contoh, pada tahun 2019 terjadi kenaikan PDB sebesar 6,72 persen namun tingkat *tax ratio* (berdasar pajak pusat) mengalami pertumbuhan minus 4,61 persen.

SIN sudah mulai dikenalkan sejak tahun 2004 yang kemudian semakin digelorkan di tahun 2004 dengan terbitnya keputusan presiden nomor 72 tahun 2004. Namun, hingga kini eksistensi data tunggal kependudukan masih antara ada dan

tiada. Mari, kita telisik bersama sejarah yang melatarbelakangi teretusnya nomor identitas tunggal di Indonesia. Kemudian, melihat urgensi mewujudkan SIN demi kepentingan penerimaan negara dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

## **REGULASI YANG MELATARBELAKANGI SIN**

Keterbukaan informasi untuk perpajakan sudah diinisiasi sejak tahun 1965 dengan terbitnya Perpu No 02. tentang kebijakan penerimaan negara. Pemerintah era Orde Lama sudah mulai memikirkan bagaimana otoritas pajak Indonesia memiliki data sebagai alat untuk menghimpun penerimaan negara yang optimal. Tanpa adanya transparansi data dari semua pihak, sulit bagi pemerintah menghimpun data yang kredibel untuk mewujudkan *database* sebagai landasan nomor identitas tunggal.

Indonesia dapat mengambil pelajaran dari keberhasilan negara Amerika Serikat (AS) dalam membentuk Data Identitas tunggal berupa Social Security Number (SSN). Nomor Jaminan Sosial tersebut dibuat pada tahun 1936 dengan tujuan semata-mata untuk melacak riwayat pendapatan pekerja AS, untuk digunakan dalam menentukan hak manfaat jaminan sosial dan menghitung tingkat manfaat pensiun. Sejak itu, penggunaan SSN telah berkembang secara substansial dari masa ke masa.

Tabel 1. PDB dan Tax Ratio Tahun 2017-2019

URAIAN	2019		2018		2017	
	NOMINAL	GROWTH (%)	NOMINAL	GROWTH (%)	NOMINAL	GROWTH (%)
PDB atas Dasar Harga Berlaku (triliun Rp.)	15.833,94	6,72%	14.837,40	9,19%	13.588,80	9,53%
Pajak Pusat (triliun Rp.)	1.546,14	1,80%	1.518,79	13,04%	1.343,53	4,56%
Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA)	154,90	-14,23%	180,59	62,50%	111,13	71,23%
- Minyak dan Gas Bumi	121,09	-15,20%	142,79	74,47%	81,84	85,62%
- Pertambangan Mineral dan Batubara	26,34	-13,10%	30,31	27,57%	23,76	50,76%
Tax Ratio						
Pajak Pusat (DJP dan DJBC)	9,76%	-4,61%	10,24%	3,53%	9,89%	-4,54%
Pajak Pusat dan Penerimaan SDA	10,74%	-6,20%	11,45%	6,99%	10,70%	-1,61%

Sumber: Laporan Tahunan DJP Tahun 2019

#### Timeline Nomor Jaminan Sosial untuk kepentingan Penerimaan Negara

1936	SSN diinisiasi dengan fokus jaminan sosial
1962	Internal Revenue Service (IRS) mulai menggunakan SSN untuk pelaporan pajak federal.
1970	Undang-undang mengharuskan bank, asosiasi simpan pinjam, serikat kredit, dan pedagang efek untuk mendapatkan SSN dari semua pelanggan.
1984	Undang-undang memberi wewenang kepada negara bagian untuk meminta SSN bagi penerima manfaat program tertentu yang dikelola negara, mewajibkan orang yang terlibat dalam perdagangan atau bisnis untuk mengajukan laporan termasuk SSN ke IRS untuk transaksi tunai lebih dari \$10.000, dan mengharuskan pembayar tunjangan untuk melengkapi IRS dengan SSN mantan pasangan yang menerima pembayaran.

Saat ini SSN mungkin merupakan sistem penomoran yang paling umum digunakan di Amerika Serikat. Pada Desember 2008, Administrasi Jaminan Sosial (SSA) telah menerbitkan lebih dari 450 juta SSN, dan hampir setiap penduduk resmi Amerika Serikat memilikinya (Puckett, 2009). Keuniversalan SSN telah menyebabkan penerapannya di seluruh sektor publik dan swasta sebagai sarana utama untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi tentang individu.

AS juga menggunakan SSN sebagai bagian dari keterbukaan informasi ke otoritas perpajakan. Sehingga, IRS dapat dengan jelas meng-*capture* profil individu dan kondisi keuangan yang dimilikinya.

Indonesia juga memiliki sejarah panjang dalam rangka mencoba membentuk data identitas tunggal yang kita kenal sebagai SIN. Dalam kenyataannya, negara kita belum sukses dalam mewujudkan nomor identitas tunggal tersebut. Namun,

berikut beberapa aturan yang menjadi trigger dalam membangun semangat keterbukaan informasi terutama berkaitan dengan nomor identitas tunggal untuk kepentingan perpajakan (penerimaan negara).

Keterbukaan informasi untuk kepentingan penerimaan negara (pajak) sudah mulai diinisiasi sejak tahun 1965 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 2 tahun 1965. Perpu tersebut mengamankan pihak perbankan untuk memberikan data dan informasi kepada Menteri Iuran Negara. Pada tahun 2001, pemerintah mulai merencanakan pengembangan sistem informasi yang terintegrasi di sektor perpajakan melalui UU No 9 tahun 2001. Pada akhirnya, Keppres 72 tahun 2004 secara jelas memberi mandat direktur jenderal pajak untuk membentuk bank data nasional yang berujung pada terwujudnya nomor identitas tunggal.

#### REGULASI SAAT INI YANG Mendukung Realisasi SIN

Pembentukan SIN perlu didukung dengan regulasi yang kuat karena membutuhkan

Tabel 2. Regulasi Peletak Pondasi Keterbukaan Informasi dan SIN

NO	REGULASI	TENTANG	URAIAN
1	PERPU No. 002 Tahun 1965	Kebijakan Penerimaan Negara Tahun 1966	Bank-bank memberikan data kepada Menteri Iuran Negara
2	UU No 19 Tahun 2001	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002	penyisiran ( <i>canvassing</i> ) dan pengembangan sistem informasi dan monitoring  perpajakan yang terintegrasi
3	Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002	Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Departemen/lembaga, pemerintah daerah, kantor/ satuan kerja, proyek/bagian proyek dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menyampaikan bahan-bahan keterangan untuk keperluan perpajakan kepada Menteri Keuangan untuk perhatian Direktur Jenderal Pajak
4	Keputusan Presiden No 72 Tahun 2004	perubahan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Pajak menindaklanjutinya dengan mengadministrasikan data  dan informasi dalam sistem Bank Data Nasional dengan membentuk Nomor Identitas Bersama sebagai embrio Nomor Identitas Tunggal
5	SE Dirjen Pajak SE-56/PJ.06/2004	Implementasi Bank Data Nasional dan Single Identification Number	Peraturan Pelaksanaan dalam pembentukan SIN oleh DJP

Sumber: diolah, Peraturan dan Perundang-undangan

sinergi berbagai pihak dan daya paksa untuk pemenuhan kewajiban setiap pihak tersebut. Peraturan yang ada (*existing*) dalam mendukung realisasi SIN dapat dilihat pada tabel berikut.

Undang-undang KUP memberikan wewenang DJP untuk menghimpun data perpajakan. Lebih lanjut, PP 31 tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan menjabarkan data apa saja yang dapat dihimpun oleh DJP. Instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain wajib memberikan Data dan Informasi yang berkaitan dengan perpajakan. Data tersebut ialah (a) Data dan Informasi yang berkaitan dengan kekayaan atau harta yang dimiliki orang pribadi atau badan; (b) Data dan Informasi yang berkaitan dengan utang yang dimiliki orang pribadi atau badan; (c) Data dan Informasi yang berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh atau diterima orang pribadi atau badan; (d) Data dan Informasi yang berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan

dan/atau yang menjadi beban orang pribadi atau badan; (e) Data dan Informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan; dan (f) Data dan Informasi yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi orang pribadi atau badan.

Pada tahun 2017, Pemerintah menerbitkan UU Nomor 9 sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan akses bagi otoritas perpajakan Indonesia untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan yang diatur dalam undang-undang di bidang perpajakan, perbankan, perbankan syariah, dan pasar modal, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Regulasi dalam UU tersebut dapat mengakibatkan kendala bagi otoritas perpajakan dalam penguatan basis data perpajakan untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak.

Sejarah panjang tentang pembentukan SIN secara nyata disebutkan secara implisit dalam Keppres 72 tahun 2004. DJP memiliki wewenang sejak saat itu yang kemudian dikuatkan dengan PP 31 tahun 2012 dan UU No 9 tahun 2009. Lini

masa dapat terlihat di tabel berikut.

Secara umum, Keppres 72 tahun 2004 sudah tidak berlaku lagi, karena telah dicabut berdasarkan PP No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Namun, Keppres tersebut telah meletakkan dasar akan pentingnya pembentukan data yang terintegrasi oleh DJP. Data-data yang dihimpun dari berbagai pihak. Selanjutnya, PP 31 tahun 2012 memberikan perluasan data yang dapat dihimpun oleh DJP, bukan hanya dari instansi pemerintah dan BUMN/BUMD, namun juga dari pihak lain seperti asosiasi dan lembaga non pemerintah. Pada akhirnya, pemerintah di 2017 menegaskan pemberian wewenang kepada DJP untuk menghimpun data keuangan dan mewajibkan lembaga jasa keuangan untuk memberikan data yang diminta oleh otoritas perpajakan. Selama ini upaya DJP dalam membuka data keuangan untuk kepentingan perpajakan sering terkendala peraturan kerahasiaan perbankan dan lembaga keuangan seperti

Tabel 3. Regulasi Kewenangan DJP Menghimpun Data dan Informasi Saat Ini

NO	REGULASI	TENTANG	URAIAN
1	UU No. 16 Tahun 2009	Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	Direktur Jenderal Pajak berwenang menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan negara
2	PP 31 tahun 2012	Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan	Instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain wajib memberikan Data dan Informasi yang berkaitan dengan perpajakan
3	PMK-228/PMK.03/2017	Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan	melaksanakan simplifikasi ketentuan yang mengatur mengenai rincian jenis data dan informasi serta tata cara penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan
4	UU Nomor 9 Tahun 2017	Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan	Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan

Sumber: diolah, Peraturan dan Perundang-undangan

Tabel 4. Lini Masa Kewenangan DJP Membentuk SIN

URAIAN	KEPPRES 72 TAHUN 2004	PP 31 TAHUN 2012	UU NO 9 TAHUN 2017
Ruang Lingkup	Membentuk Bank Data Nasional dan Nomor Identitas Tunggal	Membangun data perpajakan sebagai dasar pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh masyarakat	Penguatan basis data perpajakan untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak
Instansi Penghimpun	Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan	Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan	Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan
Data yang dihimpun	Data dan informasi guna kepentingan perpajakan	Data dan informasi guna kepentingan perpajakan	Akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan
Pihak yang wajib memberikan data	departemen/lembaga, pemerintah daerah, kantor/satuan kerja, proyek/bagian proyek dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain	lembaga jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan

Sumber: diolah, Peraturan dan Perundang-undangan

diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Kendala tersebut teratasi dengan terbitnya UU No 9 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

#### **SUDAH ADA NIK, APAKAH SIN MASIH DIBUTUHKAN?**

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Setiap penduduk akan diberikan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) sebagai tanda pengenal yang dicantumkan dalam Kartu Tanda Pengenal Elektronik (E-KTP). Keberadaan NIK sangat penting dalam sistem administrasi kependudukan di Indonesia. NIK yang bersifat nasional dan tunggal akan meminimalisasi pencatatan dan penghitungan penduduk secara ganda.

Bila sudah ada NIK, lalu untuk apa SIN perlu diwujudkan kembali?

Jawabannya karena NIK hanya berupa data administrasi kependudukan sedangkan data SIN merangkum semua data termasuk transaksi keuangan, maka keberadaan SIN tetap dibutuhkan. Definisi administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pada sisi lain, data SIN untuk perpajakan lebih kompleks dan rinci. Data Perpajakan dalam SIN berisikan data subjek pajak,

yang paling sedikit memuat; (a) nama; (b) NPWP atau Nomor Identitas (paspor dsb); dan (c) alamat lengkap, disertai informasi mengenai provinsi, kota/kabupaten, kecamatan, dan kelurahan, Selain itu juga terdiri dari data objek pajak, yang paling sedikit memuat: (a) jenis data (kepemilikan atau transaksi); (b) klasifikasi data, berupa pendapatan (*income*), biaya (*cost*), harta (*asset*), kewajiban (*liability*), modal (*equity*), atau profil (*profile*); (c) nama data, contohnya uang tunai, deposito, mobil, utang bank, dan lain sebagainya; (d) uraian data (asal-usul); (e) nilai transaksi atau estimasi nilai data, jika dapat diperoleh; dan (f) sumber data (instansi).

Lebih lanjut, data yang terkandung dalam data base SIN bersifat rahasia dan aksesnya memerlukan pembatasan dan otorisasi. Data E-KTP tidak mengakomodasi data2 sensitif yg bersifat rahasia merujuk pada Pasal 34 UU KUP. Oleh sebab itu, server *database* SIN harus bersifat aman dan tidak secara umum diakses oleh semua pihak. Nomor dalam NIK dapat digunakan sebagai nomor tunggal, namun *database* untuk semua data lainnya yg bersifat confidential harus dikelola oleh unit di Kementerian Keuangan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perpajakan.

#### **SIMPULAN**

Data NIK dapat digunakan sebagai data pendukung dibentuknya SIN. Lebih lanjut, kombinasi Nomor Induk Kependudukan tersebut dapat digunakan sebagai nomor identifikasi tunggal yang berisikan data-data yang bersifat umum dan rahasia. Sehingga NIK dapat dianalogikan nomor identitas tunggal yang *database*-nya dikelola oleh otoritas perpajakan. Di masa yang akan datang, *ID account* (nomor pengenal) di setiap instansi atau pihak swasta dapat menggunakan NIK sebagai nomor pelayanan pelanggannya. Data dari setiap transaksi atau kegiatan layanan Instansi Lembaga Asosiasi dan Pihak lainnya dikirimkan secara online ke

otoritas perpajakan. Pada akhirnya, semua transaksi akan terekam dengan mudah karena menggunakan satu nomor tunggal. Keterbukaan informasi, dan penghindaran pembayaran pajak bahkan pencegahan korupsi dapat tercipta dengan adanya SIN di Indonesia. Pada akhir, *political will* pengampu kekuasaan menjadi titik kunci untuk menjawab pertanyaan tentang SIN yang berada dalam dua posisi, wacana atau realita.

#### **REFERENSI:**

Direktorat Jenderal Pajak, 2020, Laporan Tahunan DJP Tahun 2019, Jakarta

Puckett, C., 2009. The story of the social security number. *Social Security Bulletin*, 69(2), 55-74.

Suharno, 2005, "Menuju Terciptanya Single Identification Number di Indonesia", Jakarta

MUHKAMAT ANWAR  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

# RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER

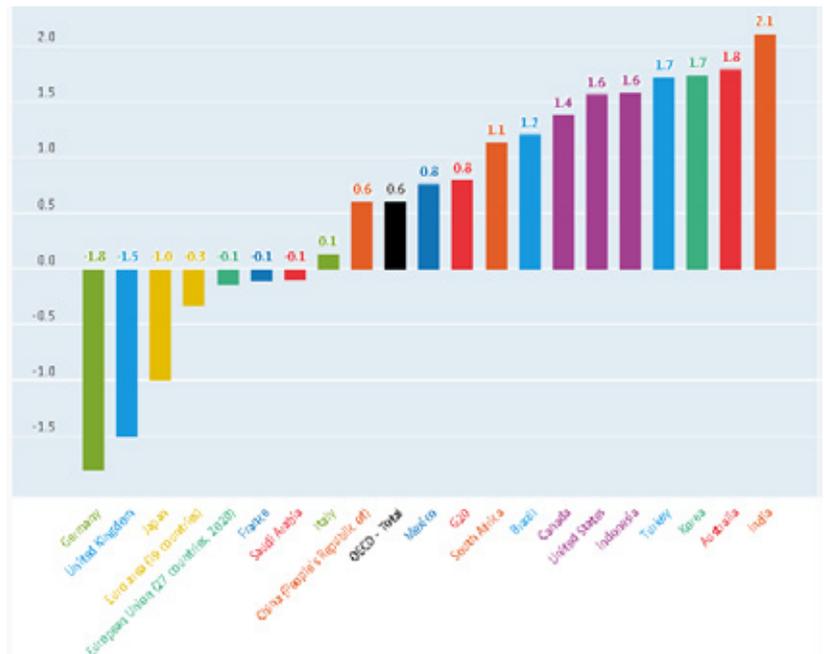
## PRESIDENSI G20 INDONESIA DENGAN FOKUS AGENDA *FINANCE TRACK*

Forum internasional yang menyatukan ekonomi utama dunia G20 2021 telah digelar di Italia dan selesai pada Oktober 2021. *People, Planet, and Prosperity* merupakan tema yang diusung Italia dalam forum G20. Indonesia melanjutkan estafet tuan rumah G20 tahun 2022 yang dimulai 1 Desember 2021 dengan mengangkat tema *Recover Together, Recover Stronger*. Tema ini menunjukkan harapan dan kesiapan Indonesia untuk turut serta dalam kemitraan global sebagai upaya mengatasi dampak pandemi serta meningkatkan kembali kepercayaan global.

Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia telah ditetapkan panitia nasional penyelenggara presidensi G20 Indonesia tahun 2022. Jalur *finance track* yang dikoordinasikan Kementerian Keuangan dan Bank Sentral akan fokus pada isu makroekonomi, fiskal, moneter, dan keuangan. Prakarsa global G20 diwujudkan dalam menangani tantangan global meliputi penanganan krisis, arsitektur keuangan internasional, perdagangan internasional, pengembangan infrastruktur, perpajakan internasional, dan penguatan *Global Partnership*.

### AGENDA *FINANCE TRACK*

Terdapat tujuh agenda *finance track* G20 Indonesia yang memiliki fokus



Gambar 1 PDB negara G20 Q1 2021

Sumber: OECD

utama terhadap penanganan isu global diantaranya G20 akan membahas tentang koordinasi pemulihan ekonomi global serta pelaksanaan kebijakan bidang fiskal dan moneter terhadap *exit policy* yaitu mengurangi intervensi kebijakan makro. *Exit policy* perlu dilakukan agar pertumbuhan ekonomi global terus berlangsung.

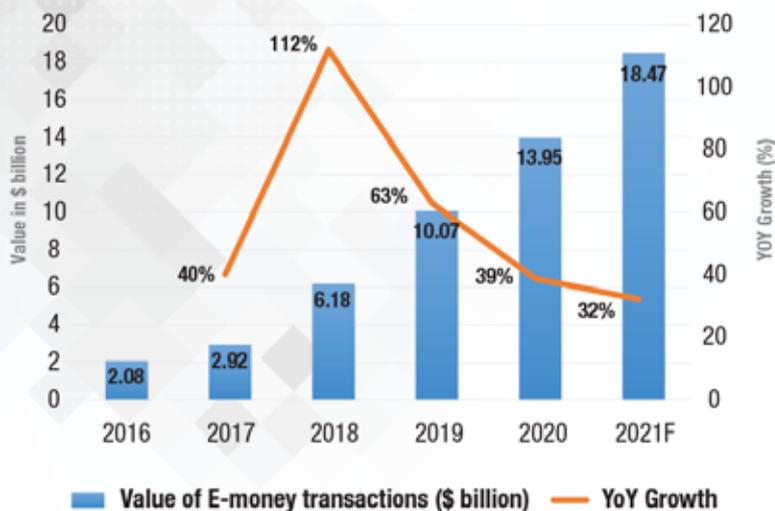
Jika dilihat dari segi Produk domestik bruto (PDB) negara-negara G20 pada

kuartal pertama 2021 kembali ke level sebelum pandemi dibandingkan dengan kuartal keempat tahun 2020. Persentase pertumbuhan ekonomi Indonesia antara Q4 2019 dan Q1 2021 pada angka -0,8% (gambar 1).<sup>1</sup>

1 OECD, "G20 GDP returns to pre-pandemic level in the first quarter of 2021, but with large differences across countries," EOCED.org, Juni, 2021, <https://www.oecd.org/economy/G20-gdp-growth-first-quarter-2021-oecd.htm>

## Indonesia has seen a significant increase in adoption of digital payments in the past five years

Figure 1. Value of Electronic Money Transactions in Indonesia (2016-2021F)



Source: Bank of Indonesia, Asian Banker Research

Gambar 2 Perkembangan Transaksi Digital Indonesia  
Sumber: The Asian Banker

transaksi digital akan berlanjut dengan e-commerce dan pembayaran elektronik masing-masing tumbuh 33,2% dan 32,3% pada 2021. Penyedia e-wallet lokal mendominasi ruang pembayaran digital Indonesia. Dengan adanya peningkatan tren pengguna e-payment, fintech, dan platform digital lainnya menandakan mata uang digital di Indonesia telah bertransformasi menuju ekonomi yang hijau.

Agenda kelima mengenai *cross-border payment*, salah satu yang terpenting dari sisi perkembangan *payment* sistem adalah dengan berkembangnya digital teknologi dan digital ekonomi. Agenda keenam membahas mengenai *financial inclusion* yang berfokus pada pengembangan kredit usaha kecil untuk UMKM dan digitalisasi dari usaha kecil menengah.

Ekonomi Internet berkembang pesat di enam negara Asia Tenggara. Indonesia diprediksi menjadi ekonomi Internet terbesar dan paling cepat berkembang di Asia Tenggara dengan proyeksi melampaui angka \$130 miliar pada tahun 2025.<sup>3</sup> Meningkatnya produk dan layanan digital misalnya e-commerce, layanan pembayaran, dan pembelajaran online dalam jangka panjang akan mempengaruhi ekonomi digital Indonesia yang diperkirakan akan meningkat terlebih pada 2025 di kawasan ASEAN.

Dalam upaya mendukung agenda kelima *finance track*, Bank Indonesia akan kerjasama dengan Bank of Thailand untuk uji coba Cross Border QR Payment Linkage yang ditargetkan untuk dipublikasikan pada kuartal I tahun 2022. Dengan diluncurkannya Cross Border QR Payment Linkage, konsumen dan merchant kedua negara akan dapat melakukan dan menerima pembayaran QR lintas batas secara instan untuk pembelian/penggunaan barang dan jasa.<sup>4</sup>

Agenda ketujuh membahas kemajuan

<sup>3</sup> Bain & Company, "e-Economy SEA 2019," 2019, [blog.google.com/documents/47/SEA\\_Internet/](https://www.google.com/documents/47/SEA_Internet/)

<sup>4</sup> Bank Indonesia, "Indonesia And Thailand Launch Cross-Border Qr Payment Linkage," Agustus, 2021, [https://www.bi.go.id/en/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp\\_170821.aspx](https://www.bi.go.id/en/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_170821.aspx)

Perekonomian G20 berfokus pada pemulihan berkelanjutan pada tahun 2021 dengan transformasi digital sebagai jantung dari pemulihan ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian PwC bahwa perkembangan ekonomi global bergantung pada keberhasilan vaksin COVID-19 yang efektif serta kondisi fiskal dan moneter yang akomodatif. Dalam menciptakan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara pasca COVID-19, keputusan yang tepat dalam pembuatan kebijakan fiskal dalam mengurangi kerusakan ekonomi dan kondisi keuangan adalah kunci suatu negara dapat pulih dari krisis.<sup>2</sup>

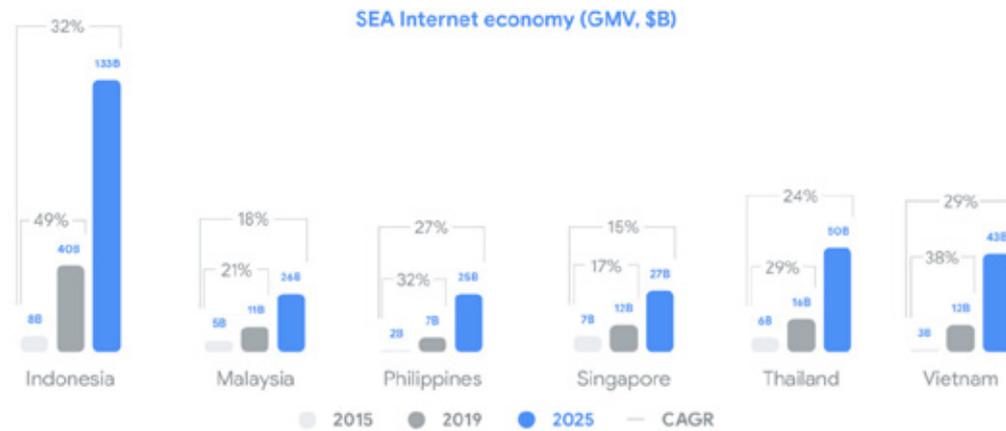
Kedua, fokus setiap negara terhadap dampak *scaring* atau luka dari perekonomian akibat COVID-19 dan *recovery* yang tidak dapat dilakukan dalam waktu yang cepat. Meskipun mengalami

resesi untuk kali pertama dalam 20 tahun, Indonesia menghindari penurunan yang lebih besar pada tahun 2020 atas respons kebijakan ekonomi yang kredibel. Prospek ekonomi dikelilingi oleh risiko dan ketidakpastian yang substansial. Pemulihan global dapat lebih kuat dari yang diperkirakan dan berpengaruh terhadap peningkatan permintaan barang dan jasa di Indonesia.

Agenda ketiga yaitu mengenai mata uang digital Bank Sentral dan agenda keempat mengenai pembiayaan yang berkelanjutan. Sektor keuangan sangat mendukung *climate change*, *green finance facility* termasuk stimulus atau dukungan dibidang fiskal untuk menciptakan transformasi ekonomi menuju *green finance* yang berkelanjutan, selain itu *digital infrastructure regulation* dapat meningkatkan *leverage* dan mobilisasi investasi sektor swasta.

Meningkatnya transaksi pembayaran digital mencerminkan perkembangan literasi keuangan digital. Bank Indonesia memperkirakan bahwa penyerapan

<sup>2</sup> Jessica Shannon, "Creating economic recovery and growth after COVID-19," PwC, 2021, <https://www.pwc.com/gx/en/industries/government-public-services/six-challenges/economic-recovery-after-covid-19.html>



*Gambar 3 Internet Economy Asia Tenggara  
Sumber: e-Conomy SEA*

serta pelaksanaan dari persetujuan dan perkembangan *global taxation principle*. Termasuk pembahasan mengenai *tax incentives, tax and digitalization*, hingga praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Reformasi dibidang perpajakan menjadi prioritas utama di Indonesia dan dalam pertemuan G20. Dengan adanya pertemuan G20 yang berfokus pada teknologi digital akan menghasilkan berbagai manfaat dibidang ekonomi dan perpajakan di Indonesia.

#### MANFAAT PRESIDENSI G20

Pembentukan G20 berasal dari pemikiran untuk menyelesaikan krisis keuangan global dan perlunya penguatan internasional yang berasal dari komitmen negara-negara dengan skala ekonomi terbesar. Negara G20 memberikan kerangka global yang kemudian diterapkan terhadap kebijakan diberbagai lembaga internasional. Tujuan utama forum adalah membangun komitmen internasional yang memiliki peran dalam memberikan solusi global untuk setiap permasalahan ekonomi. Esensi dari tujuan bersama yang menjadi landasan vital forum adalah terbentuknya aksi kolektif dalam mengatasi permasalahan ekonomi dunia.

G20 ditempatkan dengan baik untuk berkontribusi pada agenda pembangunan global terutama dengan memperkuat kebijakan pembangunan dan mengkoordinasikan tindakannya, menciptakan koherensi kebijakan, serta

analisis untuk mendukung pertumbuhan dan pembangunan. Forum G20 akan menjadi tonggak utama untuk memainkan peran utama dalam menyatukan negara-negara G20 dalam mencapai serangkaian kebijakan dan rencana aksi untuk mengatasi berbagai tantangan dari keuangan, pembangunan, kesehatan, dan lingkungan. Di era pandemi, salah satu isu utama yang akan menonjol selama masa kepresidenan Indonesia adalah penanganan dampak COVID-19 dengan lebih baik dan persiapan dunia menghadapi pandemi gelombang selanjutnya di masa depan. Selama masa kepresidenan Italia, masalah tersebut telah menjadi pusat perhatian mengingat dampak menyeluruh yang dahsyat dari pandemi terhadap manusia. Sejumlah kebijakan, strategi, dan rencana yang dapat ditindaklanjuti telah disusun oleh negara-negara G20 untuk memastikan pandemi yang sedang berlangsung dapat diakhiri dan dunia dapat lebih siap ketika pandemi dan keadaan darurat kesehatan masyarakat lainnya menyerang.

Sepanjang respons global terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat selama hampir dua tahun sejak awal pandemi, dunia telah mendapat banyak pelajaran. Dunia telah mempelajari hal yang berhasil dan tidak berhasil dalam mekanisme kesiapsiagaan dan responsnya terhadap ancaman kesehatan global. Melihat kemajuan yang dibuat oleh negara-negara G20 dalam menangani pandemi Indonesia berada di posisi yang tepat untuk mendorong negara-negara di seluruh

dunia dalam mengendalikan pandemi, membangun ketahanan yang lebih besar dalam sistem perawatan kesehatan, dan meletakkan penyusunan rencana yang dapat ditindaklanjuti untuk menangani krisis kesehatan di masa depan. Dengan dunia yang masih bergulat dengan masalah penyebaran tindakan medis untuk memerangi COVID-19, Indonesia dapat menjadi ujung tombak upaya kolektif untuk memastikan akses yang adil dan universal terhadap vaksin, terapi, dan diagnostik. Indonesia memanfaatkan pengalaman yang luas dalam menjalankan program vaksinasi untuk meningkatkan ketahanan di kalangan penduduk.

Masalah yang paling menjadi perhatian dunia adalah upaya negara-negara yang mendukung produksi alat-alat medis agar dapat digunakan diseluruh kawasan negara sehingga penyebaran COVID-19 dapat ditekan. Pelajaran penting lainnya yang dipetik selama pandemi adalah bahwa sistem perawatan kesehatan secara global telah kewalahan dalam kapasitas penanganan keadaan darurat kesehatan masyarakat. Respons global terhadap pandemi telah mengungkapkan peran yang tak terpisahkan dari pemberian layanan kesehatan digital. Keuntungan paling langsung dari pemberian layanan kesehatan digital adalah telah membantu banyak orang mengakses layanan kesehatan tanpa melakukan kunjungan langsung ke fasilitas kesehatan, sehingga melindungi diri mereka dari virus.

Indonesia telah membuat langkah besar dalam pengembangan dan

mengimplemantasikan kesehatan digital, pemerintah gencar mempromosikan penggunaan teknologi digital yang tepat dalam perawatan kesehatan. Penggunaan kesehatan digital jelas akan meningkatkan kualitas layanan kesehatan, memperluas cakupan layanan, dan berkontribusi pada pencapaian *universal health coverage*. Mengingat memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat dan mengubah sistem perawatan kesehatan, kesehatan digital harus menjadi agenda utama selama presidensi G20 Indonesia. Banyak masalah kesehatan yang perlu menjadi topik utama selama kepresidenan G20 Indonesia termasuk perawatan kesehatan. Di bawah tema utama “Recover Together, Recover Stronger”, Indonesia sekarang sedang menjalankan peran utama yang akan membantu dunia mencapai ketahanan yang lebih baik dalam bidang kesehatan global.

Menjadi presidensi G20 tahun 2022 memiliki beberapa keuntungan bagi Indonesia dari segi ekonomi jangka pendek meliputi peningkatan perekonomian pada sektor akomodasi, transportasi, serta makanan dan minuman; meningkatkan visa negara; serta meningkatkan perekonomian lokal, khususnya pada kegiatan usaha kecil dan menengah. Ekonomi jangka menengah meliputi percepatan pemulihan ekonomi pada sektor pariwisata; menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat lokal; dan mengurangi kesenjangan sosial. Manfaat ekonomi jangka panjang meliputi pengurangan kesenjangan sosial dan peningkatan pendapatan domestik serta terciptanya kepercayaan masyarakat dan komunitas internasional terhadap Indonesia. Manfaat dibidang politik meliputi memperkuat legitimasi pemerintah di masyarakat domestik, meningkatkan citra internasional Indonesia dalam memimpin agenda setting dalam *global governance* hingga membantu pencarian solusi untuk pemulihan ekonomi ASEAN. Manfaat pembangunan sosial meliputi pemberian sinyal positif terhadap investor global dan kemampuan penyerapan tenaga kerja hingga 33.000 di berbagai sektor industri

untuk masa yang akan datang.<sup>5</sup>

Dengan adanya Presidensi G20 Indonesia 2022 diharapkan dapat memberi dukungan terhadap pemulihan ekonomi melalui rangkaian pertemuan secara kumulatif yang menghadirkan delegasi-delegasi dari seluruh negara anggota dan berbagai lembaga internasional. Kehadiran para delegasi memberikan potensi peningkatan perekonomian Indonesia baik secara langsung terhadap sektor jasa; perhotelan, transportasi, UMKM, dan sektor terkait lainnya maupun secara tidak langsung melalui dampak terhadap persepsi investor dan pelaku ekonomi.

#### **KTT G20, AKADEMISI, DAN LEARNING ORGANIZATION**

Forum G20 merupakan forum penting dunia yang mewakili sekitar 80% ekonomi dunia. Pada krisis COVID-19, G20 memiliki tujuan penting untuk memulihkan kembali ekonomi pasca pandemi COVID-19, menangani krisis, dan mencegah krisis dimasa mendatang. Tema presidensi Indonesia mencakup tiga pilar utama yaitu *promoting productivity, increasing resilience and stability, dan ensuring sustainable and inclusive growth*. Agenda prioritas G20 Indonesia mencakup dua bidang yaitu ekonomi digital serta peningkatan daya saing dan produktivitas SDM.

Sebagai upaya dukungan presidensi G20 Indonesia pada tahun 2022 pemerintah juga melibatkan akademisi meliputi pendirian studi/pusat penelitian/studi kerjasama ekonomi internasional, penyediaan tenaga ahli dalam pelaksanaan presidensi G20 Indonesia antara lain dalam kegiatan penelitian, seminar, kuliah umum hingga program magang untuk membahas isu-isu ekonomi non-finansial, seperti energi, pembangunan, pariwisata, ekonomi digital, pendidikan,

tenaga kerja, pertanian, perdagangan, investasi, industri, kesehatan, anti korupsi, lingkungan, dan perubahan iklim. Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat melalui akademisi terhadap implementasi G20 di Indonesia.

Forum G20 bagi akademisi adalah proses belajar. Terhadap akademisi yang telah bekerja pada instansi pemerintah terlebih di Kemenkeu dapat mewujudkan *learning organization* yang secara terus-menerus dan terencana memfasilitasi pegawai agar mampu berkembang dan bertransformasi mencapai hasil yang lebih baik dan hasilnya dapat berguna untuk organisasi. Dengan sepuluh komponen kunci *learning organization* meliputi *Strategic Fit and Management Commitment, Learning Function Organization, Learning Spaces, Learning Solutions, Leaders Participation in Learning Process, Learners, Knowledge Sharing Culture, Feedback, Learning Value Chains, dan Learners Performance* diharapkan mampu menjadikan keberhasilan strategi Kemenkeu sebagai organisasi pembelajar.

Kaum akademisi merupakan harapan terciptanya forum G20 Indonesia menjadi lebih baik dengan berbagai masukan isu yang akan dibahas pada forum internasional tersebut. Adanya hasil riset akademisi maupun praktisi fokus G20 2022 sangat diharapkan memberikan pengaruh besar terhadap Indonesia. Dengan adanya forum G20 Indonesia harapan nyata kebijakan ekonomi internasional sangat diharapkan agar negara-negara di dunia dapat keluar dari kerapuhan ekonomi akibat COVID-19 dan memiliki strategi pengambilan kebijakan masa mendatang.

5 Kemlu, “Indonesia Ajak Dunia Berkolaborasi untuk Pulih Bersama di Presidensi G20 2022”, [kemlu.go.id](https://kemlu.go.id/portal/id/read/2934/berita/indonesia-ajak-dunia-berkolaborasi-untuk-pulih-bersama-di-presidensi-g20-2022), September, 2021, <https://kemlu.go.id/portal/id/read/2934/berita/indonesia-ajak-dunia-berkolaborasi-untuk-pulih-bersama-di-presidensi-g20-2022>

FRENDI NIC QOMAR ERNANTO  
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

# MENDESAIN KEBIJAKAN CARBON TAX DALAM KERANGKA APBN

Salah satu isu strategis yang disebutkan Pemerintah dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2022 adalah *carbon tax*. World Bank menyebutkan bahwa pada prinsipnya *carbon tax* merupakan penetapan harga atas karbon dengan menerapkan tarif pajak tertentu atas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) atau terhadap kandungan karbon pada bahan bakar fosil. Tulisan ini akan mendiskusikan konsep kebijakan *carbon tax* dan faktor risikonya dalam APBN yang perlu dipertimbangkan Pemerintah.

## CARBON TAX DAN PERTIMBANGAN PENGENAANNYA

*Carbon tax* merupakan salah satu skema *pigouian* yang digunakan banyak negara untuk mengoreksi eksternalitas negatif atas produksi ataupun konsumsi berbasis *carbon-intensive*, membuatnya lebih mahal, dan selanjutnya dapat mendorong pelaku ekonomi beralih ke penggunaan sumber daya yang lebih ramah lingkungan.<sup>1</sup> Berdasarkan data World Bank (2021), setidaknya ada 27 negara yang telah menerapkan *carbon tax*, sejalan dengan komitmen global untuk menahan kenaikan suhu global hingga di bawah 2<sup>o</sup> Celcius dari angka pra-Revolusi Industri dan melakukan upaya untuk membatasinya hingga di bawah 1,5<sup>o</sup> Celsius sebagaimana kesepakatan *Paris*

<sup>1</sup> Instrumen lain yang juga diterapkan di banyak negara untuk menekan penggunaan bahan bakar fosil dan mengurangi emisi GRK antara lain *Emission Trading System* atau *ETS* (saat ini setidaknya telah diterapkan di 38 negara), adopsi kebijakan seperti *Clean Energy Standards* (*CES*) atau *Clean Electricity Standards* (*CES*), dan/atau kombinasi instrumen-instrumen tersebut.

*Agreement* 2015. Dalam konteks Indonesia, perjanjian ini telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 dengan target penurunan GRK sebesar 29% (usaha sendiri) dan 41% (dengan bantuan internasional) pada tahun 2030.

Selain sebagai kebijakan berorientasi lingkungan, *carbon tax* juga dapat menjadi salah satu sumber penerimaan negara. Penerimaan ini kemudian dapat dipergunakan sebagai pengurang jenis pajak lainnya (*double dividend*), menambah belanja negara secara keseluruhan, atau di-*earmark* untuk tujuan tertentu. Sebagai contoh, pendapatan negara di Prancis dari *carbon tax* bisa mencapai US\$ 9 juta US\$ dan sebagian digunakan untuk menyediakan kebutuhan energi bagi rumah tangga berpendapatan rendah atau untuk mengurangi beban jenis pajak lainnya.

Selanjutnya, OECD (2011) memberikan beberapa panduan penting dalam mendesain pajak berbasis lingkungan, termasuk *carbon tax*. *Pertama*, penerapan *polluter pays principle*, yaitu basis pengenaan pajak lingkungan harus ditujukan ke polutan atau perilaku polusi. Prinsip ini pertama kali diperkenalkan OECD pada tahun 1972 yang menjelaskan bahwa pelaku polusi adalah pihak yang seharusnya menanggung biaya atas polusi dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. *Kedua*, cakupan pajak lingkungan idealnya perlu dirancang seluas skala kerusakan lingkungan yang terjadi dan tarif pajaknya pun harus sepadan dengan kerusakan tersebut. *Ketiga*, pajak lingkungan mungkin perlu dikombinasikan dengan instrumen kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan tertentu, termasuk untuk mengatasi

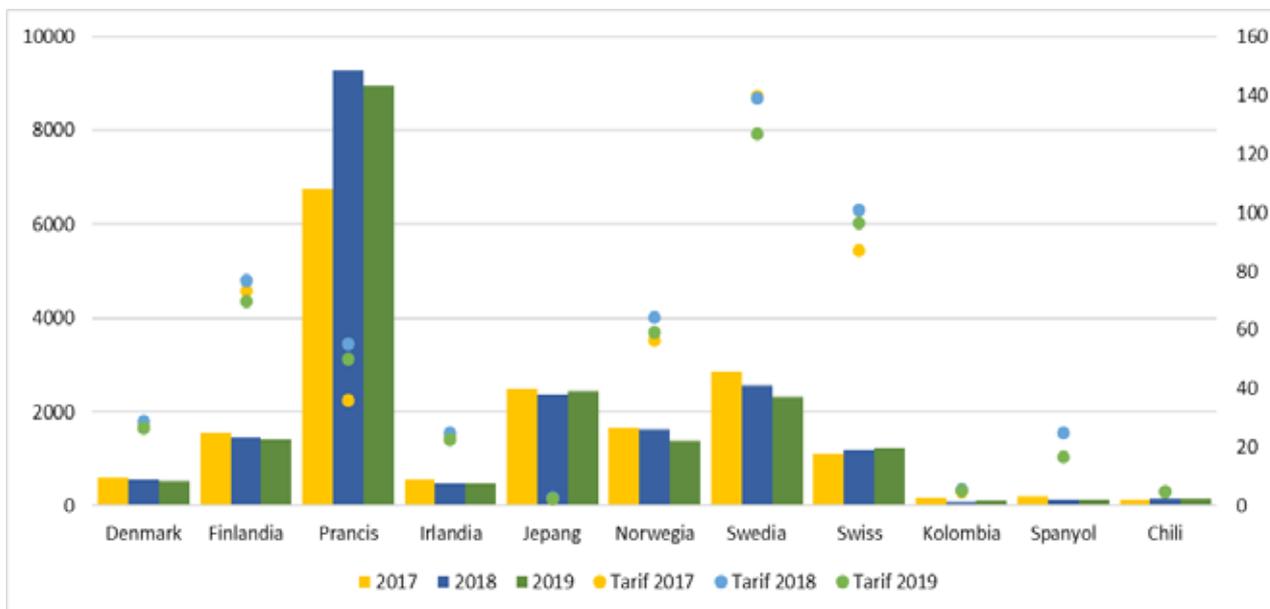
*distributional impact* yang dihasilkan. Poin-poin lainnya yang juga perlu dipertimbangkan adalah dampak terhadap daya saing industri, desain tarif dapat diprediksi untuk memotivasi perbaikan lingkungan, dan penerimaan pajak lingkungan dapat membantu konsolidasi fiskal atau mengurangi beban pajak lainnya.

## INSTRUMEN APBN

Dalam dokumen KEM-PPKF 2022, penerapan *carbon tax* dapat dilakukan antara lain dengan menggunakan instrumen APBN yang telah ada saat ini seperti pajak, cukai, atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pemerintah juga dapat memperkenalkan instrumen yang benar-benar baru yaitu "pajak karbon" dengan didahului revisi undang-undang di bidang perpajakan sehingga Pemerintah memiliki ruang yang lebih fleksibel dalam mengatur detail pengenaan *carbon tax*, seperti basis pengenaan, subjek pajak, dan tarif pajaknya. Masing-masing alternatif perlu dikaji dengan cermat, termasuk mengenai efektivitas dan efisiensi pemungutannya, serta perlu ditetapkan dalam peraturan terlebih dahulu.

Karbon juga dapat ditetapkan sebagai Barang Kena Pajak (BKP) dalam sistem Undang-Undang PPN atau Barang Kena Cukai (BKC) menurut ketentuan di bidang cukai. Dalam hal karbon ditetapkan sebagai BKP, pengenaan pajaknya dapat dilakukan atas pembelian barang yang memiliki kandungan karbon. Konsep ini memiliki kemiripan dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di Pemerintah Daerah bahwa yang menjadi objek PBBKB adalah semua

### Tarif (US\$/tCO<sub>2</sub>e) dan Penerimaan (juta US\$) Carbon Tax di Beberapa Negara



Sumber: Diolah dari [https://carbonpricingdashboard.worldbank.org/map\\_data](https://carbonpricingdashboard.worldbank.org/map_data)

jenis bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan bermotor.<sup>2</sup>

Di sisi lain, pengenaan cukai dapat dipandang lebih tepat mengingat karakteristik penggunaan karbon yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup serta “konsumsi”-nya yang perlu dibatasi. Konsep cukai ini juga banyak diterapkan secara internasional. Bahkan, berdasarkan studi OECD (2021), 89% dari komponen *carbon prices* berasal dari *fuel excise tax*,

sementara *carbon tax* hanya sekitar 4%.<sup>3</sup> Di Inggris *Vehicle Excise Duty* (VED) dikenakan per tahun dengan tarif sesuai dengan tingkat emisi CO<sub>2</sub> dan jenis bahan bakar kendaraan.

Penggunaan instrumen PNBPN juga dapat dipertimbangkan Pemerintah dalam mengenakan pungutan atas karbon. Kementerian yang menangani lingkungan hidup, energi, atau sektor lain yang sejenis dapat menjadi instansi yang melakukan pemungutan PNBPN. Namun demikian, perlu dilihat kesesuaian pemungutan ini dengan karakteristik objek PNBPN sehingga pengaturannya dapat lebih tepat.

#### OBJEK PUNGUTAN

Secara sederhana, objek *carbon tax* adalah karbon. Namun demikian, jenis karbon ini perlu dipertimbangkan sehingga dimungkinkan tidak hanya mencakup karbon dioksida, melainkan juga metana, dinitrogen oksida, dan gas-gas lainnya yang tergolong GRK. Oleh karena itu, istilah yang sering digunakan adalah “karbon dioksida ekuivalen (CO<sub>2</sub>e)” dengan satuan tarif “*per tonnes of carbon dioxide equivalent (tCO<sub>2</sub>e)*”.

Dasar pengenaan *carbon tax* di atas juga dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu basis produk karbon (*product approach*) dan basis emisi karbon (*emission approach*). Pendekatan produk karbon lebih umum diterapkan secara global atas konsumsi atau kandungan karbon dalam bahan bakar fosil, seperti *fuel tax* di Jepang, Norwegia, Swedia, dan Swiss (Indonesia: PBBKB). Sementara itu, terdapat juga negara seperti Chili yang mengimplementasikan *carbon tax* berbasis emisi. Berdasarkan kedua basis ini, Pemerintah dapat menentukan objek *carbon tax* secara lebih spesifik, misalnya

2 PBBKB merupakan salah satu pajak lingkungan yang saat ini berlaku di Indonesia (contoh lainnya adalah pajak pengambilan air bawah tanah). Bahkan, sebenarnya sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah telah diberikan kewenangan di bidang perpajakan guna lebih meningkatkan pemeliharaan dan mencegah kerusakan lingkungan.

3 Terminologi cukai (*excise*) pada *fuel excise tax* di sini pada prinsipnya merupakan hal yang sama dengan pajak mengingat cukai juga merupakan jenis penerimaan perpajakan. OECD (2021) pun menegaskan bahwa “Countries generally implement both fuel and carbon taxes through fuel excise taxation, but a distinction is made here based on whether a jurisdiction labels a certain tax to be a carbon tax or not.”

atas konsumsi barang dengan kandungan karbon dan/atau atas kegiatan yang menghasilkan emisi karbon. Penentuan basis ini penting karena selanjutnya akan berpengaruh pada dasar perhitungan, cakupan sektor yang dikenai pungutan, dan dampaknya terhadap keuangan negara.<sup>4</sup>

Pendekatan produk karbon memiliki kelebihan karena lebih mudah diterapkan, secara administrasi lebih sederhana, dan cakupannya dapat sangat luas karena informasi kandungan karbon relatif lebih mudah didapat. Namun demikian, pendekatan ini kurang mengakomodir kemungkinan adanya jenis emisi CO<sub>2</sub>e lainnya, atau sebaliknya *non-emission process* turut tercakup.<sup>5</sup> Di sisi lain, *emission approach* mampu menangkap seluruh bentuk emisi CO<sub>2</sub>e tanpa memedulikan jenis bahan bakar yang digunakan, lebih akurat karena berdasarkan emisi faktual, serta lebih fleksibel ketika akan dikombinasikan dengan instrumen lainnya seperti ETS. Namun demikian, pendekatan ini memerlukan pengukuran atau monitoring atas tingkat emisi secara memadai sehingga penerapannya lebih kompleks, berbiaya mahal, dan sulit diterapkan pada instalasi produksi yang kecil.<sup>6</sup>

- 4 *Pengenaan pungutan atas karbon seharusnya dapat dipahami bukan karena karbon per se, melainkan utamanya karena karbon tersebut menghasilkan emisi yang berdampak negatif bagi lingkungan. Dari perspektif ini, pendekatan berbasis produk karbon akan memiliki keterkaitan erat dengan pendekatan berbasis emisi sehingga tarif pungutan atas basis produk karbon dapat pula ditetapkan berdasarkan pada estimasi tingkat emisi yang dihasilkan sesuai dengan faktor konversinya.*
- 5 *Sebagai contoh, kandungan karbon dalam suatu bahan bakar misalnya hanya komponen karbon (C), namun setelah melewati rangkaian proses produksi, emisi yang dihasilkan termasuk dinitrogen oksida dan sulfur heksafluorida yang mungkin belum diperhitungkan dalam basis carbon-content. Sebaliknya, karbon yang dimanfaatkan untuk tujuan tertentu (seperti untuk filtrasi) mungkin tidak menghasilkan emisi, namun tercakup dalam pengenaan pungutan berbasis carbon-content.*
- 6 *Pada dasarnya pengukuran emisi dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan: volume penggunaan bahan bakar × heating value dari bahan bakar tersebut × emission factor. Karena bersifat estimasi, pengukuran ini dapat pula diterapkan pada pendekatan berbasis produk. Dalam basis emission approach, pengukuran emisi aktual rumit dilakukan, misalnya ketika diterapkan untuk menghitung emisi kendaraan per pemilik kendaraan.*

## TITIK PENGENAAN PUNGUTAN

Pemerintah juga perlu mempertimbangkan di titik mana *carbon tax* akan dikenakan karena akan berpengaruh terhadap pihak mana yang sesungguhnya secara legal menjadi target pengenaan pungutan. Secara umum, terdapat 2 alternatif yang dapat diambil Pemerintah, yaitu pengenaan pungutan di tingkat hulu (*upstream approach*) atau hilir (*downstream approach*). *Upstream approach* memberlakukan pengenaan *carbon tax* pada tahap awal karbon masuk dalam rantai perekonomian, yaitu ketika produk karbon diimpor, diekstraksi (misalnya dari kegiatan pertambangan dan pengeboran minyak), atau diproduksi. Pendekatan ini dapat diterapkan kepada importir, industri kilang minyak, pertambangan batu bara, dan industri sejenis lainnya. Sementara, *downstream approach* mengenakan *carbon tax* ketika produk karbon tersebut digunakan atau “dikonsumsi”, misalnya konsumen yang melakukan pembelian bahan bakar kendaraan atau industri yang menggunakan karbon, misalnya industri kertas dan semen.

*Upstream approach* memiliki keunggulan karena sasaran pemajakan yang lebih sedikit sehingga cenderung lebih sederhana di sisi administrasi dan pengawasan, namun memiliki kelemahan berupa penambahan beban finansial perusahaan karena pungutan dikenakan di tahap awal sebelum produk diserahkan ke mata rantai ekonomi berikutnya. Sebaliknya, *downstream approach* memiliki kelebihan karena merupakan rantai ekonomi terdekat dengan emisi karbon yang ditimbulkan, namun lebih sulit dalam pengawasan dan juga menambah beban finansial bagi konsumen.

## SEKTOR YANG DIKENAI PUNGUTAN

Idealnya, sektor yang diutamakan dikenai *carbon tax* seharusnya merupakan sektor yang menjadi penyumbang emisi terbesar sehingga tujuan pengurangan emisi dapat terwujud. Laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2020) menyebutkan bahwa pada tahun 2018 kontributor emisi GRK nasional adalah sektor kehutanan dan kebakaran gambut (44%), energi (36%), limbah (8%), pertanian (8%), dan *Industrial Process and Product Use* (IPPU) (4%). Secara lebih

spesifik, perubahan tutupan lahan dari *non cropland to cropland* dan dekomposisi gambut menyumbang masing-masing 16,6% dan 19,2%. Sedangkan pada sektor energi, penyumbang emisi terbesar adalah industri energi (termasuk pembangkitan listrik) sebesar 11,26% dan kemudian transportasi 6,7%. Di kategori IPPU, penyumbang emisi terbesar adalah industri semen (1,3%).

## TARIF PUNGUTAN

Secara konseptual, tarif *carbon tax* seharusnya sesuai dengan target pengurangan emisi yang dicanangkan Pemerintah atau sepadan untuk menutup eksternalitas negatif yang ditimbulkan. Namun demikian, Pemerintah dapat mengambil kebijakan tarif yang dinamis, yaitu dengan implementasi tarif rendah terlebih dahulu dan secara bertahap dinaikkan. Secara global, tarif *carbon tax* yang saat ini berlaku di banyak negara juga sangat bervariasi. Sebagai *benchmark*, Swedia saat ini memiliki tarif *carbon tax* tertinggi, yaitu US\$137,24/tCO<sub>2</sub>e dan diikuti oleh Swiss dan Liechtenstein sebesar US\$101,47/tCO<sub>2</sub>e. Sementara itu, tarif terendah diterapkan oleh Polandia dengan US\$0,08/tCO<sub>2</sub>e.

Selanjutnya, Pemerintah dapat pula mempertimbangkan *threshold* dan *exemption* dari pengenaan tarif *carbon tax* ini. Pemerintah dapat mengkaji level emisi minimal yang akan dikenakan *carbon tax* serta sektor atau jenis bahan bakar mana yang kemungkinan perlu dikecualikan dari pengenaan *carbon tax*. Sebagai contoh, sebagian negara Eropa seperti Denmark, Prancis, Irlandia, dan Norwegia tidak mengenakan *carbon tax* untuk sektor yang telah tercakup dalam program ETS Uni Eropa.<sup>7</sup> Selain itu, Jepang juga tidak menerapkan *carbon tax* untuk sektor pertanian dan transportasi kereta api. Di sisi lain, Meksiko mengecualikan penerapan *carbon tax* untuk untuk gas alam. Chili memilih basis emisi dan hanya diterapkan untuk boiler dan turbin dengan kapasitas minimal 50 megawatt.

- 7 *ETS Uni Eropa merupakan pasar perdagangan emisi karbon berbasis “cap and trade” yang berlaku di seluruh negara anggota Uni Eropa+Islandia, Liechtenstein, dan Norwegia. ETS Uni Eropa ini mencakup sektor-sektor yang emisinya dapat diukur, dilaporkan, dan diverifikasi secara akurat.*

Kebijakan tarif ini juga harus memperhatikan siapa yang sesungguhnya menanggung beban atas pungutan tersebut dalam sistem perekonomian. Jika *carbon tax* ditujukan untuk mengurangi emisi, entitas yang menanggung beban pungutan ini sesuai *polluter pays principle* haruslah pihak yang bisa mempengaruhi level emisi tersebut. Oleh karena itu, ketika beban tersebut bisa digeser ke konsumen atau pengguna akhir (misalnya tercermin dalam kenaikan harga produk), entitas *polluters* di tingkat hulu cenderung kurang terinsentif untuk mengurangi level emisinya (*carbon lock-in*) dan beban konsumen juga meningkat.<sup>8</sup> Selain itu, apabila dengan pembebanan pungutan tersebut tingkat konsumsi karbon di level pengguna akhir juga relatif tetap antara lain karena sifat permintaan bahan bakar fosil yang inelastis, maka pengurangan emisi yang diharapkan dari penerapan *carbon tax* baik di level hulu maupun hilir akan tetap sulit tercapai.<sup>9</sup> Alternatifnya, penerimaan dari *carbon tax* perlu masuk dalam sistem APBN terlebih dahulu sehingga dapat dibelanjakan untuk mendukung program pengurangan emisi atau mengurangi *distributional impact* yang ditimbulkan.

## PENUTUP

Dalam mendesain kebijakan *carbon tax*, Pemerintah perlu mencari keseimbangan antara penentuan instrumen APBN yang tepat, objek pemungutan, titik pengenaan pungutan, sektor terdampak, dan tarif pungutan. Faktor-faktor tersebut perlu dipertimbangkan secara hati-hati untuk meminimalisasi resistensi industri dan *tax*

8 Secara teori, industri baru akan mengurangi emisi jika pungutan yang dikenakan lebih besar daripada biaya untuk mengurangi emisi. Ketika pungutan tersebut sama atau lebih rendah daripada biaya untuk mengurangi emisi, industri akan lebih memilih untuk membayar pungutan daripada mengurangi polusi. Dalam praktiknya, hal ini sangat bergantung juga dengan ketersediaan sumber daya alternatif yang bersifat *low-emission* bagi industri.

9 Berbeda dengan skema ETS yang menargetkan jumlah emisi, *carbon tax* memang tidak didesain untuk menentukan batas tertinggi emisi yang diperkenankan sehingga efektivitasnya dalam mengurangi tingkat emisi perlu diuji lebih lanjut. Namun demikian, beberapa studi seperti yang dilakukan Labandeira et al (2004) di Spanyol dan IMF (2019) serta Jonsson et al (2020) di Swiss menunjukkan bahwa penerapan *carbon tax* efektif mengurangi emisi.

*incidence* dalam perekonomian sehingga dampak *carbon tax* tidak berbalik menjadi beban APBN. Selain itu, Pemerintah juga perlu mengkomunikasikan kebijakan ini secara efektif dan konsisten antara lain dengan menekankan bahwa penerimaan dari *carbon tax* selanjutnya dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk mitigasi perubahan iklim.

Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan merupakan cerminan kebijakan Kementerian Keuangan.

## REFERENSI

- International Monetary Fund. (2019), *Fiscal Policies to Curb Climate Change*. Dapat diakses di <https://blogs.imf.org/2019/10/10/fiscal-policies-to-curb-climate-change/>
- Jonsson, Samuel, Anders Ydstedt, dan Elke Asen. 2020. *Looking Back on 30 Years of Carbon Taxes in Sweden*. Tax Foundation. Dapat diunduh di <https://files.taxfoundation.org/20200929121706/Looking-Back-on-30-Years-of-Carbon-Taxes-in-Sweden-re.pdf>
- Kementerian Keuangan. 2021. *Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2022*. Kementerian Keuangan: Jakarta. Dapat diunduh di <https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/kem-ppkf>.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2020. Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Monitoring, Pelaporan, Verifikasi (MPV) Tahun 2019. Jakarta. Dapat diunduh di <http://ditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/adminppi/dokumen/igrk/lapigrkmrv2019.pdf>.
- Labandeira, Xavier, Jose M Labeaga, dan Miguel Rodríguez. 2004. *Green tax reforms in Spain*. Eur. Env., 14: 290-299. <https://doi.org/10.1002/eet.361>
- OECD. 2011. *Environmental Taxation: A Guide for Policy Makers*. OECD Publishing: Paris. Dapat diunduh di <https://www.oecd.org/env/tools-evaluation/48164926.pdf>
- . 2020. *Taxing Energy Use 2019: Using Taxes for Climate Action*. OECD Publishing: Paris. <https://www.oecd.org/tax/taxing-energy-use-efde7a25-en.htm>

----- . 2020. *Country Specific Notes and Energy Tax Profiles*. OECD Publishing: Paris. Dapat diunduh di <https://www.oecd.org/tax/taxing-energy-use-efde7a25-en.htm>

Partnership for Market Readiness (PMR). 2017. *Carbon Tax Guide: A Handbook for Policy Makers*. World Bank, Washington.

Uni Eropa. 2021. *EU Emissions Trading System (ETS)*. Dapat diakses di [https://ec.europa.eu/clima/policies/ets\\_en](https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en).

World Bank. 2021. *Carbon pricing dashboard*. World Bank. Dapat diakses di [https://carbonpricingdashboard.worldbank.org/map\\_data](https://carbonpricingdashboard.worldbank.org/map_data)

ANIES SAID BASALAMAH  
WIDYAISWARA UTAMA PUSDIKLAT KEPEMIMPINAN DAN MANAJERIAL, BPPK

# PERLUNYA WIDYAISWARA MENYIASATI PERMENPAN 42/2021

## PENGANTAR

Pada 1 September 2021 yang lalu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan peraturan (Permenpan) nomor 42 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan mencabut Permenpan nomor 22 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya. Permenpan yang baru ini lebih rigid dan menyerupai Permenpan nomor 31 tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai yang merinci 22 jenis pekerjaan pemeriksa bea dan cukai kategori Pemula, 98 jenis pekerjaan pemeriksa bea dan cukai kategori Terampil, 73 jenis pekerjaan pemeriksa bea dan cukai kategori Mahir, 27 jenis pekerjaan pemeriksa bea dan cukai kategori Penyelia, 114 jenis pekerjaan

pemeriksa bea dan cukai kategori Ahli Pertama, 121 jenis pekerjaan pemeriksa bea dan cukai kategori Ahli Muda, dan masing-masing 68 jenis pekerjaan pemeriksa bea dan cukai kategori Ahli Madya dan Ahli Utama. Dalam Permenpan 42 tahun 2021 pekerjaan Widyaiswara sebanyak 111 pekerjaan juga dirinci masing-masing 26, 26, 29 dan 30 pekerjaan untuk kategori Widyaiswara Ahli Pertama, Muda, Madya dan Utama.

Penelitian penulis terdahulu terkait pejabat fungsional di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) khususnya yang berkaitan dengan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai menunjukkan bahwa banyak sekali pejabat fungsional tersebut yang tidak dapat naik pangkat dan/atau jenjang jabatan dalam empat tahun. Tabel 1 menunjukkan bahwa per

1 Januari 2021 dari 2.598 Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai terdapat 185 pejabat fungsional yang sejak diberlakukannya Permenpan 31 tahun 2016 baru dapat naik pangkat setelah lebih dari empat tahun dalam pangkat mereka yang terakhir.

Dengan aturan yang serupa dan beberapa Widyaiswara Kemenkeu bahkan bekerja di Balai Diklat yang kewenangan untuk melaksanakan Kemenkeu Corpu menggunakan model ADDIE (*Analyze, Design, Development, Implementation, and Evaluation*) tidak selalu bisa seluruh tahapan dilaksanakan di samping ada pula beberapa Widyaiswara Utama di Balai Diklat yang kegiatan pelatihan, pengembangan dan penjaminan mutu pelatihan tidak sepenuhnya bisa dilaksanakan, maka Widyaiswara perlu

**Tabel 1.** Lamanya Waktu Kenaikan Pangkat Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Sejak Berlakunya Permenpan 31 tahun 2016

NO.	JENJANG JABATAN	JUMLAH
1	Pemula	52
2	Terampil	3
3	Mahir	2
4	Ahli Pertama	70
5	Ahli Muda	49
6	Ahli Madya	9
Jumlah		185

Sumber: Biro SDM Kementerian Keuangan (2021, diolah).

**Tabel 2.** Besarnya Angka Kredit untuk Bahan Tayang, Bahan Ajar dan Bahan Peraga Sesuai Jenjang Jabatan Widyaiswara

KEGIATAN	JENJANG JABATAN WIDY AISWARA			
	PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA
Menyusun bahan perencanaan Pelatihan dalam bentuk bahan ajar	0.14	0.23	0.28	0.63
Menyusun bahan perencanaan Pelatihan dalam bentuk bahan tayang	0.14	0.24	0.26	0.33
Menyusun bahan perencanaan Pelatihan dalam bentuk bahan peraga	0.13	0.24	0.25	0.68

Sumber: Lampiran I Permenpan nomor 42 Tahun 2021 (diolah).

untuk mengatur strategi, atau menyiasati, dalam mengumpulkan angka kredit apabila berencana untuk naik pangkat dan/atau jenjang jabatan. Artikel ini mencoba membantu pembaca dalam mengatur strategi dimaksud.

#### PERMENPAN NOMOR 42 TAHUN 2021

Berbeda dengan Permenpan nomor 22 tahun 2014 yang menyebutkan mengenai tugas pokok fungsional Widyaiswara adalah mendidik, mengajar dan melatih (dikjartih) PNS, serta melakukan evaluasi dan pengembangan pendidikan dan pelatihan (diklat) yang ditambah dengan sub unsur (mengikuti) pendidikan dan sub unsur (melaksanakan kegiatan) pengembangan profesi, keempatnya disebut dengan istilah unsur utama, dalam Permenpan nomor 42 tahun 2021 kegiatan utama hanyalah melakukan kegiatan pelatihan, pengembangan dan penjaminan mutu pelatihan. Sementara itu kegiatan penunjang yang “harganya” paling tinggi hanya 20% meliputi kegiatan-kegiatan yang semula dalam Permenpan 22 tahun 2014 sebagai unsur utama, yaitu salah satu dari lima kegiatan sebagai berikut (Pasal 35):

1. Membimbing Widyaiswara dalam peningkatan kompetensi pada jenjang yang lebih rendah.
2. Menjadi anggota Tim Penilai atau tim Uji Kompetensi.
3. Memperoleh penghargaan/tanda jasa.

4. Memperoleh gelar/ijazah lain.
5. Melaksanakan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Widyaiswara.

Seperti masih belum puas untuk mempersulit Widyaiswara, Permenpan nomor 42 tahun 2021 juga “mengurangi” angka kredit untuk beberapa kegiatan seperti pembuatan karya tulis/ karya ilmiah seperti dirinci dalam Lampiran II Permenpan nomor 42 tahun 2021. Sebagai contoh, jika Widyaiswara menulis buku dengan ISBN maka menurut Permenpan nomor 22 tahun 2014 selain merupakan kegiatan utama juga diberi angka kredit 25, sedangkan dalam Permenpan nomor 42 tahun 2021 selain merupakan unsur penunjang juga hanya diberi angka kredit sebesar 8 saja. Demikian pula beberapa komponen lainnya seperti bahan ajar, bahan tayang dan bahan peraga yang semula untuk semua jenjang dengan angka kredit seragam sebesar 0,60, dalam Permenpan nomor 42 tahun 2021 besarnya angka kredit tergantung pada jenjang Widyaiswara yang bersangkutan sebagaimana tampak pada Tabel 2.

Sesuai dengan pasal 11 ayat (1), apabila Widyaiswara yang jenjang jabatannya lebih rendah melakukan kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh Widyaiswara yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya, maka angka kredit setiap kegiatan tersebut hanya dihargai 80% saja dari angka kredit kegiatan tersebut.

Artinya, jika Widyaiswara Pertama misalnya membuat bahan ajar untuk pelatihan “manajerial bagi pejabat pengawas, Pelatihan Jabatan Fungsional, Pelatihan teknis tingkat lanjutan, atau Pelatihan sosial kultural tingkat lanjutan” yang seharusnya dilakukan oleh Widyaiswara Muda, maka angka kredit yang diperoleh bukan 0,23 melainkan 0,184 yaitu  $80\% \times 0,23$ . Dalam Pasal 10 hanya ditentukan satu tingkat lebih tinggi atau satu tingkat lebih rendah, meskipun kaidah hukum menyatakan bahwa apabila tidak dilarang berarti boleh, apabila Widyaiswara Pertama tersebut membuat bahan ajar untuk pelatihan pejabat administrator apalagi pejabat pimpinan tinggi yang masing-masing seharusnya dilakukan oleh Widyaiswara Madya dan Utama, maka kemungkinan angka kredit tidak akan diberikan dan bukannya 80% dari 0,28 dan 0,63 seperti tercantum dalam Tabel 2.

Yang barangkali meringankan dibanding Permenpan sebelumnya adalah jumlah angka kredit kumulatif yang harus dicapai untuk dapat naik pangkat atau jenjang jabatan. Selain dari yang semula pendidikan dihargai dengan sangat tinggi (150 untuk Magister dan 200 untuk Doktor), kini masing-masing hanya dihargai 10 dan 15 untuk ijazah Magister dan Doktor serta 25% dari angka kredit untuk kenaikan pangkat, angka kredit kumulatif minimal lebih kecil dari jumlah sebelumnya, yaitu untuk Widyaiswara

**Tabel 3.** Jumlah Angka Kredit Kumulatif Minimal untuk Kenaikan Pangkat/Jabatan Fungsional Widyaiswara

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT								WIDYAIKWARA DENGAN PENDIDIKAN
	AHLI PERTAMA	AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA		
	III/B	III/C	III/D	IV/A	IV/B	IV/C	IV/D	IV/E	
Melaksanakan kegiatan pe-latihan, pengembangan pe-latihan, dan penjaminan mutu pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi ASN	50	100	100	150	150	150	200	200	Magister
	-	100	100	150	150	150	200	200	Doktor

Sumber: Lampiran III dan Lampiran IV Permenpan nomor 42 Tahun 2021 (diolah).

**Tabel 4.** Jumlah Angka Kredit Maksimal per Kegiatan Pelatihan untuk Setiap Jenjang Jabatan Widyaiswara

UNSUR	SUB-UNSUR	JENJANG JABATAN WIDYAIKWARA			
		PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA
Pelatihan	Perencanaan	1,27	2,54	3,01	8,15
	Pelaksanaan	0,79	1,45	1,94	3,4
	Evaluasi	0,36	0,73	1,01	2,13
Pengembangan	Pengembangan Model	0,14	0,23	0,35	0,78
	Evaluasi Pengembangan	0,15	0,25	0,31	0,89
Penjaminan Mutu	Perencanaan	0,09	0,24	0,31	0,96
	Pelaksanaan	-	-	0,76	1,84
	Evaluasi	0,14	0,34	0,42	0,87
Jumlah		2,94	5,78	8,11	19,02

Sumber: Lampiran I Permenpan nomor 42 Tahun 2021 (diolah).

Ahli Pertama yang semula untuk magister dan doktor dibedakan masing-masing sebesar 150 dan 200, kini cukup 50 saja untuk tingkat magister. Sedangkan untuk Ahli Muda yang semula untuk magister dan doktor dibedakan masing-masing sebesar 200 dan 300, kini cukup 100 baik untuk magister maupun doktor. Demikian pula untuk Ahli Madya yang semula untuk magister dan doktor dibedakan masing-masing sebesar 400, 550 dan 700, kini cukup 150 baik untuk magister maupun doktor. Juga untuk Ahli Utama yang semula untuk magister dan

doktor dibedakan masing-masing sebesar 850 dan 1.050, kini cukup 200 baik untuk magister maupun doktor. Rincian jumlah angka kredit kumulatif untuk dapat naik pangkat/jenjang jabatan tampak pada Tabel 3.

Seperti tampak pada Tabel 3, untuk naik dari jabatan Widyaiswara Ahli Pertama ke Ahli Muda atau dari III/b ke III/c maka cukup dengan angka kredit sebesar 50. Artinya, apabila seorang Widyaiswara Ahli Pertama hanya dapat memenuhi angka kredit tahunan sebesar angka minimum sebagaimana diatur dalam Pasal

24 ayat (1) yaitu 12,5 untuk Widyaiswara Ahli Pertama, 25 untuk Ahli Muda, 37,5 untuk Ahli Madya dan 50 untuk Ahli Utama, maka untuk dapat naik pangkat atau golongan diperlukan empat tahun ( $12,5 \times 4 = 50$ ;  $25 \times 4 = 100$ ;  $37,5 \times 4 = 150$ ;  $50 \times 4 = 200$ ). Apabila Widyaiswara tersebut ingin naik pangkat kurang dari empat tahun, maka sesuai Permenpan nomor 42 tahun 2021 ini tidak berlaku lagi Peraturan Bersama Kepala LAN dan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 1 Tahun 2015 – nomor 8 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan

Peraturan Permenpan Nomor 22 Tahun 2014 yang antara lain membolehkan batasan kenaikan pangkat bagi Widyaiswara paling singkat telah dua tahun dalam pangkat terakhir.

Sesuai Pasal 27 ayat (2) Permenpan nomor 42 tahun 2021, capaian Angka Kredit paling tinggi adalah 150% dari target Angka Kredit minimal atau setiap tahun paling banyak 18,75 untuk Widyaiswara Ahli Pertama, 37,5 untuk Ahli Muda, 56,25 untuk Ahli Madya dan 75 untuk Ahli Utama, Hal ini berarti paling cepat naik pangkat dalam waktu tiga tahun serta kelebihan angka kreditnya bisa diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya asalkan dalam satu jenjang Jabatan Fungsional (lihat Tabel 3 khususnya untuk Widyaiswara Ahli Muda, Madya dan Utama yang memiliki kolom golongan ruang yang lebih dari satu). Dibanding pertaturan sebelumnya memang lebih tidak menguntungkan Widyaiswara, akan tetapi dibanding struktural yang naik pangkat regulernya setiap empat tahun sekali, Permenpan nomor 42 tahun 2021 ini memberi kemungkinan naik pangkat yang lebih cepat satu tahun. Tentunya apabila segala persyaratannya terpenuhi, termasuk lulus Uji Kompetensi bagi yang akan naik jenjang jabatan serta persyaratan lain yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Yang meringankan lainnya meskipun angka kreditnya tidak lebih baik adalah pembuatan karya tulis atau karya ilmiah secara bersama-sama. Apabila dalam Permenpan nomor 22 tahun 2014 hanya dibatasi maksimal sebanyak dua penulis, dalam Permenpan nomor 42 tahun 2021 ini bisa dilakukan oleh empat penulis dengan perimbangan angka kredit masing-masing 60%:40%; 50%:25%:25%; dan 40%:20%:20%:20% untuk dua, tiga dan empat penulis apabila dapat diketahui satu orang sebagai penulis utamanya. Akan tetapi apabila tidak dapat ditentukan siapa penulis utamanya maka angka kreditnya dibagi sama besar untuk masing-masing penulis sehingga proporsinya masing-masing bisa 50%:50%; 33,33%:33,33%:

33,33%; dan 25%:25%:25%:25% untuk dua, tiga dan empat penulis.

Ketentuan lain yang perlu diperhatikan dari Permenpan nomor 42 tahun 2021 ini adalah bahwa setiap Widyaiswara wajib menjadi anggota Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia (APWI), akan tetapi berbeda dengan Permenpan nomor 22 tahun 2014 yang memberi angka kredit untuk menjadi anggota maupun pengurus, yaitu masing-masing sebesar 0,75 dan 1, dalam Permenpan nomor 42 tahun 2021 sama sekali tidak ada angka kreditnya. Mungkin dalam Permenpan ini diharapkan agar APWI ini jalan sendiri secara otomatis atau mengikuti aturan koperasi yang dapat dipimpin oleh profesional non anggota koperasi. Satu-satunya harapan adalah LAN dalam peraturan yang akan dibuat mengakui hal ini meskipun dalam Lampiran II Permenpan nomor 42 tahun 2021 angka kreditnya hanya 0,5 saja yaitu dalam bentuk pelaksanaan “kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional Widyaiswara.”

Agar peraturan baru yang lebih memberatkan Widyaiswara ini dapat terpenuhi seluruh persyaratannya untuk dapat naik pangkat lebih cepat, maka tidak ada cara lain kecuali setiap Widyaiswara harus mengatur strategi atau menyiasati Permenpan nomor 42 tahun 2021 ini. Bagian berikut ini menjelaskan cara-cara yang dapat dilakukan.

#### **MENYIASATI PERMENPAN NOMOR 42 TAHUN 2021**

Untuk dapat naik pangkat atau jenjang jabatan setingkat lebih tinggi dalam waktu tiga tahun yang paling memungkinkan menurut Permenpan nomor 42 tahun 2021 dengan angka kredit yang kecil-kecil dan kinerja maksimum sebesar 150% serta beberapa pembatasan sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya, maka Widyaiswara perlu untuk membuat strategi khusus. Pertama adalah dengan memfokuskan pada kegiatan-kegiatan yang ada dalam Lampiran I Permenpan

nomor 42 tahun 2021 tersebut. Hal ini disebabkan karena kegiatan penunjang dalam Pasal 35 disebutkan “paling tinggi” 20% yang berarti tidak ada angka kredit dari unsur penunjang juga dimungkinkan. Hanya saja angka kredit dalam Lampiran I Permenpan nomor 42 tahun 2021 nilainya kecil-kecil sehingga Widyaiswara harus melakukan beberapa kali pelatihan untuk dapat mencapai angka kredit 150% dari angka kredit minimum. Seperti tampak pada Tabel 4, apabila masing-masing jenjang jabatan Widyaiswara melakukan seluruh sub-unsur kegiatan yang ada pada kegiatan pelatihan, pengembangan pelatihan dan penjaminan mutu pelatihan maka angka kredit maksimal yang dapat diperoleh oleh setiap jenjang Widyaiswara untuk setiap kegiatan pelatihan, pengembangan pelatihan dan penjaminan mutu pelatihan adalah 2,94; 5,78; 8,11; dan 19,02 masing-masing untuk Widyaiswara Ahli Pertama, Muda, Madya dan Utama. Dengan demikian untuk mendapatkan angka kredit tahunan sebesar 150% dari angka kredit minimum sebesar 18,75; 37,5; 56,25; dan 75 masing-masing untuk Widyaiswara Ahli Pertama, Muda, Madya dan Utama berarti masing-masing Widyaiswara harus melakukan kegiatan sebanyak tujuh kali untuk Widyaiswara Ahli Pertama, Muda dan Madya, dan empat kali untuk Widyaiswara Ahli Utama.

Akan tetapi apabila Widyaiswara tidak dapat melakukan masing-masing dari 26, 26, 29 dan 30 pekerjaan untuk kategori Widyaiswara Ahli Pertama, Muda, Madya dan Utama tersebut apalagi apabila hanya dapat mengajar dan membuat bahan ajar, bahan tayang dan bahan peraga seperti disebutkan pada Tabel 2, maka angka kredit dalam Tabel 2 tersebut ditambahkan dengan angka kredit untuk melakukan kegiatan pembelajaran klasikal untuk ASN dan non ASN sebesar 0,09 dan 0,07; 0,19 dan 0,14; 0,25 dan 0,19; serta 0,4 dan 0,24 masing-masing untuk Widyaiswara Ahli Pertama, Muda, Madya dan Utama maka Widyaiswara tersebut harus melakukan pelatihan sebanyak 33 kali untuk Widyaiswara Ahli Pertama dan Utama atau 37 dan 46 kali masing-

masing bagi Widyaiswara Ahli Muda dan Madya. Jumlah pelatihan yang dalam satu tahun mungkin tidak akan pernah terjadi. Oleh sebab itu untuk bisa mencapai target 150% maka Widyaiswara tidak bisa hanya mengandalkan mengajar dan menyiapkan bahan saja tetapi harus ditambah dengan kegiatan-kegiatan lainnya.

Dari Lampiran II Permenpan nomor 42 tahun 2021 angka kredit yang nilainya relatif besar adalah apabila dalam bentuk tulisan, baik berupa buku atau majalah ilmiah, makalah, menjadi pembicara dalam pertemuan ilmiah, atau berupa artikel yang dipublikasikan. Karena hanya dihargai 20%, angka ini sangat tidak signifikan bila dibandingkan dengan angka kredit dari kegiatan mengajar. Perhatikan contoh berikut ini. Jika target angka kredit sebesar 150% dari angka minimum tahunan tersebut dapat dipecah menjadi dua bagian yaitu 80% dari kegiatan utama dan 20% kegiatan penunjang atau masing-masing 15 dan 3,75; 30 dan 7,5; 45 dan 11,25; serta 60 dan 15 untuk Widyaiswara Ahli Pertama, Muda, Madya dan Utama, maka banyaknya kegiatan yang harus dilakukan Widyaiswara adalah masing-masing enam kali untuk Widyaiswara Ahli Pertama, Muda dan Madya, dan empat kali untuk Widyaiswara Ahli Utama. Hanya selisih satu kali atau bahkan tidak ada selisih sama sekali untuk Widyaiswara Utama, padahal jumlah makalah yang harus ditulis apabila diterbitkan dalam jurnal ilmiah nasional yang angka kreditnya sebesar 2,5 ( $= 12,5 \times 20\%$ ) adalah dua kali, tiga kali, lima kali dan enam kali menulis masing-masing untuk Widyaiswara Ahli Pertama, Muda, Madya dan Utama. Terasa sekali dalam hal ini Permenpan nomor 42 tahun 2021 tidak menghargai karya tulis ilmiah karena mengurangi angka kredit dan tidak menjadikannya sebagai unsur utama. Kurangnya penghargaan terhadap karya tulis juga terlihat dari angka kredit untuk penyusunan modul pelatihan yang untuk masing-masing jenjang hanya 0,15; 0,39; 0,43; dan 0,83.

Permasalahan akan muncul apabila jumlah

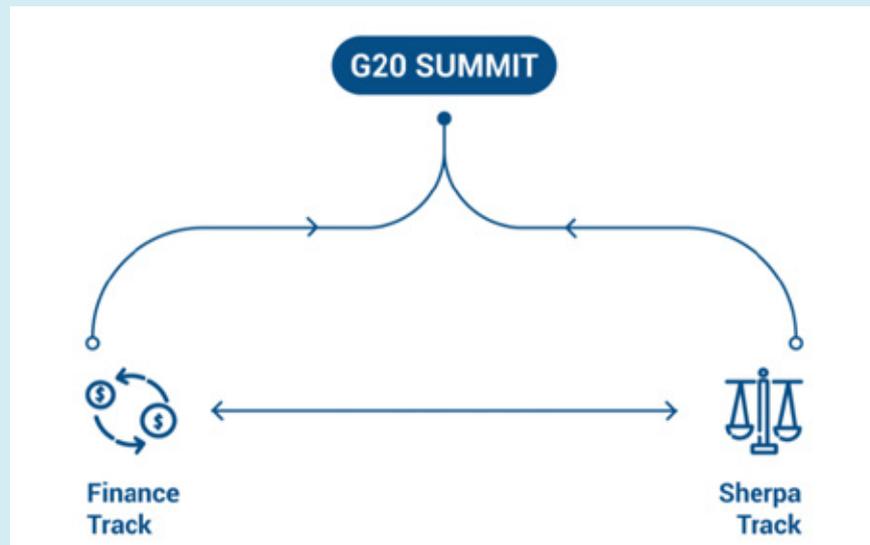
pelatihan dalam setahun tidak banyak yang bisa dilaksanakan. Oleh karena itu penulis menyarankan agar Kementerian PAN-RB meninjau ulang Permenpan nomor 42 tahun 2021 sebelum muncul korban tidak dapat naik pangkat/ jenjang jabatan lebih dari empat tahun seperti yang dialami sebagian pejabat fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai atau bahkan lebih berat lagi, di-"pratun"-kan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Biro Sumber Daya Manusia, 2021. Daftar Pejabat Fungsional Kementerian Keuangan per 1 Januari 2021. Data intern yang tidak diterbitkan. [www.sdm.kemenkeu.go.id/Permintaan-Data](http://www.sdm.kemenkeu.go.id/Permintaan-Data).
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Kepegawaian Negara, 2015. Peraturan Bersama Nomor 1 Tahun 2015 – Nomor 8 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Permenpan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya.
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2014. Permenpan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya.
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2016. Permenpan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2021. Permenpan Nomor 42 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara.

ARDES M.Y. SITANGGANG

# G20 dan Presidency Indonesia 2022



*Gaung Presidency G20 yang dipegang diampu oleh Indonesia semakin sering kita dengar. Disambut dengan penyelenggaraan pertemuan negara-negara G20 di Indonesia sudah dimulai awal bulan Desember 2021. Gaung tersebut membuat pertanyaan tentang apakah itu G20, apakah itu presidency, dan pertanyaan lainnya akan coba jawab.*



## MENGENAL G20

G20 atau disebut dengan Group of Twenty merupakan sebuah forum utama kerja sama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia, yang terdiri dari 19 negara dan 1 lembaga Uni Eropa. G20 dibentuk pada tahun 1999 dengan tujuan untuk mendiskusikan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan stabilitas keuangan internasional. Forum ini dibentuk sebagai salah satu upaya untuk menemukan solusi atas krisis ekonomi, seperti krisis ekonomi 1997-1999, yang pada saat krisis, negara-negara berpendapatan menengah dan memiliki pengaruh ekonomi secara sistemik, termasuk Indonesia. Pertemuan pertama diinisiasi oleh para Menteri Keuangan G7, dimana para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral mulai mengadakan pertemuan untuk membahas respon atas krisis keuangan global.

Langkah tersebut perlu dilakukan karena negara G20 merupakan representasi dari 85% perekonomian dunia, 75% dari perdagangan internasional, 80% investasi global, dan 60% populasi dunia. Representasi tersebut akan memberikan pengaruh dan arah perekonomian global. Sehingga, diperlukan kerja sama yang intens untuk negara G20 untuk mendukung kestabilan dari perekonomian dunia. Pada awalnya, G20 dibentuk menjadi wadah kerjasama dalam bidang ekonomi, kemudian berkembang ke bidang lainnya seperti infrastruktur, perdagangan, perubahan iklim, dan isu-isu global lainnya. Setiap tahun, anggota G20 akan berkumpul menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi (KTT) yang umumnya diselenggarakan setiap bulan Oktober.

## ALUR KERJA G20

Sebagaimana disebutkan sebelumnya G20 membahas tidak hanya keuangan, tetapi juga isu global lainnya. Isu-isu tersebut dibagi menjadi 2 pokok arus isu yang disebut dengan *track* yaitu

isu ekonomi dan keuangan (*finance track*) dan isu lainnya dengan area lebih luas seperti geopolitik, anti korupsi, pembangunan, perdagangan, energi dan lain-lain disebut dengan *sherpa track*. Pembahasan isu di masing-masing *track* dilakukan oleh kementerian dan lembaga terkait, misal untuk *finance track* dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Bank Sentral negara anggota, sedangkan untuk *sherpa track* isu kesehatan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dari masing-masing anggota. Setiap *track* juga akan dibahas secara bertahap. Sebelum dibahas pada tingkat Menteri ataupun Presiden, isu-isu akan dibahas secara komprehensif pada tingkat *working group* (WG). Kemudian, isu-isu dari tingkat *working group* akan dibahas kembali di tingkat deputi (level eselon I). Hasil pembahasan di tingkat deputi akan dibawa ke dalam level Menteri untuk disepakati bersama, atau untuk dibawa di level KTT. Proses pembahasan bertahap ini tentunya memakan waktu yang cukup lama, sehingga jika KTT dilakukan di akhir tahun, maka persiapan untuk KTT tersebut sudah dilakukan pertemuan-pertemuan tingkat WG dan delegasi sepanjang tahun.

#### **PRESIDENCY INDONESIA**

G20 tidak memiliki sekretariat permanen yang mengurus pelaksanaan kegiatan setiap tahunnya. G20 mempunyai tuan rumah (presidensi) yang ditetapkan secara konsensus pada KTT berdasarkan pada sistem rotasi. Akan tetapi, untuk *working group* (WG), sudah terbentuk negara pengampu untuk masing-masing *working group*, sehingga walaupun suatu negara terpilih menjadi presidensi, tidak semua pertemuan dilakukan di negara terpilih tersebut, pertemuan WG bisa dilakukan di negara pengampu WG, akan tetapi tetap didampingi oleh presidensi. Pada tahun 2008, Amerika Serikat menjadi penyelenggara KTT pertama dan pada Oktober 2021, Indonesia terpilih menjadi presidensi G20 untuk tahun 2022 dengan tema yang dipilih "Recover Together, Recover Stronger". Sejak itu, Indonesia mulai menyelenggarakan pertemuan

tingkat deputi mulai Desember 2021 dan level-level selanjutnya sampai dengan Oktober 2022. Saat ini direncanakan akan terdapat 33 (tiga puluh tiga) pertemuan *finance track* di Indonesia, dan 88 (delapan puluh delapan) pertemuan *sherpa track*. Selain itu, dalam masa pandemi, untuk penanganan kesehatan terdapat *Finance-Health task force* antara *finance track* dan *sherpa track*, yaitu Kementerian Keuangan dan Kementerian Keuangan G20 untuk melakukan pembahasan khusus untuk kesehatan, yang diagendakan melakukan pertemuan sebanyak 4 (empat) pertemuan. Semua pertemuan tersebut akan diakhiri dengan puncak pertemuan tingkat tinggi (KTT) yang direncanakan akan diadakan di Bali pada Oktober 2022.

Manfaat yang didapat Indonesia menjadi Presidensi G20, selain reputasi terdapat manfaat nyata yaitu Indonesia bisa mengusulkan agenda yang menjadi prioritas Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam setiap pertemuan tersebut. Kebijakan yang dihasilkan dari G20 tentunya akan berdampak tidak hanya kepada Indonesia tetapi juga ke negara-negara lainnya. Manfaat lainnya yang secara langsung didapat oleh Indonesia adalah dampak ekonomi dari penyelenggaraan setiap event G20. Lokasi penyelenggaraan yang tersebar di seluruh Indonesia, seperti Medan, Bintan, Yogyakarta, Surabaya, Solo, Makassar, Bali dan kota-kota lainnya. Penyelenggaraan tersebut memberikan dampak multiplier kepada pelaku usaha dan masyarakat sekitar tempat pelaksanaan pertemuan tersebut. Jadi, mari kita kawal G20 dan kita sukseskan bersama-sama agar kita bisa *recover together, recover stronger*.



RIDWAN SIDIK KURNIAWAN

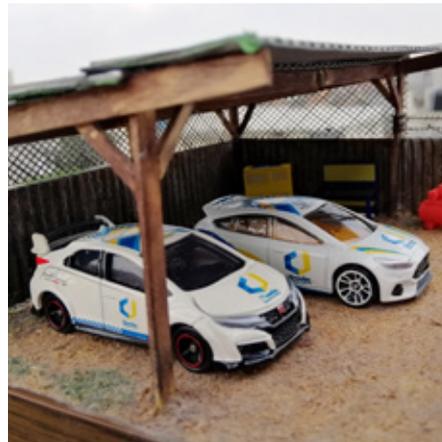
# Saatnya Komunitas Lebih Berperan

FOTO : SAYEKTI DEWI ANGGRAENI

*Memiliki kesamaan dalam sebuah hobi seringkali menjadi alasan terbentuknya suatu komunitas. Begitu juga dengan Komunitas Diecaster Kementerian Keuangan yang lebih dikenal dengan Kodaku. Komunitas yang terbentuk sejak tahun 2014 ini telah menjadi wadah bagi para penggemar diecast di lingkungan pegawai Kementerian Keuangan.*

**B**agi yang masih kurang familiar dengan istilah *diecast*, *diecast* dapat diartikan sebagai mainan atau model yang diproduksi dengan metode *die-casting*, yaitu dengan melelehkan logam atau plastik untuk dibentuk sesuai dengan model tertentu. Biasanya *diecast* merupakan miniatur dari suatu kendaraan seperti mobil, motor, pesawat, atau kendaraan tempur.

*Diecast* juga memiliki skala tertentu. Skala ini menunjukkan ukuran suatu *diecast* dibandingkan dengan model aslinya, umumnya dibuat dari skala yang terkecil 1:87 sampai skala yang terbesar 1:18. Desain yang menarik dengan berbagai pilihan jenis model yang unik membuat banyak orang tertarik untuk menjadikan *diecast* sebagai koleksi. Tak terkecuali bagi para anggota Kodaku.



Atas: Koleksi diecast anggota Kodaku  
Bawah: Foto bersama dalam acara Hari Oeang 2019

Atas: Custom diecast Hari Oeang ke-73  
Bawah: Diecast dalam diorama

Atas: Koleksi diecast Ferrari  
Bawah: Foto bersama dalam acara Tomochi Fair 2019

#### AWAL TERBENTUK

Wiyoso Tranggono, salah satu pendiri Kodaku mengisahkan bahwa pada saat komunitas Kodaku belum terbentuk, ia sudah sering berkumpul dan berinteraksi dengan beberapa orang sesama kolektor *diecast* yang juga merupakan pegawai Kementerian Keuangan. Pertemuan tersebut dilakukan di sela-sela kesibukan kegiatan kantor, dan biasanya berlokasi di kantin. Saat itu, masih belum banyak orang yang bergabung dengan mereka. Sampai pada suatu ketika, teretuslah

ide untuk mengumpulkan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki hobi yang sama dengan mereka. Dari gagasan tersebut, akhirnya dibuatlah grup *whatsapp* untuk menjadi wadah perkumpulan para penggemar *diecast* di lingkungan Kementerian Keuangan. Nama Kodaku dipilih menjadi identitas komunitas. Lambat laun, anggota Kodaku pun bertambah. Dari yang awalnya hanya sekitar 5 orang, hingga saat ini tercatat tidak kurang dari 232 orang telah tergabung menjadi anggota Kodaku. Meskipun grup *whatsapp* masih menjadi



Foto bersama Sri Mulyani dalam acara Hari Oeang 2019



FOTO : DOKUMENTASI KODAKU



Atas: Sesi foto custom diecast Kodaku bersama talent dari Sekretariat Jenderal  
Bawah: Pertemuan Kodaku bersama komunitas diecast lainnya

*“Kita di pemerintahan ini kan hierarki ya, Nah kita gak mau nih modelnya sama lagi. Kita pengennya, mau sampeyan lebih tinggi, mau sampeyan senior, mau sampeyan junior, itu di Kodaku sama.”*

alat komunikasi utama, saat ini Kodaku juga telah menggunakan beberapa media sosial, seperti facebook dan instagram. Selain untuk lebih mempopulerkan Kodaku dan menjaring lebih banyak anggota, media sosial tersebut juga digunakan untuk ‘memamerkan’ koleksi diecast di kalangan anggotanya.

Sebagai suatu komunitas, Kodaku memilih untuk tidak memiliki struktur organisasi. Semua anggotanya memiliki status yang sama sebagai anggota dan diharapkan dapat memberi kontribusi

bagi komunitas. Mundi Atmoko, salah satu anggota yang telah bergabung sejak awal Kodaku dibentuk mengungkapkan hal itu sengaja dilakukan agar nuansa dalam komunitas tidak terpengaruh oleh suasana kantor. Terlebih, semua anggota Kodaku terdiri dari berbagai lapisan pegawai di Kementerian Keuangan. “Kita di pemerintahan ini kan hierarki ya, Nah kita gak mau nih modelnya sama lagi. Kita pengennya, mau sampeyan lebih tinggi, mau sampeyan senior, mau sampeyan junior, itu di Kodaku sama,” jelasnya.

BAYU AUGUSTE BARTHOLDI  
ALUMNI MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION  
ENTREPRENEURSHIP, THE UNIVERSITY OF QUEENSLAND

# Belajar Entrepreneurship di Brisbane, Queensland, Kota Impian Sejak Kecil



## KENANGAN DI BRISBANE

Saya masih mengingat jelas pada akhir tahun 1994, kami sekeluarga mendapat kabar baik, ayah saya ditugaskan kantornya untuk melakukan *business trip* ke Australia. Kebetulan ayah saya dahulu bekerja di perusahaan sinyal kereta api yang berafiliasi dengan perusahaan yang berbasis di Australia. Kala itu kami sekeluarga mengunjungi kota-kota besar di Australia seperti, Adelaide, Perth, Melbourne, Brisbane, Goldcoast, dan Sydney. Dari kota-kota yang kami kunjungi tersebut, saya langsung jatuh hati dengan kota Brisbane, saya mengagumi keindahan dan kenyamanan kota Brisbane sambil mengucap dalam

hati “suatu hari nanti saya harus kembali lagi ke kota ini”.

Memang Tuhan sudah punya rencana, pada tahun 2017 saya mendapatkan kesempatan melanjutkan studi pascasarjana melalui beasiswa FETA Angkatan III. Setelah melalui beberapa tahapan persiapan, akhirnya saya memilih untuk melanjutkan studi saya pada program *Double Degree* SBM ITB bekerjasama dengan University of Queensland, Australia. Program studi yang saya pilih adalah *Master of Business Administration Entrepreneurship* (MBA ENTRÉE) di SBM ITB dan *Master of Business in Innovation and Entrepreneurship* di UQ. Seperti mimpi rasanya ketika

diberi kesempatan untuk kembali ke kota Brisbane, kota impian saya sejak kecil.

## ASN KOK BELAJAR ENTREPRENEURSHIP?

Mungkin banyak yang bertanya, kenapa seorang ASN seperti saya memilih untuk melanjutkan studi saya di bidang *entrepreneurship*? Sebagai ASN kadang kita harus mengerti dan memahami setiap persoalan dari berbagai sisi, kali ini saya memilih untuk melihat dari sisi pengusaha/*entrepreneur*. Selain itu pengalaman yang saya dapatkan ketika memulai kuliah di SBM ITB saya bertemu, belajar bersama, dan berbagi pengalaman dengan banyak pengusaha muda kreatif yang memiliki banyak gagasan-gagasan



menarik dan inovatif yang bisa diterapkan dalam pemerintahan.

Salah satu contohnya adalah bagaimana cara mengambil keputusan yang cepat dan efektif. Ketika saya belajar tentang *entrepreneurial leadership*, saya belajar bahwa ketika dihadapi dengan sebuah permasalahan yang sifatnya darurat dan butuh reaksi yang cepat, para pengusaha ini terbiasa untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada dengan mengambil keputusan secara cepat dan efektif, karena dalam dunia bisnis setiap satuan waktu sangatlah berharga.

Berteman dan belajar bersama dengan para pengusaha muda ini juga memberikan masukan yang berharga kepada saya sebagai ASN, bagaimana pendapat dan pandangan mereka terkait

kebijakan pemerintah dalam dunia usaha. Gagasan-gagasan yang mereka kemukakan ketika kuliah juga bisa melatih kita untuk selalu bersikap kreatif dalam mengatasi masalah yang kita hadapi.

Hal-hal seperti itulah yang bisa melatih saya untuk berpikir kreatif, cepat, dan efektif yang bisa di implementasikan di lingkungan pemerintahan dan membantu pekerjaan saya sebagai seorang ASN.

**SBM ITB FEAT. UQ**

Institut Teknologi Bandung (ITB) dan University of Queensland (UQ) sebuah kombinasi yang sempurna bagi saya untuk melanjutkan studi. Sudah 5 tahun sejak saya lulus jenjang S1 saya dari Universitas Indonesia, terbiasa mengurus mahasiswa

dan peserta diklat membuat saya mulai lupa bagaimana rasanya menjadi mahasiswa dan belajar lagi. Untungnya baik ITB dan UQ memberikan metode pengajaran yang cukup menarik dan membantu saya untuk “kembali” belajar.

SBM ITB memberikan metode pembelajaran yang seimbang antara teori dan praktik. Setiap mata kuliah diampu oleh dua orang dosen, seorang dosen dengan latar belakang akademisi dan seorang dosen dengan latar belakang praktisi, hal ini membantu saya dan mahasiswa lainnya untuk lebih memahami teori yang diterangkan kemudian bagaimana cara mengimplementasikannya dalam dunia kerja/bisnis.

UQ memberikan metode pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk



berpikir kreatif dalam mengatasi setiap permasalahan tanpa harus melanggar peraturan maupun etika yang berlaku di masyarakat. Belajar bersama mahasiswa internasional yang berbeda latar belakang dan budaya dapat memperkaya wawasan saya dalam memecahkan permasalahan. Dalam proses belajar dan mengajar dosen di UQ benar-benar memfasilitasi para mahasiswa untuk terlibat dalam diskusi yang aktif dan menarik, setiap mahasiswa berbagi pengalaman (umumnya iklim usaha dan permasalahannya) di masing-masing negara asalnya, sehingga mahasiswa lain bisa mendapatkan pengalaman baru yang berbeda dibandingkan dengan negaranya sendiri.

#### **MENGINJAKKAN KAKI KEMBALI DI KOTA IMPIAN**

Setelah belajar selama satu semester di SBM ITB, saatnya saya melanjutkan studi saya di University of Queensland, Australia selama 2 semester ke depan. Program *Double Degree* yang saya ambil menggunakan skema “*sandwich*” dimana saya melakukan studi semester pertama di SBM ITB, semester kedua dan ketiga di UQ, kemudian menyelesaikan *final project* saya di SBM ITB pada semester akhir.

Hari pertama tiba di kota Brisbane membuat saya semangat untuk bernostalgia kembali ke 25 tahun yang lalu pertama kali saya menginjakkan kaki di kota Brisbane, suhu udara yang cukup sejuk merupakan salah satu hal yang membuat saya menyukai kota ini. Brisbane merupakan sebuah kota di bagian timur Australia yang cukup

nyaman untuk belajar, penduduk yang ramah, fasilitas penunjang yang lengkap membuat Brisbane dinobatkan sebagai salah satu dari 10 kota yang paling nyaman ditinggali di seluruh dunia.

Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia (PPIA) di Queensland sangat membantu saya ketika tiba di kota Brisbane, mulai dari menjemput di *Brisbane International Airport*, mencari tempat tinggal, menggunakan fasilitas umum dan yang terpenting adalah bagaimana cara hidup bahagia di kota Brisbane.

Yang paling saya sukai dari Brisbane adalah transportasi umumnya, Brisbane Memiliki 3 moda transportasi utama, yaitu Bus, Kereta, dan Kapal Ferry. Yang paling unik adalah Kapal Ferry, penduduk Brisbane menamai moda transportasi

“Pengalaman belajar *entrepreneurship* sebagai ASN baik di dalam maupun di luar negeri memperkaya pemahaman saya akan inovasi, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan.”

ini “*CityCat*”. Kata “*cat*” merupakan kependekan dari kata “*catamarans*” yang memiliki arti “kapal yang memiliki dua lebih dari satu lambung”, memang jika dilihat dari bentuknya, *CityCat* memang memiliki dua buah lambung. Jadi *CityCat* tidak ada hubungannya dengan ikan lele atau *catfish* yang memang populasinya cukup banyak di sungai Brisbane.

Kota Brisbane benar-benar memanjakan penduduknya, selain moda transportasi yang nyaman, Brisbane juga menyediakan fasilitas umum yang nyaman, seperti taman, museum, *city hall*, bahkan pantai buatan di tengah kota, *street beach* dimana penduduk Brisbane bisa berenang di pantai air tawar, lengkap dengan pasir putih bersih dan penjaga pantainya tanpa dikenakan biaya.

#### SUASANA DAN KEGIATAN KAMPUS UQ

University of Queensland (UQ) merupakan salah satu dari 50 kampus terbaik di dunia, kampus utama UQ berlokasi di *suburban* St. Lucia di kota Brisbane Australia. UQ juga anggota dari *Group of 8* (Go8) yang merupakan koalisi dari delapan kampus terbaik di Australia. Ciri khas dari UQ adalah warna ungu yang senada dengan warna pohon jacaranda yang banyak tumbuh di lingkungan kampus.

Suasana kampus yang nyaman, fasilitas yang lengkap, serta kesediaan para dosen dan pengajar juga memberikan waktu khusus untuk melakukan *mentoring* yang sangat membantu terutama bagi mahasiswa internasional. Banyaknya mahasiswa internasional menjadikan UQ sebagai kampus yang penuh warna. Setiap



saat selalu ada kegiatan non akademis yang dapat kita ikuti sesuai dengan minat masing-masing mahasiswa. Jadi bukan hal yang aneh jika ada perayaan kemerdekaan setiap negara dirayakan di kampus, contohnya peringatan kemerdekaan Indonesia yang dirayakan di kampus UQ, bahkan PPIA Queensland jg mengadakan festival makanan, tari dan angklung yang diadakan di *City Hall* Brisbane, tak lupa Sang Saka Merah Putih pun berkibar di *City Hall* Brisbane.

Untungnya saya menjalani studi sebelum pandemi Covid-19 merajalela. Sehingga saya bisa menikmati proses studi saya baik

di SBM ITB maupun di UQ. Pengalaman belajar *entrepreneurship* sebagai ASN baik di dalam maupun di luar negeri memperkaya pemahaman saya akan inovasi, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan. Ilmu yang saya dapatkan selama menjalankan studi diharapkan dapat membantu Kementerian Keuangan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik.

ABDUL 'AZIZ MAGHFUR

# SIARKAN WEBINAR DENGAN OBS STUDIO

*Popularitas aplikasi pertemuan video online Zoom pada saat pandemi saat ini terus meroket. Penggunaan yang mudah, user friendly, ringan dan ringkas membuat aplikasi zoom jadi pilihan untuk pertemuan secara online, baik hanya untuk sekedar silaturahmi, kumpul teman, sampai pada pertemuan resmi dan urusan pekerjaan. Dalam pertemuan online, yuk manfaatkan tips dan trik berikut untuk membuat lawan/teman bicara anda terkagum-kagum.*

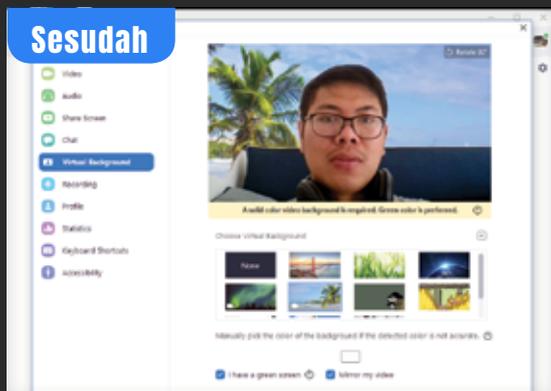
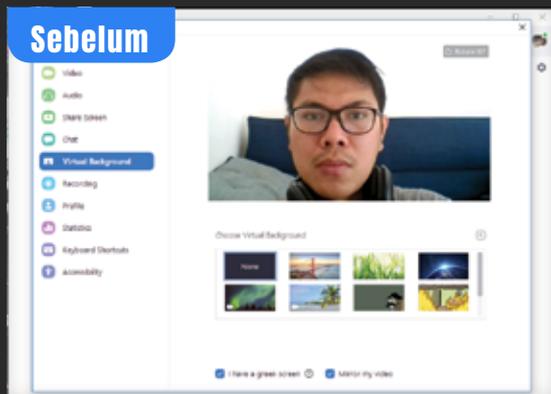


## 1 Menggunakan latar belakang virtual

Pernah terkagum melihat latar teman bicara yang unik/berbeda, latar belakang video, atau hanya kita tidak ingin berlatar kamar/gorden, bisa memanfaatkan trik ini. Fitur ini masih membutuhkan penyempurnaan khususnya jika latar mempunyai warna bervariasi sehingga gambar latar tidak menyatu. Fitur ini akan sangat bermanfaat bila kita mempunyai latar *green screen* dengan spesifikasi komputer yang mendukung tentunya. Sebaiknya atur latar dulu sebelum pertemuan dimulai, tidak lucu kan atasan lagi bagi-bagi tugas, kamu masih asyik utak-atik gambar latarmu.

Langkah-langkah untuk mengubah gambar latarmu antara lain:

1. Jalankan aplikasi Zoom di komputermu;
2. Klik di ikon roda gigi (*gear icon*) dibawah gambar profil;
3. Pilih pilihan "Virtual Background";
4. Pilih gambar/video yang ada, atau unggah gambar/video yang kamu suka.



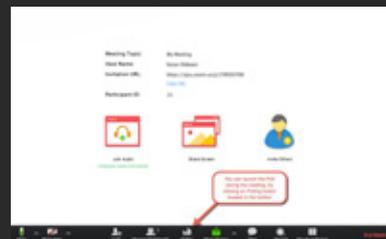
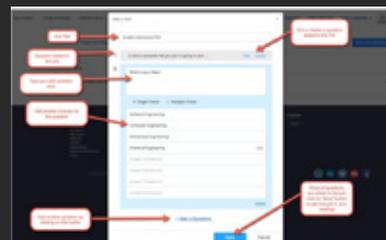
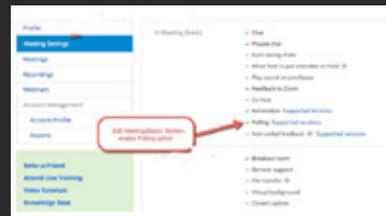
## 2 Mendapatkan umpan balik

Aplikasi Zoom mempunyai fitur *polling* yang akan sangat bermanfaat di saat pengambilan keputusan dengan voting, ataupun hanya untuk mendapatkan umpan balik dari topik pembahasan saat ini. Pilihan *polling* ini akan muncul saat pertemuan dimulai. Jika tidak muncul, pilihan tersebut harus diaktifkan terlebih dahulu. Pilih "Account Management" kemudian ke "Account Settings" kemudian pilih "polling option" di bawah tab "Meeting".

*Polling* dapat dilakukan dengan anonim, sehingga masing – masing peserta tidak mengetahui pilihan terkait *polling*. Fitur *polling* hanya bisa dilakukan oleh *host*, yang kemudian dibagikan ke peserta rapat.

Langkah – langkah mengaktifkan *polling* yaitu:

1. Buka halaman "Meetings" kemudian pilih dari rapat terjadwal;
2. Cari pilihan "Poll" kemudian klik tombol "Add" untuk membuat *polling* baru;
3. Klik pilihan "Polling" di taskbar saat pertemuan;
4. Pilih "Poll" kemudian "Launch Poll".

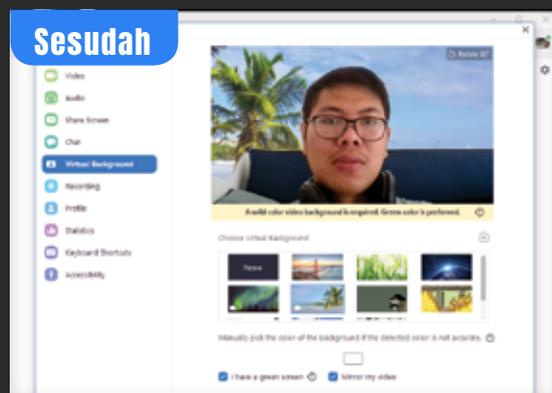
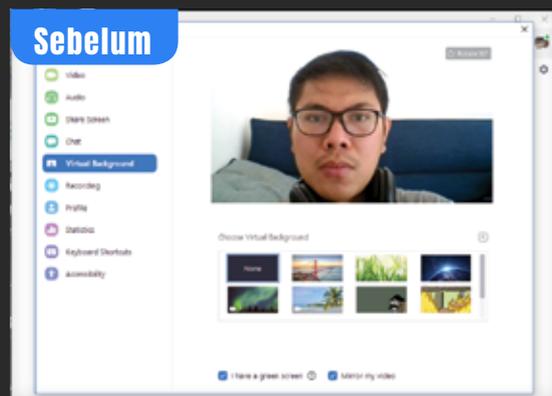


### 3 Menggunakan latar belakang virtual

Pernah terkagum melihat latar teman bicara yang unik/berbeda, latar belakang video, atau hanya kita tidak ingin berlatar kamar/gorden, bisa memanfaatkan trik ini. Fitur ini masih membutuhkan penyempurnaan khususnya jika latar mempunyai warna bervariasi sehingga gambar latar tidak menyatu. Fitur ini akan sangat bermanfaat bila kita mempunyai latar *green screen* dengan spesifikasi komputer yang mendukung tentunya. Sebaiknya atur latar dulu sebelum pertemuan dimulai, tidak lucu kan atasan lagi bagi-bagi tugas, kamu masih asyik utak-atik gambar latarmu.

Langkah-langkah untuk mengubah gambar latarmu antara lain:

1. Jalankan aplikasi Zoom di komputermu;
2. Klik di ikon roda gigi (*gear icon*) dibawah gambar profil;
3. Pilih pilihan “Virtual Background”;
4. Pilih gambar/video yang ada, atau unggah gambar/video yang kamu suka.



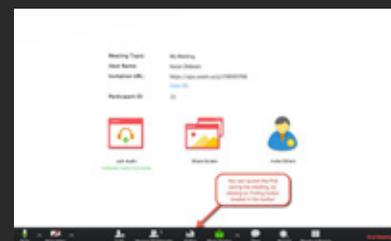
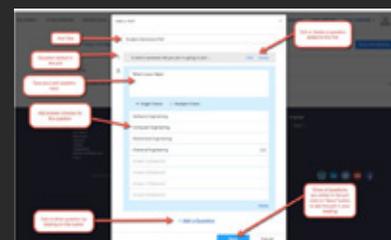
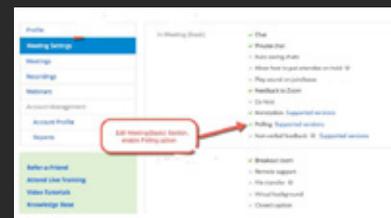
### 4 Mendapatkan umpan balik

Aplikasi Zoom mempunyai fitur *polling* yang akan sangat bermanfaat di saat pengambilan keputusan dengan voting, ataupun hanya untuk mendapatkan umpan balik dari topik pembahasan saat ini. Pilihan *polling* ini akan muncul saat pertemuan dimulai. Jika tidak muncul, pilihan tersebut harus diaktifkan terlebih dahulu. Pilih “Account Management” kemudian ke “Account Settings” kemudian pilih “polling option” di bawah tab “Meeting”.

*Polling* dapat dilakukan dengan anonim, sehingga masing – masing peserta tidak mengetahui pilihan terkait *polling*. Fitur *polling* hanya bisa dilakukan oleh *host*, yang kemudian dibagikan ke peserta rapat.

Langkah – langkah mengaktifkan *polling* yaitu:

1. Buka halaman “Meetings” kemudian pilih dari rapat terjadwal;
2. Cari pilihan “Poll” kemudian klik tombol “Add” untuk membuat *polling* baru;
3. Klik pilihan “Polling” di taskbar saat pertemuan;
4. Pilih “Poll” kemudian “Launch Poll”.

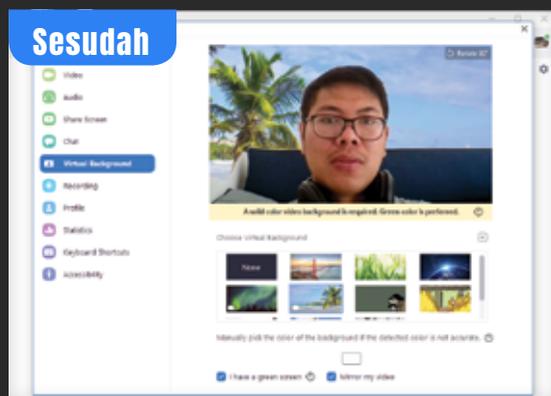
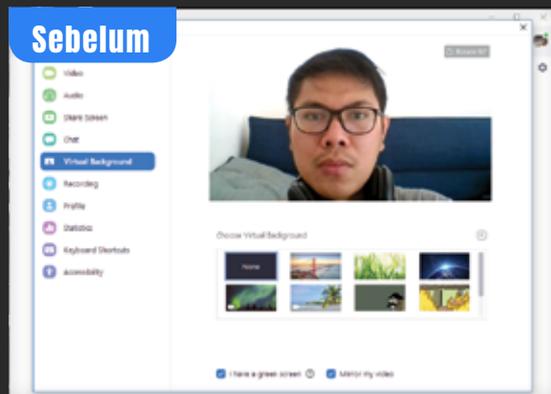


## 5 Menggunakan latar belakang virtual

Pernah terkagum melihat latar teman bicara yang unik/berbeda, latar belakang video, atau hanya kita tidak ingin berlatar kamar/gorden, bisa memanfaatkan trik ini. Fitur ini masih membutuhkan penyempurnaan khususnya jika latar mempunyai warna bervariasi sehingga gambar latar tidak menyatu. Fitur ini akan sangat bermanfaat bila kita mempunyai latar *green screen* dengan spesifikasi komputer yang mendukung tentunya. Sebaiknya atur latar dulu sebelum pertemuan dimulai, tidak lucu kan atasan lagi bagi-bagi tugas, kamu masih asyik utak-atik gambar latarmu.

Langkah-langkah untuk mengubah gambar latarmu antara lain:

1. Jalankan aplikasi Zoom di komputermu;
2. Klik di ikon roda gigi (*gear icon*) dibawah gambar profil;
3. Pilih pilihan “Virtual Background”;
4. Pilih gambar/video yang ada, atau unggah gambar/video yang kamu suka.



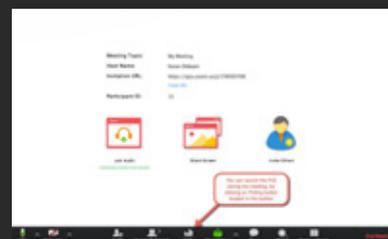
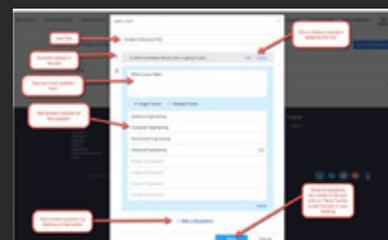
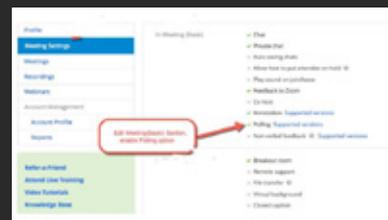
## 6 Mendapatkan umpan balik

Aplikasi Zoom mempunyai fitur *polling* yang akan sangat bermanfaat di saat pengambilan keputusan dengan voting, ataupun hanya untuk mendapatkan umpan balik dari topik pembahasan saat ini. Pilihan *polling* ini akan muncul saat pertemuan dimulai. Jika tidak muncul, pilihan tersebut harus diaktifkan terlebih dahulu. Pilih “Account Management” kemudian ke “Account Settings” kemudian pilih “polling option” di bawah tab “Meeting”.

*Polling* dapat dilakukan dengan anonim, sehingga masing – masing peserta tidak mengetahui pilihan terkait *polling*. Fitur *polling* hanya bisa dilakukan oleh *host*, yang kemudian dibagikan ke peserta rapat.

Langkah – langkah mengaktifkan *polling* yaitu:

1. Buka halaman “Meetings” kemudian pilih dari rapat terjadwal;
2. Cari pilihan “Poll” kemudian klik tombol “Add” untuk membuat *polling* baru;
3. Klik pilihan “Polling” di taskbar saat pertemuan;
4. Pilih “Poll” kemudian “Launch Poll”.





# Sesuatu yang Besar, Berawal dari Hal yang Kecil

LUQMAN HAKIM

*Tentu Anda sudah tidak asing dengan ungkapan “sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit”, kan? Entah siapa orang pertama yang mengungkapkan istilah ini, namun maknanya akan terasa dalam apabila diresapi. Mungkin saat kita masih duduk di bangku sekolah dasar, istilah ini lebih mendorong agar kita rajin menabung. Kita dididik untuk belajar menabung sejak dini. Hakikat istilah tersebut cenderung menyuruh kita agar bersabar mengumpulkan uang untuk sesuatu yang diinginkan. Hingga kemudian kita terus mengumpulkan uang itu, terus bersabar dan terus sampai akhirnya uang itu terkumpul sehingga kita dapat membeli sesuatu yang diinginkan.*

*Seiring berjalannya waktu, kita akan menyadari bahwa betapa konteks dari istilah ini tidak hanya terbatas pada konsep menabung saja. Menginjak dewasa, kita akan disuguhi begitu banyak pencapaian dan kesuksesan terhadap segala sesuatu yang besar. Dimulai dari keberhasilan kuliah di universitas idaman, mendapat pekerjaan yang diinginkan, hingga berumah tangga dengan kehidupan yang mapan. Tak jarang, kita diiming-imingi oleh berbagai macam investasi yang menjanjikan imbalan atau return dengan jumlah yang besar. Seakan-akan membuat propaganda kepada diri kita bahwa jika kita tidak investasi, maka hidup kita akan merugi.*

**N**amun, sebenarnya terdapat satu kata kunci dalam istilah di atas yang mungkin sering tidak kita sadari. Bukan pada konteks menabung, bukan pada kesuksesan besar. Apakah Anda menyadari kata kunci tersebut?

Sabar.

Ya, sabar. Ini adalah kata kunci dalam istilah di atas. Kesabaran untuk mencapai kesuksesan besar. Sabar, bahwa segala sesuatu yang terdapat di dunia ini membutuhkan suatu proses. Seringkali kebanyakan orang, mungkin kita sendiri, kurang sabar dalam memenuhi sesuatu yang diinginkan. Kita mengabaikan proses, yang justru menjadi poin vital dalam upaya kita menuju kesuksesan tersebut.

Maka ketika kita melihat dalam perspektif yang lebih luas, istilah di atas tadi sebenarnya lebih mengajarkan bagaimana kita harus terus bersabar dan terus melangkah dalam menggapai semua impian dan cita-cita kita. Pantang menyerah dan terus bertindak adalah salah satu prinsip yang dipegang oleh pepatah ini. Teruslah melangkah sebelum mendapatkan apa yang diimpikan. Jika impian kita besar, maka *action* yang harus kita lakukan juga harus besar.

#### **MEKANISME SISTEM: MULAI DARI LANGKAH KECIL**

Pencapaian atau kesuksesan terhadap suatu hal yang besar, sejatinya berawal dari setiap langkah-langkah kecil yang dilakukan. Seperti istilah tadi, “sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit”. Secara harfiah, dari kalimat ini pun sebenarnya sudah dapat diterima dengan nalar logis. Bayangkan hamparan pasir yang rata di atas di tanah, atau pasir di tepi pantai. Apabila kita mengambil segenggam pasir, lalu menyusun dan menumpuknya, lama-lama tumpukan pasir tersebut akan terlihat lebih tinggi seperti bukit daripada sebelum kita susun. Barangkali, dari sinilah gagasan istilah tersebut berasal.

Jika kita implementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, segenggam pasir tersebut ibarat sebuah langkah kecil sebagai mekanisme sistem yang kita lakukan untuk mencapai suatu tujuan yang lebih besar. Dalam mekanisme sistem, langkah-langkah kecil ini adalah suatu proses yang mengintegrasikan sumber daya sebagai input agar menghasilkan output yang dapat dinikmati. Sama seperti menabung tadi. Kita tidak akan pernah mempunyai tabungan apabila kita sendiri belum memulai menabung. Kita tidak akan dapat mengubah sesuatu apabila kita sendiri belum melakukan apapun terhadap sesuatu itu.

Rupanya, mekanisme sistem ini sudah tercantum oleh Allah melalui firman-Nya dalam Al Qur'an:

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri” (Q.S. Ar-Ra'd : 11)

Penggalan ayat tersebut menunjukkan bahwa mekanisme sistem ternyata sudah diatur dalam kehidupan beragama. Dalam ayat tersebut, Allah menegaskan bahwa Allah tidak akan mengubah nasib/keadaan kita sebelum kita mengubah keadaan diri kita sendiri. Hal ini turut menjelaskan bahwa tidak ada sesuatu yang instan dalam kehidupan yang fana ini. Semuanya membutuhkan suatu mekanisme proses untuk mencapai tujuan. Seperti halnya mie instan sekalipun, meski namanya mie instan, tapi harus tetap diseduh terlebih dahulu sebelum dapat dinikmati.

Mekanisme sistem inilah yang menuntut kita agar lebih jeli memperhatikan hal-hal yang kecil sekalipun. Artinya, semua itu berawal dari sesuatu yang kecil atau sepele. Jangan pernah meremehkan sesuatu yang di anggap sepele atau kecil seperti murah senyum, menolong orang lain, peduli kepada orang lain, dan sebagainya. Karena hal-hal sepele itulah yang kemudian akan membuat kebesaran jiwa kita.

Salah satu contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari adalah ucapan terima kasih kepada tukang sampah yang mengambil sampah di depan rumah kita. Apabila kita hanya menganggap profesi itu bukan siapa-siapa bahkan cenderung menyepelekan, bayangkan seandainya suatu ketika tukang sampah tersebut tidak lagi mau mengambil sampah rumah. Apa yang terjadi? Sampah di lingkungan rumah kita akan menumpuk dan menyebar bau tak sedap. Bahkan tak jarang kita sebagai pemilik rumah tidak sudi besentuhan dengan sampah rumahnya sendiri, ini sering terjadi karena terlalu menganggap sesuatu itu kecil atau menyepelekan orang lain. Kata sepele otomatis punya pengaruh dalam kehidupan, meskipun dalam pemakaiannya dengan konteks yang berbeda-beda.

Contoh lainnya, kita sering mendengar nasihat “jangan lupa sarapan”. Sebagian dari kita mungkin menganggap hal itu sepele, mungkin karena kita memang sudah terbiasa tidak sarapan. Namun, hal tersebut tampaknya tidak berlaku bagi para pakar kesehatan. Menurut mereka, sarapan itu penting karena berpengaruh bagi kesehatan, terutama memberikan energi untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Sarapan akan membuat hari-hari kita lebih bersemangat untuk menyelesaikan setiap tugas maupun pekerjaan kita. Meskipun tak harus makan yang berat, tetapi kita dianjurkan untuk sarapan sebelum memulai aktivitas. Artinya, sarapan jangan disepelekan meskipun dianggap hal biasa.

Pada skala yang lebih luas, hal-hal kecil lainnya yang sering kita anggap sepele dapat kita amati pada para pemain sepak bola kelas dunia yang terkenal saat ini. Pernahkah Anda bertanya-tanya, apakah mereka menjadi pemain sepak bola seperti itu secara seketika? Tentu saja tidak. Mereka mampu menjadi pemain hebat seperti itu karena sudah latihan sejak usia dini. Mereka sudah menggeluti sepak bola sejak lama. Jika Anda bisa mengumpulkan data-data mereka dan melakukan beberapa investigasi apa saja

yang telah di lakukannya di masa lalu, berapa lama mereka telah bermain sepak bola, apa saja kendala dan peristiwa pahit yang pernah mereka alami, maka Anda tentu memahami bahwa semua itu melalui sebuah mekanisme proses yang dilalui dengan cara yang tidak mudah.

Dan inilah yang mungkin sering kita jumpai di kehidupan nyata. Kita hanya melihat sesuatu hal yang besar tanpa mengetahui bagaimana prosesnya. Betapa sesuatu hal yang besar tersebut, sejatinya berawal dari setiap usaha-usaha kecil untuk memulainya. Maka apabila kita ingin memenuhi suatu pencapaian yang besar, cobalah mulai dari sesuatu yang kecil dulu. Iringi langkah-langkah kecil tersebut dengan kesabaran dan senantiasa mengembangkan diri menuju pendewasaan. Karena sebesar apapun pencapaian atau kesuksesan suatu hal, pasti berawal dari sesuatu yang kecil.

Dikutip dari berbagai sumber





ARIMBI PUTRI

# Yuk, Buat Resolusi Sehat 2022!

*Tak terasa kita sudah akan meninggalkan tahun 2021. Kita flashback lagi sepanjang tahun 2021 ini, apa saja yang sudah dan belum kita lakukan? Jika ada yang belum kita lakukan, hal tersebut bisa kita tuangkan pada resolusi di tahun 2022. Resolusi biasa kita buat di akhir tahun berjalan atau di awal tahun depan sebagai komitmen menjadi pribadi yang lebih baik atau upaya selalu memperbaiki diri. Jadi, meskipun terkadang di tengah jalan kita tidak lagi rutin menjalankannya, tapi tidak ada salahnya tetap berusaha dan mencoba.*

*Resolusi yang biasa dibuat untuk tahun baru di antaranya terkait finansial, pekerjaan, hingga persoalan asmara dan kesehatan. Masih dalam suasana pandemi, tentunya kita masih harus memprioritaskan kesehatan menginjak tahun keduanya bersemayam di muka bumi ini. Mungkin terdengar klasik, namun kita tetap harus mengupayakan kondisi tubuh yang prima apa pun aktivitas yang kita lakukan. Jadi, mari tengok sekelumit tips di bawah ini yang mungkin salah satu (atau lebih) nya bisa kalian ambil sebagai resolusi sehat 2022.*

### **YUK BISA YUK, BATASI KARBO!**

Ketika duduk di bangku Sekolah Menengah, kita telah mempelajari bahwa karbohidrat yang dikonsumsi itu akan diubah menjadi gula atau glukosa. Setelah diubah menjadi glukosa, zat ini akan diserap sel-sel tubuh dengan bantuan hormon insulin. Jika terlalu banyak, hormon insulin tidak akan mampu membantu glukosa terserap sel-sel tubuh. Hal yang terjadi adalah kadar glukosa atau gula di dalam darah akan meningkat, dan menjadikan kita berisiko terkena diabetes.

Untuk mencegah risiko diabetes tersebut, ada baiknya kita mulai menjaga asupan karbohidrat yang kita konsumsi. Apalagi, diketahui bahwa salah satu komorbid yang paling tinggi menyebabkan kematian pada penderita Covid-19 adalah penyakit diabetes. Bagaimana cara membatasi asupan karbo? Salah satunya adalah dengan substitusi makanan dengan yang lebih rendah karbo, seperti daging tanpa lemak (tenderloin, dada ayam), ikan, telur, sayuran berdaun hijau, kacang-kacangan, atau susu dan yoghurt tanpa pemanis.

Kita juga bisa memilih makanan dengan jumlah karbo rendah, namun dengan nilai gizi yang tinggi, seperti buah apel/jeruk seukuran bola tenis, satu cangkir berries, setengah pisang ukuran sedang, setengah cangkir jagung, setengah cangkir buncis atau polong-polongan, satu buah kentang panggang, satu potong roti tawar, atau sepertiga cangkir nasi.

### **AYO BERGERAK!**

Di masa-masa “*stay at home*” selama hampir dua tahun belakangan ini, tidak sedikit yang mengeluhkan kenaikan berat badan atau berkurangnya mobilitas. Hal tersebut merupakan hal yang wajar, mengingat saat ini larangan bepergian (bahkan ke tempat bekerja dan sekolah) mengurangi aktivitas fisik kita. Eits, namun hal tersebut bukan penghalang bagi kita untuk sekadar meregangkan otot-otot selama berada di rumah loh!

Kita bisa melakukan gerakan-gerakan atau olahraga-olahraga sederhana di rumah

atau sekitar rumah. Misalnya dengan melakukan senam ringan, lompat tali, berjalan kaki sekeliling rumah sembari menghirup udara segar, atau sesederhana berdiri dan bergerak setiap 30 menit. Kita juga bisa mencari olahraga yang membuat kita senang untuk melakukannya, seperti bersepeda, berenang, jogging, atau apapun yang menurut Anda menyenangkan. Untuk Anda yang sudah memiliki anak, beraktivitas fisik bersama anak juga dapat menjadi alternatif bagi kita untuk lebih banyak bergerak.

### **MENINGKATKAN KUALITAS TIDUR**

Sudah menjadi rahasia umum bahwa *work from home* membuat kita seringkali malah bekerja melebihi waktu yang semestinya. Hal tersebut tak jarang pula menyebabkan kualitas tidur para pekerja menjadi berkurang. Jangan menyepelekan kualitas tidur kita karena hal tersebut dapat berpengaruh pada sistem imunitas, kondisi emosional sehari-hari, dan juga fungsi metabolisme tubuh.

Lantas, jika memang diharuskan bekerja *overtime*, apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas tidur? Jika harus bekerja lembur pada malam hari, tidur siang akan membantu meningkatkan kualitas tidur kita. Sebaliknya, jika kita tidak bekerja pada malam harinya, maka hindari lah tidur siang.

Sebelum tidur, hindari makan tetapi jangan juga tidur dengan perut kosong. Kedua hal tersebut dapat mengganggu kenyamanan tidur Anda. Usahakan tidur dengan perut terisi namun tidak dalam kondisi kekenyangan, dan beri jarak makan terakhir dengan tidur Anda. Kita disarankan mengonsumsi banyak air, namun tidak sebelum tidur. Hal tersebut akan membuat Anda kerap terbangun karena buang air kecil, yang dapat mengganggu kualitas tidur.

Terakhir, buat kondisi kamar tidur Anda nyaman mungkin. Entah itu dengan kasur yang empuk, sprei yang bersih, lampu redup, suhu ruangan yang sejuk, aromaterapi, dan lain sebagainya yang

sekira mampu membuat Anda tidur dengan nyaman. Hindari penggunaan alat elektronik sebelum tidur karena cahaya biru yang dihasilkan dapat mengganggu hormon melatonin yang bertugas untuk membuat kita tertidur.

#### **LOVE YOURSELF FIRST, MERAWAT DIRI**

Melakukan perawatan diri bukan suatu hal yang egois dan tabu, justru menjadi suatu keharusan. Hal ini tidak hanya membuat diri kita sehat, bugar, dan nyaman, tetapi juga orang lain yang berada di sekitar kita pun turut merasa nyaman. Melakukan perawatan tubuh pun tidak selalu harus dilakukan di salon atau gerai-gerai tertentu, hal-hal sederhana dapat kita lakukan sendiri di rumah.

Beberapa perawatan tubuh sederhana yang dapat kita lakukan di rumah di antaranya adalah merutinkan mandi dan membersihkan wajah dengan sabun, mengonsumsi banyak air putih, mengenakan tabir surya (sunblock), serta melakukan eksfoliasi tubuh. Cukup sederhana bukan? Hal ini pun dapat dilakukan siapa saja tanpa memandang perbedaan *gender*. Jadi, tidak perlu risau jika Anda seorang laki-laki dan merasa tabu untuk melakukan perawatan tubuh, hal tersebut bisa dilakukan kok!

#### **MENDOMINASI DIRI DENGAN PIKIRAN POSITIF**

Tak semudah yang terucap dan tertulis, berpikiran positif memang bukan hal yang gampang dilakukan. Namun juga bukan hal yang mustahil untuk bisa kita upayakan. Tanpa kita sadari, pikiran-

pikiran negatif telah menjadi duri dalam daging kita sendiri. Oleh sebab itu, kita harus sebisa mungkin mengisi hari-hari kita dengan pikiran yang lebih positif. Bagaimana caranya?

Yang pertama, kita bisa mulai membiasakan melihat sisi baik dari suatu hal. Jika hal buruk menimpa Anda, bersedihlah secukupnya, lalu lakukan kontemplasi diri untuk melihat sisi baik dari hal tersebut. Lihat sisi baik meski sekecil apapun. Kedua, perbanyak senyum dan tertawa. Hal tersebut dapat Anda lakukan dengan melihat tontonan yang lucu, atau berkumpul bersama teman yang dapat meningkatkan kebahagiaan Anda.

Berkaitan dengan teman, hal yang kedua untuk membiasakan berpikiran positif adalah memilih lingkaran pertemanan. Lingkaran pertemanan sangat berpengaruh terhadap pola pikir kita. Pilihlah orang di sekitar Anda yang suportif dan juga bisa menularkan energi positif. Lebih baik memiliki lingkaran pertemanan yang sempit namun positif dan suportif dibandingkan luas namun tidak berkualitas.

Itulah tadi sedikit tips yang bisa Anda gunakan sebagai resolusi sehat 2022. Apapun resolusi yang kita pilih, semoga bisa meningkatkan kualitas diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Selamat tinggal 2021, dan selamat datang 2022. Mari kita sambut pergantian tahun dengan sukacita!



IRMA SURYANI LUBIS

# Menepi di Warung Kopi

*“Apa yang bisa lebih mewah dari sofa, buku, dan secangkir kopi.”*

*- Anthony Trollope*

*Sulit membayangkan masyarakat kita tanpa warung kopi. Baik kita pergi ke sana untuk menikmati kopi, teh tarik, mencolokkan laptop, atau mengobrol dengan teman, mendatangi warung/kedai kopi telah menjadi bagian integral dari minum kopi dan bersosialisasi.*

**P**erkembangan minat terhadap kopi berbanding lurus dengan perkembangan usaha warung kopi. Perubahan gaya hidup menyebabkan masyarakat membutuhkan sebuah ruang dengan nuansa baru. Ruang di mana semua kalangan dapat tergabung didalamnya namun tetap ada kopi yang menjadi pemersatunya. Penikmat kopi dari zaman ke zaman pun mulai mengalami perubahan. Pada masa dahulu dapat dilihat bahwa penikmat kopi di warung-warung kopi tradisional terbatas hanya bapak-bapak dan kakek-kakek, yang lebih identic dengan kaum lelaki saja. Namun berbeda jauh dengan yang terjadi pada masa kini. Penikmat kopi tidak hanya dari kalangan lelaki, tetapi juga sudah merambah kepada kalangan wanita baik remaja, orang dewasa maupun orang tua.

Hal ini dapat dilihat dari maraknya fenomena kemunculan warung-warung kopi, baik yang mengunsung unsur tradisional maupun modern. Kini orang pergi ke warung kopi tidak hanya untuk sekedar mencicipi kopi khas warung kopi itu saja, melainkan untuk nongkrong, kumpul dengan keluarga dan bersantai dengan kelompoknya. Tak jarang kini di Medan banyak terdapat warung kopi dengan konsep yang berbeda dari warung kopi biasanya, mulai bermunculan layaknya jamur dimusim hujan. Konsep yang lebih modern dilengkapi dengan nuansa anak muda masa kini merupakan ciri khas dari warung-warung kopi tersebut. Perubahan warung kopi dari tradisional hingga menjadi warung kopi modern seperti yang ada saat ini terjadi bukan tanpa alasan. Demi kepuasan konsumen yang datang, perkembangan zaman dan pastinya untuk mendapatkan keuntungan atau margin atas usaha yang dijalankan menjadi beberapa alasan terjadinya perubahan tersebut.

Maraknya kemunculan warung kopi saat ini tidak terlepas dari pengaruh gaya hidup kota besar yang

menyuguhkan banyak kesenangan bagi para pencari hiburan dan menjadi tempat “nongkrong” favorit bagi kalangan anak muda di area kampus, pusat perbelanjaan dan perkantoran di Medan. Hadirnya inovasi baru dalam pembuatan dan pengemasan kopi menjadi salah satu alasan semakin banyaknya pecandu kopi di dunia ini (Majalah Swasembada, 1995. “Galeria di Yogyakarta”, Edisi No. 1).

Hadirnya gaya hidup modern pada masyarakat perkotaan telah melahirkan kebiasaan-kebiasaan baru dalam kehidupan sehari-hari, salah satu contohnya yaitu budaya nongkrong. Ketertarikan kaum muda terhadap fenomena budaya nongkrong saat ini menjadi salah satu faktor munculnya warung-warung kopi modern di kota Medan. Selain itu, hadirnya warung-warung kopi tradisional di kota-kota besar lainnya atau bahkan diluar negeri, juga berimbas kepada kuantitas warung kopi di kota Medan. Hal ini tidak terlepas dari peran media sosial, internet dan televisi dalam mempromosikan budaya nongkrong di warung kopi kepada masyarakat luas. Akhirnya tren ini pun semakin merebak dan banyak diikuti oleh masyarakat luas khususnya masyarakat yang hidup di daerah perkotaan.

Dalam perkembangannya, warung kopi dijadikan sebagai pusat sosialisasi perkotaan, tempat di mana kita dapat terlibat dalam wacana pribadi di ruang publik, hal ini tampak dengan menjamurnya kehadiran warung kopi, termasuk di lingkungan Balai Diklat Keuangan Medan dalam kurun tiga tahun terakhir.

Ciri warung kopi yang cukup khas adalah ruang terbuka luas tanpa dinding dan sekat, dengan jejeran kursi-kursi, gerai menu yang variatif, dan tentu saja dilengkapi fasilitas wajib berupa wifi dan *colokan*. Terdapat beberapa warung kopi favorit di sekitar Balai Diklat Keuangan Medan, antara lain, Pos Kupa, Cadika Kopi, Green Kuphi, dan D’johor Coffee & Seafood.



#### POS KUPI

Merupakan salah satu pelopor warung kopi yang buka selama 24 jam di wilayah Medan Johor, tepatnya berlokasi di Jalan Karya Wisata. Untuk memperkuat image sebagai tempat nongkrong, Pos Kupa menyediakan enam titik proyektor untuk menyelenggarakan nonton bareng. Pos Kupa merupakan warung kopi yang paling ramai di sekitaran Medan Johor, terutama di akhir pekan dan malam hari. Untuk menu andalannya sendiri tidak jauh-jauh dari Kopi sanger Aceh, teh tarik, kerang rebus, mie aceh, roti cane, dan mie instan rebus/goreng.



#### CADIKA KOPI

Berlokasi di salah satu taman terbesar di Kota Medan, yaitu Taman Cadika, warung kopi ini juga mengadaptasi nama Cadika. Tidak seperti warung kopi yang lain di sekitaran Johor, yang “hanya” sebatas warung kopi, namun Cadika Kopi terlihat menyasar pasar keluarga, dengan melengkapi fasilitas warung kopi dengan wahana permainan anak, seperti bianglala, komedi putar, odong-odong, dan kereta api. Dalam beberapa kesempatan, warung kopi ini juga dapat bertransformasi menjadi *wedding venue*.



#### D'JOHOR COFFEE & SEAFOOD

Warung kopi ini menawarkan lokasi yang luas dan nyaman dengan lokasi parkir yang luas. Selain itu warung kopi ini juga menawarkan menu-menu favorit dan khas masakan nusantara, terutama seafood. Dalam kurun waktu yang tak terlalu lama D'Johor Coffee & Seafood tampil sebagai salah satu cafe atau resto yang populer di kalangan warga Medan dan sekitarnya. Konsep yang diusung adalah gabungan antara tiga aktivitas sekaligus yaitu makan, ngopi dan *wedding*.



#### GREEN KUPHI

Dengan menu yang tidak jauh berbeda dari warung kopi lainnya, Green Kuphi dapat dijadikan alternatif warung kopi dengan ruang yang luas.

*Warung kopi terus berkembang dan mengalami peningkatan jumlah pengunjung yang signifikan. Hadirnya warung kopi juga memberikan kontribusi yang lebih untuk penggunaannya, yakni sebagai tempat ngopi, rapat, bertemu relasi, tempat mengerjakan tugas, tempat perayaan dan sebagai tempat nongkrong.*

ANIES SAID BASALAMAH

## RESENSI

# Imperfect Leadership

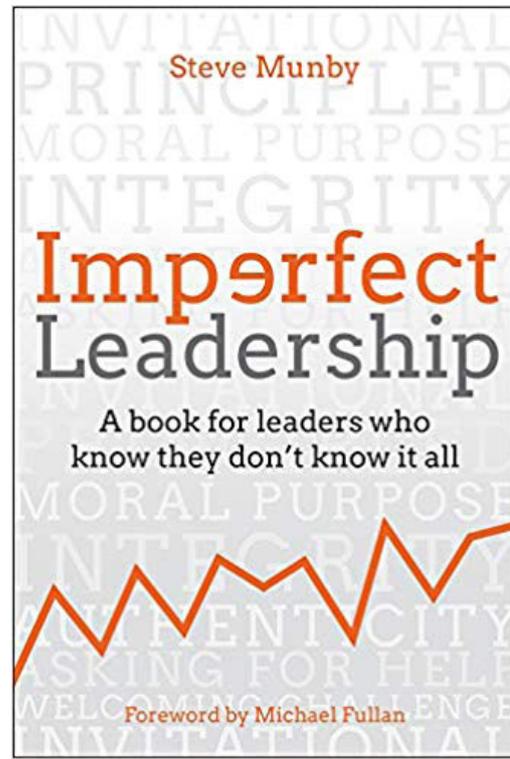
Jika menilai buku berdasarkan sampulnya (sebenarnya ada pepatah yang melarang kita untuk menilai buku hanya dengan membaca sampulnya saja), Anda kemungkinan besar akan beranggapan bahwa buku ini berisi para pemimpin yang gagal dalam mengambil keputusan sehingga dinilai tidak sempurna. Anda salah. Buku ini campuran pengalaman pribadi perjalanan kepemimpinan (*leadership journey*) Steve Munby, yang pernah menjadi CEO Education Development Trust, dan kebijakan-kebijakan (*wisdom*) yang dia ajarkan.

PENULIS : STEVE MUNBY  
 PENERBIT : CROWN HOUSE PUBLISHING LTD  
 TAHUN TERBIT : 2019  
 TEBAL BUKU : 320 HALAMAN

Pada Bab Satu, misalnya, dia mengawali dengan pengalaman tahun 2004 ketika mengikuti *fit and proper* untuk jabatan CEO dari National College for School Leadership. Dia merasa tidak mungkin lulus karena tidak memiliki pengalaman dalam bidang pendidikan di tingkat nasional, sedangkan kandidat lainnya banyak yang memiliki. Tapi ternyata dia yang kemudian menang. Ini menjadikannya keyakinan dan filosofi dalam buku ini bahwa manusia tidak ada yang sempurna, termasuk pemimpin. Dari ketidak-sempurnaan inilah kemudian orang, tidak terkecuali pemimpin, belajar untuk memperbaiki hal-hal yang tidak sempurna tersebut sambil menginspirasi anak buahnya untuk berbuat sebaik yang bisa dilakukan. Hal ini membawa pada pemikiran bahwa pemimpin yang baik itu bukan dilahirkan (*born*) atau dibentuk (*made*), melainkan dibangun (*built*). Selain itu, pemikirannya yang lain yang bisa

kita pelajari adalah bahwa pemimpin yang terbaik itu adalah yang menyadari (*aware*) kekuatan dan kelemahan dirinya dan bukannya berusaha untuk menjadi baik dalam segala hal melainkan mencari orang lain yang akan melengkapi sebagai sebuah tim.

Dengan mendasarkan pada pemikiran seperti itu, maka buku *Imperfect Leadership* bisa digunakan baik oleh mereka yang ingin terlibat atau yang sudah biasa terlibat dalam tugas-tugas memimpin organisasi yang cenderung tidak mudah dan bahkan menantang. Dari buku ini para calon pemimpin bisa mendapatkan pesan-pesan yang bijaksana serta nasihat-nasihat (dan Munby tidak mengharapkan sebaliknya yaitu menjadi momok karena adanya kesalahan), sedangkan bagi para pemimpin yang sudah berpengalaman buku ini bisa memberikan energi baru dan penyegaran. Enak dan tidak enaknyanya menjadi pemimpin, khususnya



Tabel Judul Bab dalam Buku *Imperfect Leadership*

BAB	JUDUL BAB
Bab Satu	Meminta Bantuan ( <i>Asking for Help</i> )
Bab Dua	Saya Harus Seradikal Apa? ( <i>How Radical Do I Need to Be?</i> )
Bab Tiga	Kebaikan dan Tantangan Kolaborasi ( <i>Collaboration – Its Joys and Challenges</i> )
Bab Empat	Menjadi Pemimpin yang Sistematis ( <i>Being a System Leader</i> )
Bab Lima	Kepemimpinan Otentik ( <i>Authentic Leadership</i> )
Bab Enam	Kepemimpinan pada Masa perubahan ( <i>Leadership at Times of Change</i> )
Bab Tujuh	Gaung Kepemimpinan ( <i>Resonant Leadership</i> )
Bab Delapan	Kekuasaan dan Cinta ( <i>Power and Love</i> )
Bab Sembilan	Memulai Lagi dari Awal ( <i>Starting Over</i> )
Bab Sepuluh	Kegelapan Jiwa ( <i>Dark Night of the Soul</i> )
Bab Sebelas	Penantian Panjang Datangnya Perubahan yang Segera ( <i>The Long Wait for Sudden Improvement</i> )
Bab Dua Belas	Kepemimpinan yang Etis ( <i>Ethical Leadership</i> )

dalam dunia pendidikan, dijelaskan dalam buku ini.

Buku ini terdiri atas 12 bab serta dua bagian: pendahuluan dan kesimpulan. Pada bagian Pendahuluan Munby bercerita tentang pengalamannya sebagai CEO yang merasa gagal akibat adanya defisit sebesar 4 juta Poundsterling. Ketika itu dia merasa sudah 18 bulan menjadi CEO tapi kondisinya seasa tidak membaik dilihat dari laporan keuangan. Beberapa pertanyaan berkecamuk dalam dirinya yang menunjukkan keraguan pada kemampuan dirinya dan merasa mungkin telah melakukan kesalahan: Apa harus mengundurkan diri? Apakah dirinya masih dipercaya? Berapa waktu lagi yang akan diberikan oleh Dewan padanya? Apakah strategi yang diambilnya salah? Lebih buruk lagi, dalam interviu yang disiarkan langsung oleh radio Merseyside, peniarnya bertanya menohok: kenapa tidak menyerah saja? Koran Daily Mail yang memintanya untuk diwawancara juga membuat kesimpulan bahwa otoritas pendidikan daerah mengalami masa yang terburuk ketika dalam masa kepemimpinannya. Koran Liverpool Echo malahan memintanya untuk

mengundurkan diri karena merendahkan Knowsley, wilayah yang mencakup beberapa kota dan distrik di Inggris. Untung saja ada mentor yang menasehati bahwa apa yang dilakukannya sudah benar, hanya saja memang perlu waktu untuk melihat pengaruhnya. Karena itu dia tidak jadi mengundurkan diri. Tapi bukankah semua orang pernah merasa bahwa dirinya tidak pas meduduki jabatan tertentu, atau melakukan kesalahan selama menjadi pemimpin? Tapi masa iya sama sekali tidak menunjukkan keberhasilan? Banyak bahkan yang meninggalkan legasi atau peninggalan yang menakjubkan. Demikian pula dengan Steve Munby. Pada akhir bagian ini Munby berdasar pengalamannya menasihati beberapa hal sebagai berikut:

1. Konteks, atau situasi dan kondisi (sikon) dalam teori *situational leadership*, dalam dunia pendidikan sangatlah penting. Strategi atau bahkan gaya kepemimpinan yang berhasil di suatu organisasi, atau bahkan suatu tahun dalam organisasi yang sama, belum tentu berhasil diterapkan pada tahun atau organisasi yang berbeda.

2. Suatu periode yang sulit bisa jadi akan diikuti dengan periode yang juga sulit atau kegagalan, tetapi bisa pula berhasil. Karena itu tidak perlu pesimis.
3. Pemimpin perlu mengembangkan gaya kepemimpinannya sendiri berdasarkan keyakinan dan nilai-nilai yang dianutnya, berdasarkan keahlian dan kemampuannya, berdasarkan kepribadiannya dan konteks yang dihadapi atau dialaminya.
4. Meskipun konteks berbeda, ada beberapa aspek kepemimpinan yang fundamental yang tetap tidak berubah, yaitu perlunya pemimpin untuk tetap sadar diri (*self-aware*), untuk terus menjadi pemelajar, untuk tetap antusias, untuk menjadi dirinya sendiri (autentik), untuk tetap terbuka menerima masukan dan untuk tetap berpegang teguh pada prinsip.

Ke-12 bab dalam buku ini (selain bab pendahuluan dan kesimpulan) dapat dilihat pada Tabel.

Secara keseluruhan, buku ini enak dibaca dan inspiratif.

FOTO OLEH: GHINA AFINI CAPRIDITI

# BALIKPAPAN



## PANTAI MANGGAR DAN PANTAI LAMARU

Pantai yang dikelilingi pohon-pohon pinus membuat suasana menjadi sejuk dan damai. Kurang lebih itulah gambaran yang tepat untuk Pantai Manggar dan Pantai Lamaru yang letaknya saling berdekatan ini. Pantai Manggar dan Pantai Lamaru terletak di Kelurahan Manggar dan Teritip, Balikpapan. Pantai Manggar berjarak sekitar 9,5 Km dari Bandara Internasional Sepinggang sedangkan untuk Pantai Lamaru berjarak 15,9 Km dari Bandara Internasional Sepinggang.

Pantai Manggar memiliki banyak fasilitas hiburan seperti *buggy car*, jetski, lapangan voli, *banana boat*, dan lainnya. Sedangkan Pantai Lamaru terkenal dengan pohon cemaranya yang rindang dan masih asri. Piknik bersama keluarga di kedua pantai ini merupakan pilihan yang cocok untuk bersantai di hari libur.



## MANGROVE CENTER BALIKPAPAN

*Mangrove Center* merupakan Hutan Bakau yang dikelola secara mandiri oleh Agus Bei seorang warga sipil yang tinggal di perumahan Graha Indah dekat dengan lokasi *Mangrove Center*. Hutan Bakau ini sendiri pernah di tebangi penduduk sekitar untuk dibuat tambak ikan. Saat pohon-pohon sudah habis ditebangi, banjir air rob dan angin puting beliung sering melanda perumahan tempat Agus Bei tinggal. Berawal dari situ ia bertekad untuk menghijaukan kembali hutan bakau tersebut hingga seperti sekarang ini dengan biaya sendiri.

Di *Mangrove Center* dihuni sekitar 40 jenis mangrove yang didominasi pohon bakau berjenis *Rhizophora mucronata* dan juga dihuni oleh hewan endemik khas kalimantan, yakni Bekantan yang jumlahnya sekitar 400 ekor. Untuk menyusuri hutan bakau, perjalanan ditempuh menggunakan perahu motor dengan biaya 300 ribu rupiah sekali jalan.



#### **KAWASAN WISATA PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP (KONSERVASI BERUANG MADU)**

Kawasan Wisata yang adem untuk menengok beruang madu yang lagi asyik makan. Untuk kalian yang mau ke tempat ini, lebih baik datang di 9 pagi atau jam 3 sore karena pada jam-jam ini adalah waktu beruang madu keluar kandang untuk diberi makanan. Lokasinya cukup jauh dari Kota Balikpapan sekitar 23 km di sebelah utara kota Balikpapan. Tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta Km. 23 Karang Joang, Balikpapan. Tidak hanya menikmati lingkungan hidup beruang madu, kalian juga bisa memanfaatkan fasilitas lain yang ada disana seperti Lamin (rumah adat Suku Dayak) yang bisa digunakan sebagai tempat pertemuan/ rapat, tempat bermain, pusat oleh-oleh, dan lainnya. Selain beruang madu, kawasan wisata ini juga mengelola program adopsi kucing. Kucing yang ada di sini adalah kucing liar yang telah dikebiri, divaksinasi, tidak cacingan dan telah menerima pengobatan kutu.



#### **PANTAI MELAWAI DAN KAMPUNG NELAYAN MANGGAR**

Merupakan pantai di tengah kota Balikpapan tempat para masyarakat menikmati senja sambil membeli jajanan seperti pisang goreng, salome dan jagung bakar hingga malam tiba. Berada di Jalan Jenderal Sudirman dekat pelabuhan Semayang, Pantai Melawai merupakan pilihan yang cepat untuk dapat melihat tongkang batubara yang melintas dan lokasi pengeboran minyak bumi lepas pantai dari kejauhan.

Kampung Nelayan Manggar berada di muara sungai Manggar di kota Balikpapan. pemandangan di muara Sungai Manggar selalu menggoda untuk menepi di jembatan Manggar dan mengabadikan matahari sore di sana. Terdapat Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dimana para nelayan menjual hasil tangkapannya dari laut.

# KANG EDU

CERITA & ILUSTRASI : BIMO ADI



# STOP

A person in a light blue shirt is standing behind a wooden table, with both hands raised in a 'stop' gesture. In the foreground, another person's hands are holding a brown envelope. The scene is framed by a dark, torn-paper-like border at the top and bottom.

# GRATIFIKASI

[gol.kpk.go.id](http://gol.kpk.go.id)

Laporan gratifikasi yang disampaikan melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL) akan diproses oleh KPK dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan dinyatakan lengkap dan diterima oleh KPK.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) berhasil meraih dua penghargaan dalam ajang It Works Top Digital Awards 2021:

1. **BPPK** sebagai pemenang **Top Digital Implementation 2021 #Level Stars 4**, dan
2. **Kepala BPPK** sebagai pemenang **Top Leader on Digital Implementation 2021**.



ISSN: 2086-4833



9 772086 483008